



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C LANTAI 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 E-mail : ditjen.pkh@pertanian.go.id Website : <https://ditjenpkh.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 13718/KPTS/HK.160/F/12/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang: a. bahwa rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
- b. bahwa agar kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan rencana strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
6. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan tinggi Madya di Lingkungan Kementrian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU :** Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA :** Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KETIGA :** Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam:
1. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 2. penyusunan indikator kinerja utama lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 3. penyusunan Renstra unit organisasi Eselon II, serta Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan,
- untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KEEMPAT :** Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025


DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,
AGUNG SUGANDA
NIP 197611252003121001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 13718/KPTS/HK.160/F/12/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Peternakan dan Kesehatan hewan memiliki peran yang strategis dalam penyediaan pangan dan gizi bagi masyarakat Indonesia. Komoditas peternakan merupakan sumber protein hewani yang berkualitas tinggi, kaya akan vitamin B12, Zat besi, Zinc, Kalsium dan Omega 3 yang sulit diperoleh dari sumber nabati. Dalam ketahanan pangan, komoditas peternakan merupakan penyedia pangan yang stabil sepanjang tahun, menjadi sumber penghasilan peternak dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan. Selain itu, limbah dari peternakan berupa kotoran hewan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk lahan pertanian atau dijual kembali sebagai produk sampingan yang bernilai jual tinggi.

Kesehatan hewan menjadi aspek yang penting dalam pengelolaan peternakan karena berperan langsung dalam menjaga produktivitas ternak serta mendukung kesehatan masyarakat melalui pengendalian zoonosis dan peningkatan mutu produk hewan. Penyelenggaraan kesehatan hewan yang terpadu dan berkelanjutan, termasuk pencegahan, pengendalian, dan pengobatan penyakit, menjadi pondasi utama dalam mewujudkan kedaulatan kesehatan hewan dan daya saing produk peternakan nasional di pasar domestik maupun internasional.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang kuat dan mandiri dalam bidang pangan, khususnya di subsektor peternakan. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Ditjen PKH ini didasarkan pada beberapa dasar hukum yang kuat, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan: Undang-Undang ini menjadi landasan hukum yang mengatur tentang

penyelenggaraan pangan nasional, termasuk di dalamnya adalah subsektor peternakan.

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN): Renstra Ditjen PKH disusun sejalan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
9. Peraturan Menteri terkait: Berbagai peraturan menteri yang mengatur tentang penyusunan Renstra dan pengelolaan program dan kegiatan di bidang peternakan menjadi acuan penting dalam penyusunan Renstra Ditjen PKH.

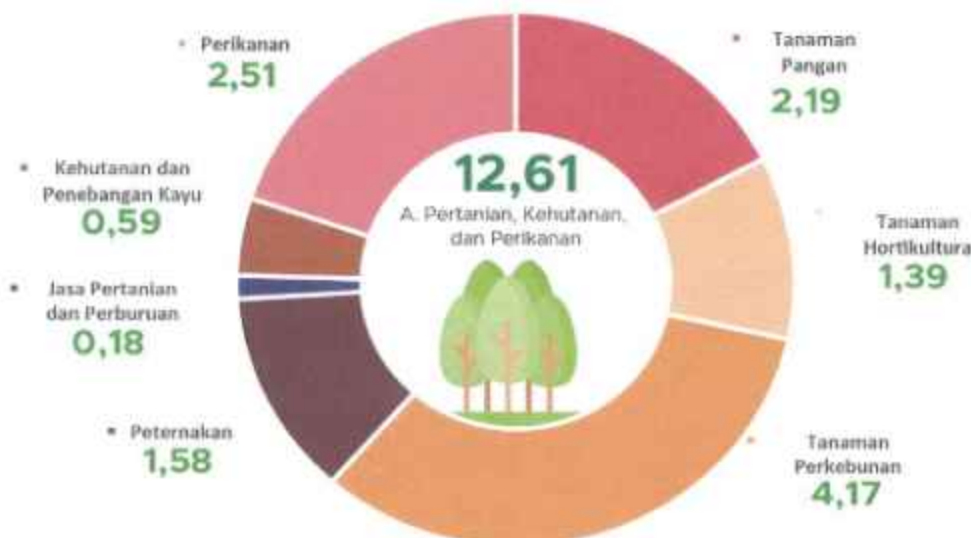
Dalam penyusunan Renstra ini, Ditjen PKH mengacu pada beberapa acuan penting, yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029: Merupakan landasan utama dalam merumuskan visi, misi, serta strategi pembangunan subsektor peternakan dan kesehatan hewan agar sejalan dengan tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
2. Visi dan Misi Kementerian Pertanian: Renstra Ditjen PKH diselaraskan dengan visi dan misi Kementerian Pertanian untuk memastikan sinergi dan keselarasan dalam pencapaian tujuan bersama.
3. Hasil Evaluasi Renstra Sebelumnya: Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya menjadi bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Renstra yang baru.

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO), subsektor peternakan memainkan peran krusial dalam menyediakan pangan, pendapatan, dan mata pencaharian bagi miliaran orang di seluruh dunia. Namun, saat ini subsektor peternakan tengah menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Tantangan seperti perubahan iklim, penyakit hewan, dan fluktuasi harga telah menjadi sorotan utama di subsektor peternakan yang perlu untuk diperhatikan secara khusus. Salah satu tantangan utama yang dihadapi peternakan global adalah perubahan iklim. Kenaikan suhu global, perubahan pola curah hujan, dan cuaca ekstrem semakin sering terjadi, hal ini berdampak pada ketersediaan pakan, kualitas air, dan kesehatan ternak. Selain itu, pertumbuhan populasi penduduk dunia juga meningkatkan permintaan akan produk peternakan, sehingga meningkatkan ancaman terhadap sumber daya alam. Data FAO mencatat adanya peningkatan permintaan produk peternakan seiring pertumbuhan populasi penduduk global. Namun, terdapat beberapa kendala terkait produksi ternak yang disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya keterbatasan lahan, sumber daya air, dan banyaknya peternak yang tidak menerapkan praktik peternakan berkelanjutan.

Subsektor peternakan di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Menurut

data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024**), subsektor peternakan berkontribusi sekitar 1,58% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan nilai mencapai sekitar Rp349.843,9 triliun.



Sumber: Indikator Pertanian BPS, 2024**
Gambar 1. Kontribusi sektor pertanian

Disamping berkontribusi terhadap PDB, subsektor peternakan juga merupakan salah satu sumber utama protein hewani bagi masyarakat Indonesia, baik dalam bentuk daging, susu, maupun telur. Selain itu, subsektor ini juga berkontribusi dalam penyediaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan di pedesaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Peternakan di Indonesia memiliki potensi besar, namun masih menghadapi sejumlah kendala seperti produktivitas yang rendah, penyebaran penyakit hewan, dan ketergantungan pada impor sarana produksi peternakan (*Grand Parent Stock*/GPS dan bahan pakan), serta komoditas ternak (daging sapi/kerbau dan susu). Perbandingan dengan kondisi global, Indonesia perlu lebih fokus pada penerapan teknologi peternakan yang tepat guna, pengembangan sistem produksi yang berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di subsektor peternakan. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan produksi, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

1.1.1 Indikator Makro Peternakan dan Kesehatan Hewan

Periode 2020-2024 menjadi babak penuh tantangan bagi subsektor peternakan Indonesia yang diwarnai dinamika kompleks dari empat faktor utama yang saling berkaitan yaitu: permintaan, penawaran, kebijakan dan regulasi pemerintah, serta lingkungan global dan teknologi.

Dari segi permintaan, awal periode pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan daya beli dan tutupnya sektor pelayanan publik, diikuti pemulihan bertahap pada tahun 2022-2024 yang disertai pergeseran preferensi konsumen ke produk yang lebih terjangkau seperti ayam ras dan telur akibat tekanan inflasi, serta peningkatan kesadaran akan produk dengan jaminan keamanan pangan. Dari segi penawaran, industri menghadapi gangguan rantai pasok bahan baku pakan, wabah Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), serta dampak fenomena iklim *La Nina* dan *El Nino* yang memengaruhi ketersediaan hijauan. Kebijakan pemerintah hadir melalui instrumen impor bahan baku pakan dan produk

peternakan serta program vaksinasi massal. Sementara itu, faktor lingkungan global seperti stabilitas keamanan multinasional yang mengganggu pasokan pakan global, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi veteriner turut memengaruhi biaya produksi dan kapasitas penanganan kesehatan hewan. Keberagaman seluruh faktor ini menciptakan ketidakpastian dalam indikator makro utama, dimana produksi dan populasi ternak mengalami hambatan, harga konsumen berfluktuasi, dan ketergantungan impor, memberikan pelajaran berharga tentang kerentanan sistem peternakan nasional sekaligus pentingnya pendekatan terintegrasi berbasis *One Health* untuk membangun ketahanan subsektor peternakan yang berkelanjutan.

Secara spesifik, kinerja dan ketahanan relatif subsektor peternakan dapat diamati pada beberapa indikator makro antara lain: Produk Domestik Bruto (PDB), Ekspor Impor, Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Nilai Tukar Petani (NTP), sebagaimana yang diuraikan di bawah ini.

a. PDB Subsektor Peternakan



Sumber: BPS 2024

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Gambar 2. PDB Subsektor Peternakan

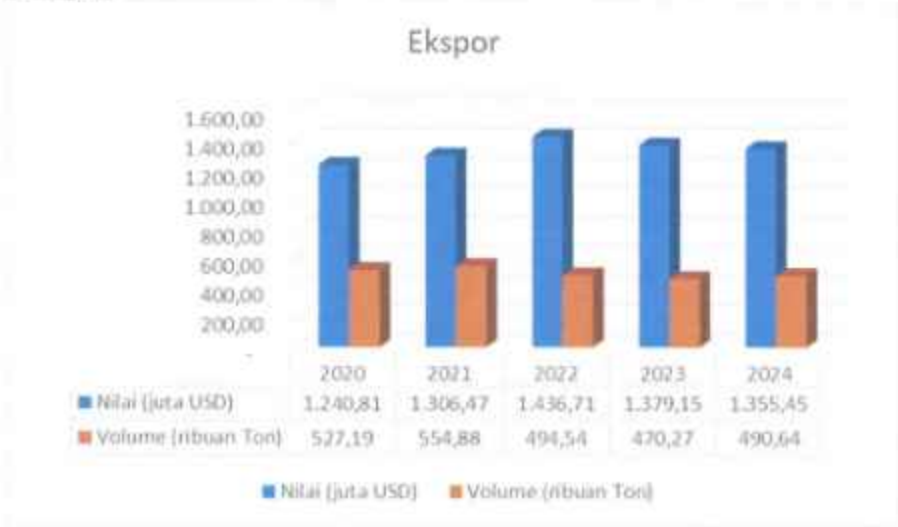
PDB subsektor peternakan menunjukkan tren pertumbuhan positif selama periode 2020–2024. Berdasarkan harga berlaku, nilai PDB peternakan meningkat dari Rp260,24 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp349,84 triliun pada tahun 2024**). Sementara itu, berdasarkan harga konstan (tahun dasar 2010), nilai PDB juga mengalami peningkatan dari Rp167,12 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp189,85 triliun pada tahun 2024**).

Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi di subsektor peternakan, yang didorong oleh meningkatnya permintaan produk peternakan, terutama daging dan telur ayam ras, dan susu. Kenaikan nilai PDB pada harga berlaku menunjukkan adanya peningkatan nilai ekonomi subsektor peternakan secara nominal, sedangkan pertumbuhan PDB pada harga konstan menggambarkan peningkatan volume produksi yang sesungguhnya setelah memperhitungkan inflasi.

Meski pada tahun 2020 sempat terjadi perlambatan akibat pandemi COVID-19 dan pada tahun 2022 terdapat dampak wabah Penyakit Mulut

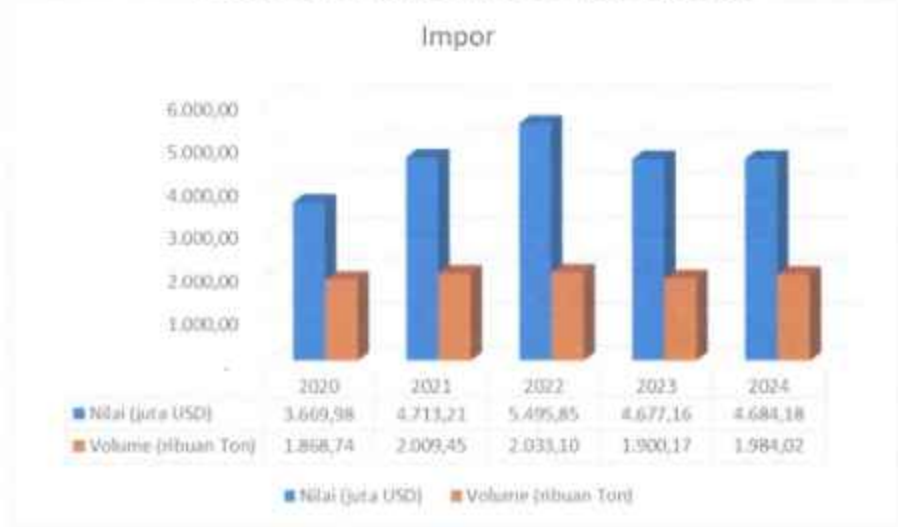
dan Kuku (PMK), subsektor peternakan tetap menunjukkan kemampuan untuk pulih dan tumbuh. Hal ini mencerminkan ketahanan sub sektor peternakan nasional serta efektivitas berbagai kebijakan dan program penguatan produksi, kesehatan hewan, serta pengembangan agribisnis peternakan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKH.

b. Ekspor Impor



Sumber: BPS 2024

Gambar 3. Nilai dan Volume Ekspor



Sumber: BPS 2024

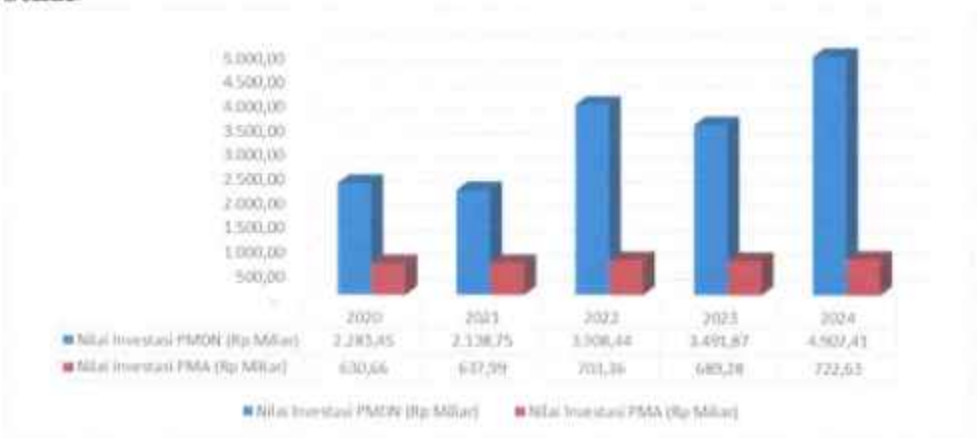
Gambar 4. Nilai dan Volume Impor

Kinerja perdagangan luar negeri produk peternakan dan kesehatan hewan selama periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif, baik pada ekspor maupun impor. Nilai ekspor produk peternakan meningkat dari sebesar USD 1,24 juta pada tahun 2020 menjadi USD 1,35 juta pada tahun 2024. Peningkatan ekspor ini mencerminkan adanya perbaikan nilai tambah dan daya saing produk peternakan nasional di pasar internasional, terutama untuk komoditas unggulan seperti sarang burung walet, daging olahan, dan produk kesehatan hewan.

Sementara itu, nilai impor produk peternakan masih jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor. Pada tahun 2020, nilai impor tercatat sebesar USD 3,67 juta dan meningkat hingga USD 5,50 juta pada tahun 2022 dan terjadi penurunan pada tahun 2024 sebesar USD 4,68 juta. Tingginya nilai impor ini terutama disebabkan oleh kebutuhan bahan baku pakan ternak, bahan baku industri produk susu, dan bahan farmasi veteriner.

Meskipun nilai dan volume ekspor impor produk peternakan masih mengalami defisit, tren peningkatan ekspor yang konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan adanya potensi penguatan subsektor peternakan nasional dalam mendukung ekspor nonmigas. Upaya Ditjen PKH dalam mendorong peningkatan ekspor melalui program Gratiexs (Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor) serta penguatan jaminan mutu dan keamanan produk hewan diharapkan dapat memperkecil defisit neraca perdagangan dan meningkatkan kontribusi subsektor peternakan terhadap perekonomian nasional.

c. Investasi



Sumber: BKPM, 2024

Gambar 5. Nilai Investasi Subsektor Peternakan

Investasi di subsektor peternakan menunjukkan perkembangan yang cukup positif selama periode 2020–2024. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan signifikan dari Rp2,28 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,90 triliun pada tahun 2024. Sementara itu, investasi Penanaman Modal Asing (PMA) juga menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, dari Rp630,66 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp722,63 miliar pada tahun 2024.

Peningkatan investasi tersebut mencerminkan meningkatnya minat investor terhadap subsektor peternakan nasional, terutama pada bidang budidaya unggas, pengolahan hasil peternakan, dan pakan ternak. Kinerja positif ini menunjukkan keberhasilan Ditjen PKH dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian berusaha, serta penguatan infrastruktur pendukung industri peternakan.

d. Penyerapan Tenaga Kerja



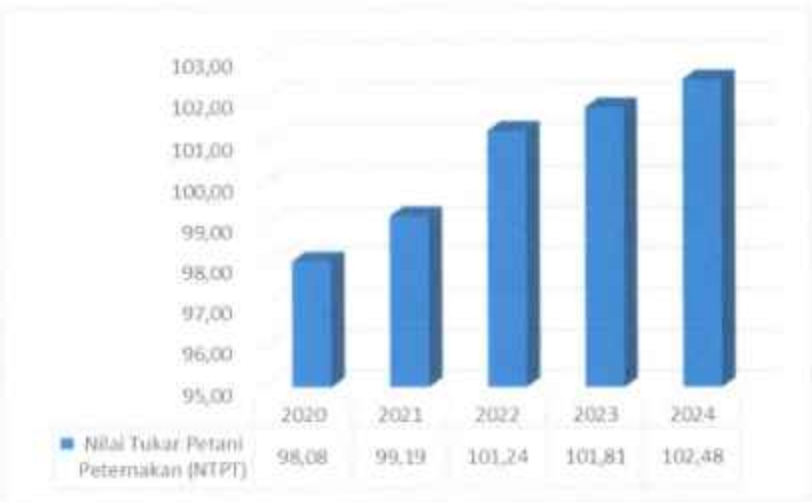
Sumber: Sakernas BPS, 2024

*) angka sementara

Gambar 6. Penyerapan Tenaga Kerja Peternakan

Jumlah tenaga kerja di subsektor peternakan menunjukkan tren yang relatif meningkat selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 4,59 juta orang bekerja di subsektor peternakan, dan jumlah tersebut meningkat menjadi 5,39 juta orang pada tahun 2024. Kenaikan jumlah tenaga kerja ini mencerminkan semakin besarnya peran subsektor peternakan dalam penyerapan lapangan kerja di sektor pertanian. Peningkatan signifikan pada tahun 2024 menunjukkan pulihnya kegiatan usaha peternakan pascapandemi COVID-19 dan wabah PMK tahun 2022, seiring dengan meningkatnya permintaan produk peternakan dan membaiknya iklim investasi di subsektor ini. Hal ini mengindikasikan bahwa subsektor peternakan tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam menyediakan lapangan kerja dan mendukung kesejahteraan masyarakat pedesaan.

e. NTP Peternakan



Sumber: Statistik Nilai Tukar Petani, BPS 2024

Gambar 7. NTP Peternakan

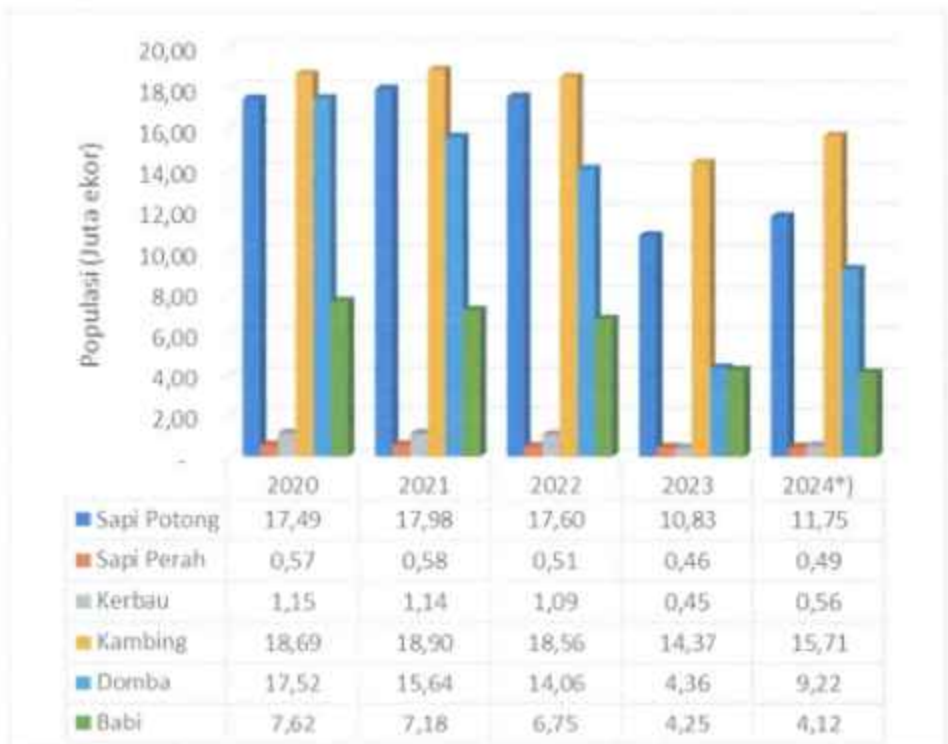
NTPT terus mengalami kenaikan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 NTPT tercatat sebesar 98,08 dan mengalami peningkatan paling

signifikan pada tahun 2022 yang mencerminkan adanya tren pemulihan dengan peningkatan bertahap hingga mencapai 102,48 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan membaiknya kesejahteraan peternak seiring dengan meningkatnya harga produk peternakan dan pulihnya aktivitas ekonomi di subsektor tersebut. Tren kenaikan NTPT ini juga menunjukkan perbaikan daya beli peternak serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong produktivitas subsektor peternakan.

1.1.2 Kinerja Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Renstra Ditjen PKH ini disusun dalam rangka mengoptimalkan kinerja fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi pilar penting dalam ketahanan pangan nasional, dengan fokus pada tujuh komoditas strategis yaitu sapi potong, kerbau, sapi perah, kambing, domba, ayam, dan babi. Berdasarkan kondisi terkini, populasi ternak menunjukkan dinamika yang beragam di mana populasi ayam ras pedaging dan petelur relatif stabil, sementara populasi ternak ruminansia masih dalam proses pemulihan pasca wabah PMK. Dari sisi produksi, tercatat produksi daging ayam dan telur telah mampu memenuhi kebutuhan domestik, namun produksi daging sapi dan susu masih memerlukan impor untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

a. Populasi



Sumber: Statistik Ditjen PKH, 2024 dan Sensus Pertanian (ST) 2023, BPS

*) angka sementara

Gambar 8. Perkembangan Populasi Komoditas Strategis Peternakan

Populasi sapi potong tertinggi selama periode 2020-2024 terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 17,98 juta ekor. Pada tahun 2023, terjadi penurunan populasi sapi potong yang disebabkan oleh terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang terutama pada ternak ruminansia. Sebagai upaya mengendalikan penyebaran PMK tersebut, pemerintah telah melakukan vaksinasi secara masif pada seluruh ternak

sapi potong yang tersebar di wilayah Indonesia. Pada tahun 2024, mulai terjadi penurunan kasus dengan terbentuknya kekebalan pada ternak pasca vaksinasi, sehingga secara perlahan kembali meningkatkan pertumbuhan populasi sapi potong di Indonesia. Peningkatan populasi ini juga didukung dengan kegiatan perbaikan manajemen budidaya ternak, kualitas pakan, pemberian obat dan vitamin, optimalisasi reproduksi serta mendorong peternak untuk terus melakukan pengendalian penyakit hewan menular melalui vaksinasi secara teratur.

Populasi sapi perah yang paling banyak dikembangkan di Indonesia adalah sapi rumpun *Friesian Holstein* (FH) yang dikenal memiliki produksi susu yang tinggi dan kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan. Tahun 2021 menjadi puncak populasi sapi perah tertinggi yaitu sekitar 582.169 ekor, kemudian pada tahun 2022-2023 terjadi penurunan populasi. Hal ini disebabkan sapi perah merupakan salah satu jenis ternak yang rentan terhadap PMK. Terjadinya wabah PMK tidak hanya menurunkan populasi, tetapi juga menurunkan produktivitas sapi perah.

Sebagaimana komoditas sapi potong, pada tahun 2024 komoditas sapi perah juga mulai mengalami peningkatan populasi karena adanya kekebalan pada ternak pasca vaksinasi serta didukung dengan kegiatan perbaikan kualitas pakan, pemberian obat dan vitamin, optimalisasi reproduksi, serta adanya penambahan indukan sapi perah melalui impor sehingga secara perlahan pertumbuhan populasi sapi perah mulai mengalami peningkatan.

Populasi kerbau pada tahun 2020-2022 berada di atas 1,1 juta ekor, kemudian menurun pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena semakin menurunnya minat petani dan peternak rakyat untuk memelihara kerbau. Selama ini, sebagian besar ternak kerbau tenaganya digunakan untuk membajak sawah, namun dengan kemajuan teknologi, saat ini pembajakan sawah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin pertanian. Dari sisi teknis budidaya, ternak kerbau ini memiliki keunikan tersendiri, yakni tingkat reproduksi kerbau yang rendah (tingkat kebuntingan sekitar 45%-55%, tingkat kelahiran sekitar 45%-50%, dan birahi sulit dideteksi), serta sistem manajemen yang belum optimal karena perkawinan kerbau sebagian besar terjadi secara alami dan tidak ada pengaturan pemanfaatan pejantan sehingga kemungkinan terjadinya *inbreeding* cukup besar.

Populasi kambing/domba merupakan ternak yang umum diusahakan di Indonesia, terutama wilayah Pulau Jawa. Populasi kambing pada tahun 2021 sekitar 18,69 juta ekor. Pada tahun 2022-2023, populasi kambing terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah pemotongan kambing terutama untuk kebutuhan qurban, sebagaimana data pemotongan ternak pada tahun 2022 sebanyak 756.099 ekor dan pada tahun 2023 jumlah pemotongan meningkat menjadi 819.118 ekor, tanpa diimbangi dengan laju penambahan populasi ternak kambing. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan populasi kambing hal ini disebabkan adanya dukungan program pemberdayaan peternak dan bantuan bibit kambing.

Populasi babi merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia karena berperan sebagai sumber protein hewani asal ternak,

penyumbang pendapatan ekonomi bagi peternak, dan memiliki nilai budaya yang signifikan di beberapa daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur.

Masih merebaknya penyakit *African Swine Fever* (ASF) di Indonesia sejak tahun 2019 menyebabkan kematian babi di sejumlah wilayah yang berdampak pada penurunan populasi babi di Indonesia. Populasi babi tahun 2020 sebanyak 7,62 juta ekor dan tahun 2024 sebanyak 4,12 juta ekor atau menurun sebesar 46,02% dengan rata-rata penurunan populasi sebesar 12,25% per tahun. Saat ini kondisi peternakan babi di Indonesia sedang masa pemulihan pasca ASF dengan perbaikan sistem peternakan babi di Indonesia antara lain melalui aturan ketat pada lalu lintas ternak, penguatan biosekuriti di peternakan babi, manajemen pemeliharaan melalui penerapan *Good Farming Practices* (GFP) maupun *Good Breeding Practices* (GBP), revitalisasi pusat pembibitan babi nasional BPTU-HPT Siborong-borong, pengembangan pembibitan babi melalui peran perusahaan swasta serta perbaikan mutu genetik babi melalui importasi bibit dan semen beku babi.

Populasi Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging. Ayam ras petelur merupakan ayam ras yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan telurnya dan ayam ras pedaging (broiler) merupakan ayam yang mempunyai kemampuan produksi daging sangat cepat sehingga saat ini banyak dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Ayam broiler berproduksi pada umur sekitar 4 – 5 minggu dengan bobot badan antara 1,2 – 1,9 kg/ekor dan ayam petelur berproduksi pada umur 19 minggu.



Sumber: Statistik Ditjen PKH, 2024

*) angka sementara

Gambar 9. Perkembangan Populasi Komoditas Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, dan Itik

Populasi ayam ras petelur dan ayam ras pedaging meningkat dari tahun 2020 – 2024. Populasi ayam ras petelur tertinggi tahun 2024 sekitar 414,76 juta ekor, sedangkan populasi ayam ras pedaging tertinggi tahun 2023 sekitar 3.189,38 juta ekor. Populasi ayam ras petelur dan ayam ras pedaging pada tahun 2021 dan 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan 2024. Hal ini disebabkan adanya pandemi *COVID-19* dimana terjadinya gangguan pada rantai pasok (*supply chain*), turunnya permintaan pasar, *over* produksi dan harga menurun, kesulitan modal dan biaya pakan naik, serta dengan adanya keterbatasan tenaga kerja karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Populasi itik mengalami peningkatan selama 3 tahun (2020-2022), namun mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 yang diakibatkan keterbatasan lahan angon untuk itik yang semakin terbatas dan rendahnya minat budidaya itik di peternak, namun pada tahun 2024 sudah mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan dengan melakukan budidaya itik dengan pola intensif. Secara umum, pada tahun 2023, populasi beberapa komoditas peternakan mengalami penurunan yang cukup tajam bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya wabah PMK.

b. Perbibitan dan Produksi Ternak

Bibit ternak mempunyai peranan yang sangat strategis dalam proses produksi ternak, sehingga dalam perkembangannya selain kuantitas juga diperlukan kualitas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 yang mengatur tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak Nasional menyatakan bahwa perbibitan nasional mencakup penyediaan benih dan bibit ternak, peredaran benih dan bibit ternak, pengawasan benih dan bibit ternak, dan/atau kelembagaan perbibitan. Penyediaan benih dan bibit ternak melalui pengadaan di dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri. Pengadaan di dalam negeri difokuskan melalui produksi, penetapan wilayah sumber bibit dan penetapan/ pelepasan rumpun atau galur ternak. Produksi benih dan/atau bibit dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat, sedangkan produksi bibit ayam ras sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat/swasta. Produksi benih dan/atau bibit pemerintah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbibitan sebanyak tiga unit produksi benih ternak dan tujuh unit produksi bibit ternak yang berlokasi di beberapa provinsi. Produksi benih dan bibit dari UPT Perbibitan Ditjen PKH selama empat tahun, sebagai berikut:

Tabel 1. Produksi Benih dan Bibit UPT Perbibitan

No	Produksi	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Benih (Dosis)	6.228.021	6.045.675	7.805.857	6.718.929
2	Bibit (Ekor)	1.166.807*	1.358.411*	1.296.274*	587.474**

Sumber: Statistik Ditjen PKH 2024

Catatan:

* produksi bibit tahun 2021 - 2023 merupakan kelahiran calon bibit

** produksi bibit tahun 2024 merupakan ternak terseleksi sesuai SNI dan/atau bersertifikasi

Penyediaan bibit oleh masyarakat dilakukan di wilayah sumber bibit. Penetapan wilayah sumber bibit dilakukan oleh Menteri Pertanian. Pada tahun 2015 - 2019, telah ditetapkan 21 wilayah sumber bibit sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. Wilayah Sumber Bibit Ternak Tahun 2015 - 2019

NO	PROVINSI	KABUPATEN	TAHUN	KOMODITAS
1	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	2019	Sandelwood
2	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	2019	Sumba Ongole
3	Sumatera Utara	Samosir	2019	Panorusan Samosir
4	Jawa Tengah	Kebumen	2015	Sapi PO
5	DIY	Gunung Kidul	2015	Sapi PO
6	Sulawesi Utara	Minahasa	2018	Sapi PO
7	Jawa Barat	Garut	2017	Domba Garut
8	Jawa Timur	Pamekasan	2017	Sapi Madura
9	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	2017	Sapi Bali
10	Jawa Tengah	Purworejo	2016	Kambing Kaligesing
11	Jawa Tengah	Brebes	2016	Sapi Jabres
12	Bali	Klungkung	2016	Sapi Bali
13	Jawa Tengah	Banjarnegara	2015	Domba Batur
14	Jawa Tengah	Banyumas	2015	Kambing PE
15	Kalimantan Selatan	Barito Kuala	2015	Sapi Bali
16	Jawa Timur	Bojonegoro	2015	Sapi PO
17	Lampung	Lampung Selatan	2015	Sapi PO
18	Jawa Tengah	Rembang	2017	Sapi PO
19	Bali	Buleleng	2017	Sapi Bali
20	Jawa Timur	Lumajang	2016	Kambing Senduro
21	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	2016	Sapi Bali

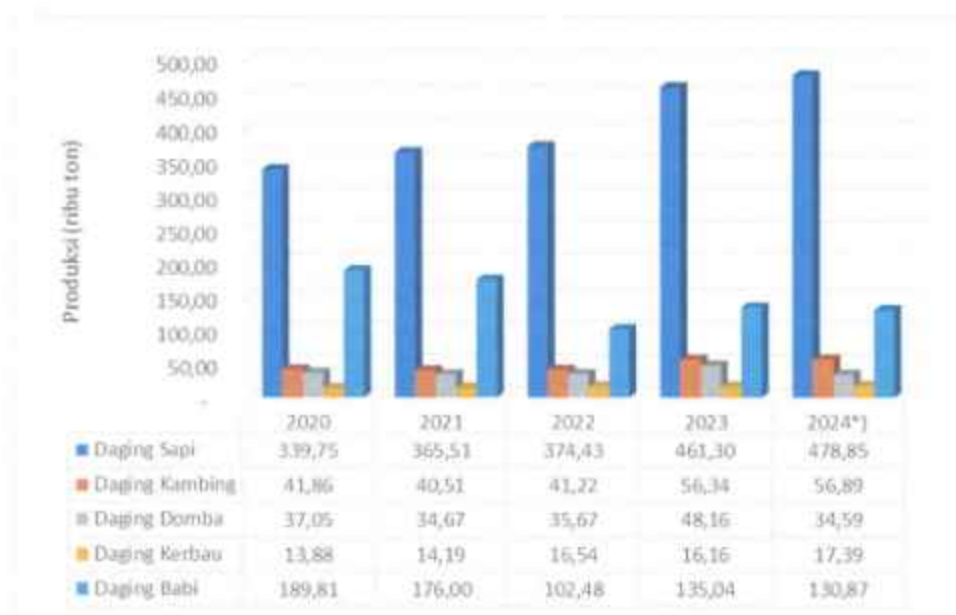
Sumber: Statistik Ditjen PKH 2024

Setelah tahun 2019, tidak ada penetapan wilayah sumber bibit dikarenakan antara lain tidak adanya pengajuan penetapan wilayah sumber bibit dari daerah dan terjadinya wabah PMK pada tahun 2022. Indonesia kaya akan sumber daya genetik hewan yang mempunyai potensi sebagai sumber bibit ternak, dalam rangka perlindungan dan menjaga kelestarian serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya genetik secara berkelanjutan, maka dilakukan penetapan dan pelepasan rumpun atau galur ternak sebanyak 107 rumpun/galur (tahun 2010 - 2024).

Sedangkan pemasukan benih dan bibit dari luar negeri untuk tujuan antara lain meningkatkan mutu dan keragaman genetik dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan kepada peternak terhadap benih atau bibit yang beredar, maka diperlukan sertifikasi cara produksi dan produknya. Sertifikasi cara produksi dilakukan dengan penilaian kesesuaian pedoman pembibitan ternak yang baik dan pedoman budidaya ternak yang baik oleh Ditjen PKH atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di provinsi/kabupaten/kota. Sedangkan, sertifikasi produk benih dan/atau bibit dilakukan penilaian oleh lembaga sertifikasi produk (Ls Pro) yang terakreditasi atau ditunjuk Menteri Pertanian.

Penyediaan benih dan bibit ternak unggul diharapkan dapat mendukung usaha budidaya ternak dalam meningkatkan produksi daging, susu dan telur. Berdasarkan data Ditjen PKH, produksi daging, telur, dan susu nasional pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Sumber: Statistik Ditjen PKH, 2024

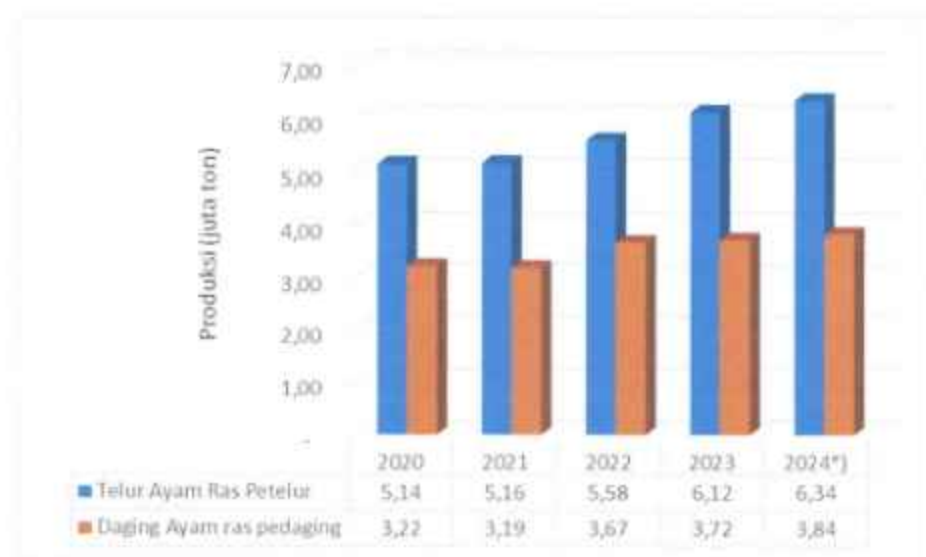
*) angka sementara

Gambar 10. Produksi Daging

Produksi daging sapi, kerbau, kambing, domba dan babi selama periode 2020 hingga 2024 cenderung stabil dan tidak mengalami dinamika yang terlalu signifikan dan peningkatan produksi terjadi pada daging sapi tahun 2020-2024. Produksi daging sapi tertinggi terjadi pada tahun 2024 dan produksi terendah terjadi pada tahun 2020. Meningkatnya produksi dan produktivitas sapi tersebut antara lain melalui optimasi pemberian pakan berkualitas (termasuk kombinasi hijauan dan konsentrat) serta pengendalian terhadap penyakit hewan menular.

Total produksi daging kerbau, kambing, dan domba tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan total produksi terendah terjadi pada tahun 2021. Penurunan produksi daging kerbau, kambing, dan domba tersebut umumnya disebabkan selain turunnya populasi ternak akibat dari penyakit PMK, juga terjadi penurunan permintaan terhadap daging akibat adanya pandemi *COVID-19*.

Pada tahun 2020-2024, rata-rata produksi daging babi mengalami fluktuasi. Produksi daging babi tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan produksi terendah terjadi pada tahun 2022. Penurunan daging babi disebabkan merebaknya wabah ASF di sentra produksi daging babi di Indonesia.



Sumber: Statistik Ditjen PKH, 2024

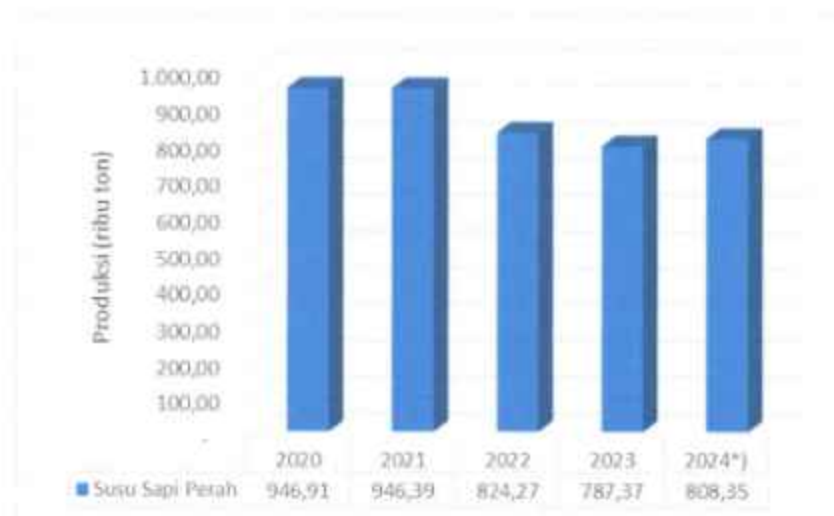
*) angka sementara

Gambar 11. Perkembangan Produksi Telur Ayam Ras Petelur dan Daging Ayam Ras Pedaging

Produksi daging ayam ras pedaging secara umum menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Pada tahun 2020, produksi tercatat sebesar 3,22 juta ton, kemudian turun sekitar 1,04% menjadi 3,19 juta ton pada tahun 2021 yang disebabkan oleh dampak pandemi *COVID-19*, yang menyebabkan turunnya permintaan daging ayam akibat pembatasan aktivitas masyarakat serta terganggunya rantai pasok.

Mulai tahun 2022, produksi kembali meningkat seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat, naik sebesar 15,17% menjadi 3,67 juta ton. Kenaikan berlanjut pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 1,44% menjadi 3,72 juta ton dan kembali meningkat 3,07% pada tahun 2024 mencapai 3,84 juta ton.

Produksi telur ayam ras petelur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, produksi tercatat sebesar 5,14 juta ton, kemudian mengalami kenaikan sebesar 0,39% menjadi 5,16 juta ton pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang lebih signifikan sebesar 8,21% hingga mencapai 5,58 juta ton. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, dengan produksi naik sebesar 9,62% menjadi 6,12 juta ton. Untuk tahun 2024, produksi diproyeksikan meningkat lagi sebesar 3,71% menjadi 6,34 juta ton. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, produksi telur ayam ras petelur meningkat sekitar 23,36%, yang menunjukkan peningkatan kapasitas produksi dan tingginya permintaan terhadap komoditas telur di Indonesia seiring dengan pertumbuhan penduduk.



Sumber: Statistik Ditjen PKH, 2024

*) angka sementara

Gambar 12. Produksi Susu

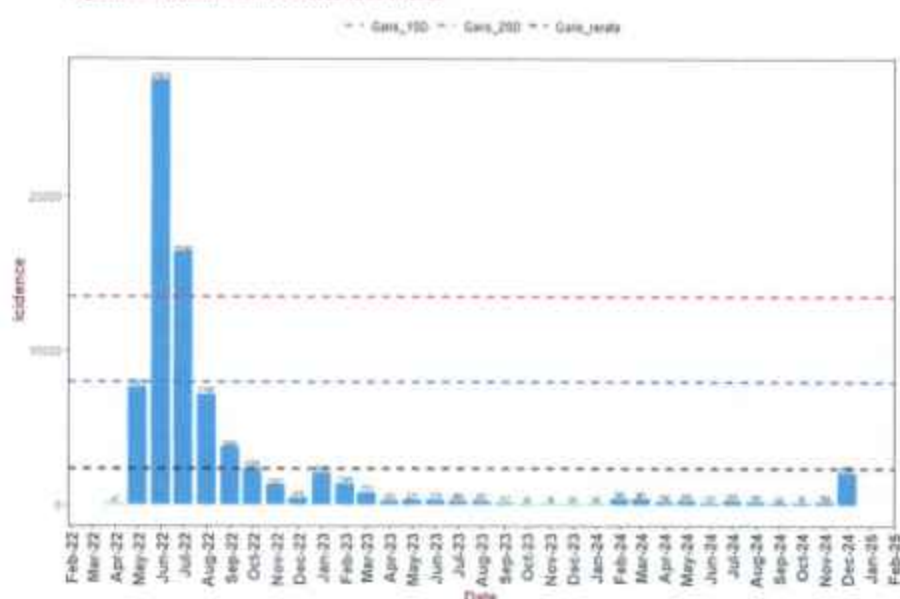
Produksi susu. Selain menghasilkan produksi daging, ternak ruminansia juga memproduksi susu untuk memenuhi kebutuhan protein asal ternak, sebagai bahan makanan penambah nutrisi. Pemenuhan kebutuhan susu di Indonesia saat ini sebagian besar masih mengandalkan impor. Produksi susu pada kurun waktu 2020-2023 mengalami penurunan dan paling signifikan terjadi pada tahun 2022 turun menjadi 824.273 ton dari produksi di tahun 2021 sebesar 946.390 ton atau berkurang sekitar 12,95%, dan tahun 2023 produksi susu turun menjadi 787.374 ton atau sebesar 4,48%. Pada tahun 2024 produksi susu meningkat menjadi 808.353 ton atau sebesar 2,66%. Fluktuasi produksi susu disebabkan oleh penurunan populasi sapi perah dan sapi perah betina produktif yang menyebabkan produktivitas menurun hampir mencapai 30% sebagai dampak dari PMK, serta harga jual susu yang rendah mengakibatkan menurunnya minat peternak memelihara sapi perah.

c. Kesehatan hewan

Dalam melaksanakan program/kegiatan Pembangunan Kesehatan Hewan tahun 2020-2024, indikator keberhasilan capaian program/kegiatan berupa persentase wilayah yang terkendali dari PHMS. Persentase wilayah yang terkendali PHMS merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di 34 provinsi yang dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMS. Kebijakan dalam program pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular dilakukan secara bertahap dan diprioritaskan pada penyakit hewan yang berdampak kerugian ekonomi luas/tinggi, menyebar cepat, serta memiliki angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi atau berpotensi mengancam kesehatan masyarakat, khususnya lebih difokuskan pada penyakit Rabies, Anthrax, *Brucellosis*, *Avian Influenza* (AI), dan *Hog Cholera* atau yang sering dikenal dengan RABAH. Pada kurun waktu 2022-2024, terdapat isu strategis dengan munculnya penyakit eksotik dan *emerging infectious disease* (*new emerging infectious disease* dan *re-emerging infectious disease*) salah satunya adalah PMK. Setelah Indonesia dinyatakan bebas PMK pada tahun 1986 dan diakui *World Organization for Animal Health* (WOAH) sebagai negara bebas PMK tanpa vaksinasi pada tahun 1990, PMK kembali muncul di Indonesia pada tahun 2022. Pada tanggal 9 Mei 2022, Kementerian Pertanian

mengeluarkan dua surat edaran tentang penetapan daerah wabah PMK. Pertama, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403 Tahun 2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kedua, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404 Tahun 2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh. Perkembangan kasus dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan secara signifikan, salah satunya karena pengendalian yang dilaksanakan melalui vaksinasi PMK berhasil meningkatkan kekebalan ternak. Data perkembangan kasus PMK dapat dilihat pada grafik berikut:

Kasus PMK Bulanan dari 01-04-2022 sd 11-11-2025



Sumber: ISIKHNAS, 2025

Gambar 13. Perkembangan Kasus PMK Tahun 2022-2024 di Indonesia

Selain PMK, pada tahun 2022 muncul juga wabah penyakit berbenjol (*Lumpy Skin Disease*) melalui Kepmentan Nomor 242/Kpts/PK.320/M/3/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Kulit Berbenjol di Provinsi Riau dan juga Penyakit ASF yang pertama kali muncul tahun 2019 di Indonesia, sehingga ketiga penyakit eksotik tersebut masuk sebagai penyakit prioritas pengendalian.

Pengendalian PHMS di Indonesia dilakukan melalui pelaksanaan vaksinasi, pengobatan, penerapan *biosecurity* dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pada masyarakat. Upaya pengendalian pada kurun waktu 2022-2024 mampu mempertahankan status kesehatan hewan secara nasional melalui pencapaian indikator sasaran program dengan capaian sebesar 100,15%.

d. Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

Kesmavet merupakan segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan). Sedangkan, Kesejahteraan Hewan merupakan segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang

tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan).

Peningkatan kesmavet merupakan salah satu arah strategis yang dilakukan Kementerian Pertanian sebagai bentuk kontribusi Kementerian Pertanian terhadap Kesehatan Masyarakat Indonesia, khususnya dari dampak *zoonosis* dan penyimpangan produk hewan bagi kesehatan manusia.

Zoonosis atau penyakit hewan yang menular kepada manusia menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya dari penyakit hewan. Saat ini jumlah *zoonosis* di dunia lebih dari 200 jenis. Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (*World Organisation for Animal Health*) menyatakan sebanyak 60% penyakit infeksius pada manusia berasal dari hewan dan 75% penyakit infeksius baru (*emerging infectious disease*) pada manusia berasal dari hewan. Beberapa penyakit baru tersebut menimbulkan wabah dan pandemi dan salah satunya adalah COVID-19. Terdapat beberapa penyakit hewan menular kepada manusia yang perlu menjadi perhatian bersama, karena berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Beberapa *zoonosis* tersebut diantaranya adalah *Rabies*, *Antraks*, *Leptospirosis*, *Brucellosis* dan lain lain. Saat ini sebanyak 26 provinsi tertular *rabies*. Menurut Kementerian Kesehatan (2025) pada periode Januari sampai dengan 2 September 2025 ada sebanyak 130.315 kasus Gigitan Hewan Penular *Rabies* (GHPR) dan menyebabkan kematian sebanyak 118 orang. Kasus kematian tertinggi terjadi di NTT dengan jumlah kasus kematian sebanyak 25. Kesadaran masyarakat terhadap penyakit hewan menjadi penting untuk dibangun dalam mengantisipasi penularan penyakit hewan kepada manusia yang dapat berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat. Selain *Zoonosis*, penyimpangan produk hewan juga dapat memengaruhi kesehatan masyarakat.

Produk hewan merupakan sumber protein hewani yang kaya akan asam amino esensial yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan optimal, kecerdasan dan kesehatan masyarakat. Meskipun produk hewan memiliki nilai dan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan manusia, produk hewan merupakan bahan yang mudah rusak (*perishable*) dan memiliki potensi bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan (*potential hazardous*) karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi, dan biologis sehingga dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta mengganggu ketenteraman batin masyarakat termasuk kehalalan. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan penjaminan terhadap keamanan produk hewan bagi Masyarakat. Keamanan produk hewan juga menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan daya saing produk dan akselerasi ekspor.

Kesejahteraan Hewan menjadi isu global karena merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh rantai produksi dan pemeliharaan hewan terkait kesehatan, produktivitas, serta keamanan dan mutu pangan asal hewan. Penerapan *kesrawan* juga berperan dalam mencegah timbulnya penyakit, mengurangi risiko penularan *zoonosis*, serta mendukung strategi *One Health* yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Dari sisi ekonomi, kondisi pemeliharaan yang baik

menurunkan angka kematian, mengurangi biaya pengobatan, dan meningkatkan efisiensi usaha peternakan. Selain itu, kesrawan telah menjadi tuntutan regulasi nasional dan standar perdagangan internasional, sehingga pemenuhannya menjadi kunci untuk memastikan mutu produk hewan, menjaga akses pasar ekspor, dan memenuhi tanggung jawab etis terhadap hewan. Dengan demikian, penerapan kesrawan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan strategis bagi kesehatan masyarakat, keberlanjutan usaha, dan ketahanan pangan nasional.

e. Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pakan merupakan faktor produksi yang dominan dalam budidaya peternakan. Kekurangan pakan akan mengakibatkan kurangnya asupan energi, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan ternak. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan yang melambat, bobot badan yang tidak ideal (kurus), gangguan metabolisme dan penurunan daya tahan tubuh/kekebalan terhadap penyakit, serta fertilitas yang menurun. Peningkatan konsumsi protein hewani, terutama produk ruminansia dan unggas, menjadi pendorong utama lonjakan permintaan pakan, mulai dari hijauan berkualitas tinggi dan pakan olahan berprotein seimbang. Peningkatan kebutuhan pakan seiring dengan peningkatan kebutuhan protein hewani, perlu dipastikan ketersediaan pakan dalam jumlah yang cukup dan berkualitas. Peningkatan kemampuan dan kapabilitas petani dan peternak perlu untuk menghasilkan pakan hijauan dan olahan yang sesuai untuk ternak dikembangkan. Penerapan teknologi formulasi nutrisi yang lebih efisien, serta menjalin kemitraan strategis dengan peternak skala kecil dan besar di aspek pakan dapat memperkuat rantai pasok peternakan, menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk domestik di pasar regional maupun global.

Dari hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 oleh BPS di tingkat usaha peternakan perorangan, pakan dalam usaha peternakan ruminansia menjadi komponen biaya produksi terbesar. Komponen pakan berkontribusi sebesar 47,79% pada budidaya sapi potong, sebesar 79,98% pada sapi perah, sebesar 26,94% pada budidaya kerbau, sebesar 37,33% pada budidaya kambing dan 55,77% pada budidaya domba. Untuk budidaya unggas komponen pakan berkontribusi sebesar 79,57% pada budidaya itik petelur dan 64,66% pada budidaya ayam ras pedaging. Untuk budidaya ternak monogastrik, komponen pakan berkontribusi sebesar 72,75% pada budidaya babi (Tabel 3).

Tabel 3. Komponen Biaya Produksi dari Masing-Masing Komoditas Peternakan Tahun 2024

Komponen Biaya Produksi	Biaya Produksi (%)							
	Sapi Potong	Sapi Perah	Kerbau Potong	Babi	Kambing Potong	Domba Potong	Itik Petelur	Ayam Ras Pedaging
Pakan	47,79	79,98	26,94	72,75	37,33	55,75	79,57	64,66
Pemeliharaan Kesehatan	5,00	1,36	9,35	1,71	3,27	2,83	2,04	2,07
Upah Pekerja	9,90	8,16	21,94	3,07	11,14	14,79	6,46	3,11
Bahan Bakar dan Pelumas	15,07	3,71	11,08	1,17	21,34	9,95	2,96	0,79
Listrik dan Air	1,98	0,79	0,76	1,17	2,31	1,16	1,75	1,67

Lahan	11,97	2,59	17,43	11,4 4	16,56	8,65	3,79	0,95
Jasa Pternakan	2,07	0,29	1,33	0,73	0,62	0,29	0,98	0,06
Pembelian DOC	-	-	-	-	-	-	-	25,38
Pengeluaran Lainnya	6,22	3,13	11,18	7,95	7,54	6,58	2,45	1,31
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 Subsektor Peternakan. BPS

Selain ketersediaan pakan, mutu dari pakan juga harus menjadi perhatian. Pakan yang tidak bermutu akan menyebabkan penurunan produktivitas ternak. Selain itu, akan menurunkan kualitas produk ternak, contohnya: susu akan memiliki kandungan lemak dan protein yang rendah, telur akan berukuran kecil dan memiliki cangkang yang tipis, serta mutu daging yang kurang bergizi.

Sumber pakan ternak di Indonesia sangat beragam dan dipengaruhi oleh faktor geografis, iklim, serta jenis ternak yang dipelihara. Secara umum, sumber pakan ternak dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu: pakan hijauan dan pakan olahan. Pakan hijauan merupakan sumber pakan utama bagi ternak ruminansia seperti sapi, kambing, dan domba. Pakan hijauan kaya akan serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh ternak untuk pertumbuhan dan produksi. Pengembangan pakan hijauan dimulai dari introduksi dan pengembangan benih tanaman pakan. Benih tanaman pakan ternak merupakan dasar untuk menghasilkan hijauan pakan ternak berkualitas, yang merupakan sumber pakan utama ruminansia. Benih yang baik dengan didukung budidaya yang baik akan memastikan pertumbuhan hijauan pakan yang optimal, menghasilkan hijauan dengan kandungan nutrisi optimal untuk mendukung produktivitas ternak.

Pakan olahan adalah pakan yang telah mengalami proses fisik, kimia atau biologi baik tunggal maupun campuran, seperti silase untuk ternak ruminansia dan pakan jadi/pakan komplit untuk unggas.

Sumber pakan ternak di Indonesia umumnya berasal dari tanaman pertanian, seperti jagung, kedelai, dan rumput-rumputan. Hal ini menyebabkan ketersediaan pakan sangat tergantung dengan faktor musim, terutama pakan hijauan. Ketersediaan pakan akan melimpah pada musim hujan dan akan menjadi terbatas pada musim kemarau (akibat kekurangan air).

Oleh sebab itu, ketergantungan pada bahan pakan impor masih tinggi, terutama untuk sumber protein. Ketersediaan pakan ternak, terutama jagung sebagai komponen utama pakan unggas, sangat dipengaruhi oleh produksi dalam negeri dan impor.

Menurut BPS, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% pada 2024 diperkirakan sebesar 15,14 juta ton, mengalami peningkatan sebanyak 0,36 juta ton atau 2,47% dibandingkan pada tahun 2023 yang sebesar 14,77 juta ton. Adapun Luas panen jagung pipilan pada 2024

diperkirakan sebesar 2,55 juta hektare, mengalami peningkatan sebanyak ribu hektare atau 2,69% dibandingkan luas panen pada 2023 yang sebesar 2,48 juta hektare. Namun, walaupun terjadi peningkatan luas panen dan produksi, terjadi penurunan pada produktivitas jagung. Pada tahun 2023 produktivitas jagung nasional dengan kadar air 14% sebesar 5,96 ton/ha, turun sebesar 4,52% pada tahun 2024 menjadi 5,94 ton/ha, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: BPS 2024
Gambar 14. Luas panen dan produksi jagung nasional

f. Pengolahan dan Distribusi Produk Peternakan

Hilirisasi di sektor pertanian termasuk subsektor peternakan tidak hanya dimaknai sebagai upaya peningkatan nilai tambah produk primer, tetapi juga sebagai langkah transformasi struktural menuju pertanian yang modern, berbasis industri, dan berdaya saing global. Pascapanen dan kebijakan hilirisasi nasional menekankan pentingnya pengembangan industri berbasis sumber daya domestik yang berkelanjutan, penguatan keterkaitan antar hulu hilir, serta peningkatan ekspor berbasis produk olahan. Untuk itu, pascapanen, pengolahan dan distribusi produk peternakan menjadi subsistem bisnis peternakan yang sangat penting. Pengolahan dan distribusi produk peternakan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap produk pangan hewani seperti daging, susu, telur, serta berbagai produk olahannya.



Gambar 15. Neraca Komoditas Peternakan Tahun, 2024

Neraca komoditas peternakan untuk daging dan telur ayam ras mengalami surplus pada tahun 2024. Sedangkan untuk daging sapi dan susu masih mengalami defisit. Daging sapi defisit 0,4 juta ton atau 52% dari kebutuhan nasional, dan susu defisit 3,7 juta ton atau 79% dari kebutuhan nasional. Defisit ini dipenuhi utamanya dari impor bakalan, daging, susu bubuk dan krim susu.

Berdasarkan data BPS, pengeluaran riil perkapita/bulan untuk daging mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8%/tahun selama periode 2020-2024, begitu juga untuk telur dan susu meningkat rata-rata sebesar 1,6%/tahun selama periode yang sama. Begitu juga untuk produk olahan peternakan mengalami peningkatan, hal ini diindikasikan dengan peningkatan pengeluaran riil untuk makanan dan minuman jadi termasuk produk olahan peternakan rata-rata sebesar 1,6%/tahun. Pengeluaran riil merupakan pengeluaran yang telah disesuaikan dengan tingkat harga (inflasi), sehingga peningkatan ini mencerminkan daya beli masyarakat yang sebenarnya, dan merujuk pada biaya yang dikeluarkan. Peningkatan konsumsi produk peternakan tersebut menuntut penanganan pascapanen, pengolahan dan sistem distribusi produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing. Penanganan pascapanen dan pengolahan hasil peternakan memegang peranan penting dalam menjaga mutu, keamanan pangan, daya simpan dan keberterimaan produk peternakan di pasar. Sistem distribusi dikembangkan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan (harga dan daya beli) pada wilayah non sentra produksi dan wilayah yang membutuhkan, serta menjamin mutu dan keamanan pangan dari produsen hingga ke konsumen.

Salah satu faktor kunci dalam pengembangan pascapanen, pengolahan dan distribusi adalah modernisasi rantai pasok. Banyak perusahaan peternakan besar dan menengah telah mengadopsi teknologi *cold chain* (rantai dingin) untuk menjaga kualitas produk, terutama daging dan susu, selama proses distribusi. Sistem logistik berbasis digital juga semakin banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan ketertelusuran (*traceability*). Namun, tantangan masih ada, terutama dalam mendistribusikan produk ke daerah-daerah terpencil dengan infrastruktur yang belum memadai. Pemerintah dan swasta berupaya mengatasi hal ini melalui program pembangunan gudang berpendingin dan fasilitasi transportasi berpendingin, dan kerja sama dengan UMKM lokal.

Di bidang persusuan, meskipun produksi susu segar dalam negeri belum mencukupi permintaan, industri pengolahan susu lokal terus

berkembang. Produk olahan susu seperti yoghurt, keju, susu pasteurisasi, susu sterilisasi dan susu UHT semakin populer di pasar domestik. Indonesia masih mengimpor susu dalam jumlah besar, tetapi upaya untuk meningkatkan produksi lokal terus dilakukan, termasuk melalui peningkatan kualitas dan produktivitas peternakan sapi perah serta pengembangan unit usaha pengolahan susu.

Regulasi dan standar mutu juga menjadi fokus penting dalam industri peternakan. Regulasi dan deregulasi serta penyusunan standar dilaksanakan berkolaborasi dengan kementerian/ lembaga terkait utamanya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Otoritas Kompeten Organik, Lembaga Sertifikasi Organik, dan Kementerian Kesehatan. Ditjen PKH juga aktif melakukan pembinaan dan pendampingan bagi tatacara produksi pangan yang baik, serta penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan. Pengawasan terhadap unit usaha dan produk peternakan untuk penjaminan mutu dan keamanan pangan dilakukan bersama-sama BPOM, Satgas Pangan dan Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di daerah. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sertifikasi halal menjadi prioritas untuk memastikan penjaminan produk halal bagi konsumen.

Peran teknologi digital juga semakin penting dalam distribusi produk peternakan. *Platform ecommerce* dan digitalisasi logistik sudah banyak dikembangkan, dan dapat menyiapkan informasi bagi perencanaan produksi. Hal ini juga mendorong, pemanfaatan teknologi seperti *Internet of Things (IoT)* untuk memantau kesehatan hewan dan meningkatkan produktivitas atau *smart farm*. Pengolahan dan sistem distribusi yang baik, serta akses pasar yang meningkat diharapkan dapat meningkatkan produksi budidaya peternakan dan menumbuhkan usaha baru baik budidaya maupun pasca panen dan pengolahan. Untuk itu, diperlukan kemudahan perizinan berusaha, akses pembiayaan usaha, dan insentif investasi usaha peternakan.

Berdasarkan sistem informasi unit pengolahan hasil peternakan (SiUPIN), pada tahun 2024 jumlah UMKM pengolahan daging sapi sebanyak 805 unit, daging dan telur unggas dan aneka ternak sebanyak 604 unit, susu sebanyak 401 unit, hasil ikutan ternak sebanyak 256 unit, dan pengolahan limbah sebanyak 361 unit.

1.2 Capaian Renstra Ditjen PKH

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Ditjen PKH periode 2020-2024, penting untuk mengidentifikasi capaian yang telah diraih dalam lima tahun terakhir. Analisis capaian ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan, program, serta kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan strategis yang lebih adaptif, kolaboratif dan responsif dalam Renstra Ditjen PKH periode 2025-2029, guna memastikan keberlanjutan dan peningkatan kinerja subsektor peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. Analisis capaian Ditjen PKH dilakukan terhadap capaian dari Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Renstra periode 2020-2024.

Tabel 4. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PKH
Tahun 2020-2024

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	Satuan	Periode
SP 1	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	1 Peningkatan Produksi Daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	%	2020-2024
		2 Peningkatan Produksi Susu	%	
		3 Peningkatan Produksi Telur	%	
SP 2	Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	4 Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan	%	2020-2024
SP 3	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali kasus zoonosis	5 Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis	%	2020-2024
SP 4	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	6 Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	2020-2024
SP 5	Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan	7 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	2020-2024
SP 6	Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian	8 Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	%	2020-2024
SP 7	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	9 Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	2020-2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Periode
SP 8	Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	10 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai 2020-2023
SP 9	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	11 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai 2020-2023

Berikut adalah penjelasan dari masing masing capaian dari masing masing Sasaran Program Ditjen PKH:

Sasaran Program 1: Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak
 Sasaran Program meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sasaran program yaitu (1) peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik); (2) peningkatan produksi susu dan (3) peningkatan produksi telur.



Sumber: Laporan Kinerja Ditjen PKH Tahun 2024

Gambar 16. Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Program Meningkatnya Ketersediaan Pangan Asal Ternak

Berdasarkan data di atas tingkat keberhasilan capaian indikator kinerja untuk SP meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda antara peningkatan produksi daging, peningkatan produksi susu dan peningkatan produksi daging. Berdasarkan data capaian produksi utama komoditas peternakan selama periode 2020–2024, terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan antar komoditas, terutama pada produksi daging, susu, dan telur.

Pada produksi daging, capaian menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian produksi masih relatif

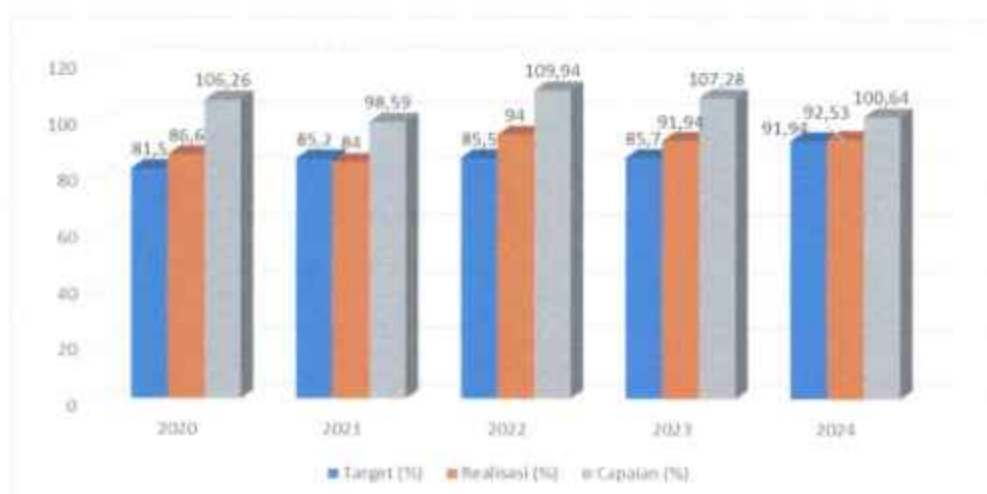
rendah, namun pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 120% dari target yang ditetapkan, yang menunjukkan hasil positif dari berbagai program peningkatan produktivitas ternak potong. Namun demikian, pada tahun 2023 capaian produksi mengalami penurunan tajam menjadi 42,55%, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 mencapai 97,9%. Penurunan kinerja ini salah satunya disebabkan oleh dampak wabah PMK yang merebak pada pertengahan tahun 2022 dan berlanjut hingga 2023, yang menyebabkan terganggunya aktivitas pemeliharaan, distribusi ternak, serta menurunnya tingkat pemotongan dan produktivitas ternak ruminansia. Upaya pemulihan melalui program vaksinasi massal, pengawasan lalu lintas hewan, serta peningkatan biosekuriti di tingkat peternak mulai menunjukkan hasil pada tahun 2024. Kinerja pada produksi susu pada tahun 2020 tercatat sebesar 10% dari target yang ditetapkan, sementara pada tahun-tahun berikutnya (2021–2024) juga belum menunjukkan peningkatan signifikan. Selain faktor struktural seperti rendahnya produktivitas sapi perah, keterbatasan populasi dan infrastruktur rantai dingin yang belum optimal, wabah PMK tahun 2022 juga berdampak langsung pada penurunan produksi susu nasional. Banyak sapi perah terdampak mengalami penurunan produksi laktasi bahkan kematian, yang mengakibatkan gangguan pada pasokan susu segar dalam negeri.

Berbeda dengan dua komoditas tersebut, produksi telur menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan tinggi sepanjang periode 2020–2024. Capaian pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing mencapai 120% dan 14,88%, kemudian meningkat dan stabil pada kisaran 117–120% pada tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor unggas, khususnya ayam ras petelur, memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap gangguan eksternal seperti wabah penyakit dan fluktuasi pasar, sehingga mampu menjadi tulang punggung ketersediaan pangan asal ternak nasional.

Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa subsektor peternakan nasional masih menghadapi ketimpangan antar komoditas. Komoditas unggas (telur) menunjukkan kinerja yang sangat baik dan stabil, sementara komoditas ruminansia besar seperti sapi potong dan sapi perah masih perlu mendapatkan perhatian lebih. Ke depan, strategi pembangunan peternakan perlu diarahkan pada peningkatan ketahanan sistem kesehatan hewan, penguatan pengendalian penyakit strategis seperti PMK, peningkatan produktivitas ternak lokal, serta dukungan pembiayaan dan teknologi untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan produksi pangan asal ternak dalam negeri.

Sasaran Program 2: Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan

Sasaran Program meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan diukur dengan indikator Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan. Sasaran program ini bertujuan untuk memastikan bahwa pangan asal hewan yang beredar di masyarakat, seperti daging, telur, dan susu, memenuhi standar keamanan dan mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sumber: Laporan Kinerja Ditjen PKH Tahun 2024

Gambar 17. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2020-2024

Grafik di atas menunjukkan persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan dari tahun 2020 hingga 2024, dengan perbandingan antara target dan realisasi setiap tahunnya.

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020–2024, indikator persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan menunjukkan tren yang positif dan stabil di atas target yang ditetapkan setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan keberhasilan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam meningkatkan pengawasan, pembinaan, serta penerapan sistem jaminan keamanan pangan pada unit usaha pangan segar asal hewan.

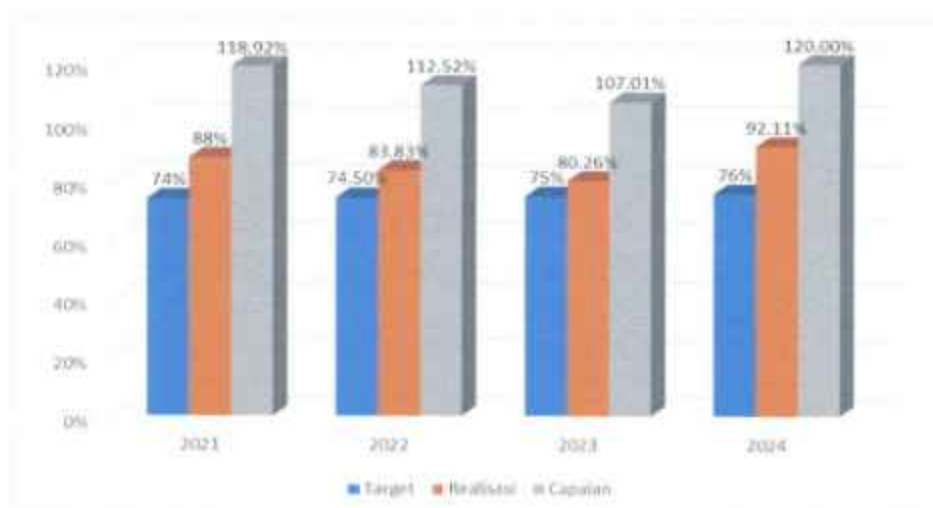
Konsistensi capaian di atas 100% terhadap target selama periode 2020–2024 menjadi bukti bahwa sistem pengawasan keamanan pangan asal hewan telah berjalan baik dan semakin adaptif terhadap berbagai tantangan, termasuk perubahan pola konsumsi dan dinamika perdagangan pangan segar.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa sasaran program *“Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan”* telah tercapai dengan baik. Keberhasilan tersebut menjadi landasan penting bagi penguatan sistem jaminan keamanan pangan nasional guna mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan terlindungi dari risiko pangan asal hewan yang tidak aman.

Sasaran Program (SP) 3: Meningkatkan Luas Wilayah yang Terkendali Kasus Zoonosis

Sasaran program ini bertujuan untuk memperluas wilayah Indonesia yang bebas atau terkendali dari penyakit *Zoonosis* yang berpotensi menular dari hewan ke manusia, seperti rabies dan antraks. Peningkatan luas wilayah terkendali zoonosis mencerminkan keberhasilan Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas) dalam mencegah, mendeteksi, dan

menanggulangi penyakit yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, produktivitas ternak, serta perdagangan komoditas hewan.



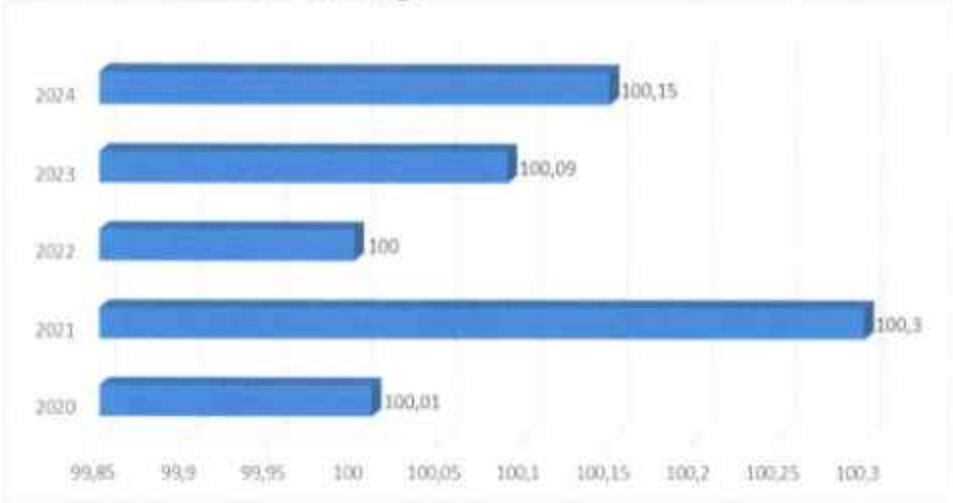
Sumber: Laporan Kinerja Ditjen PKH Tahun 2024

Gambar 18. Capaian Persentase Wilayah yang Terkendali Zoonosis

Grafik di atas menunjukkan persentase wilayah yang terkendali *Zoonosis* dari tahun 2020 hingga 2024, dengan perbandingan antara target dan realisasi setiap tahunnya. Capaian Persentase Wilayah yang terkendali zoonosis Ditjen PKH menunjukkan tren yang berfluktuasi selama periode 2021–2024. Pada tahun 2020, belum dapat terukur karena sasaran program berupa terkendalinya kasus zoonosis pada manusia, dengan indikatornya jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia. Pada tahun 2021, capaian kinerja tercatat sebesar 118,92%, mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 112,52%, dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 107,01%. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai 120%, melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan capaian pada tahun 2024 mencerminkan adanya perbaikan dalam efektivitas pelaksanaan program, peningkatan koordinasi antar unit, serta optimalisasi anggaran yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran strategis Ditjen PKH. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program pengendalian *Zoonosis* melalui peningkatan cakupan vaksinasi hewan penular *Rabies*, penguatan *surveilans* dan respons cepat terhadap kasus penyakit *Zoonosis*, serta penerapan pendekatan *One Health* yang melibatkan kolaborasi antara aspek kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan.

Sasaran Program 4: Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis



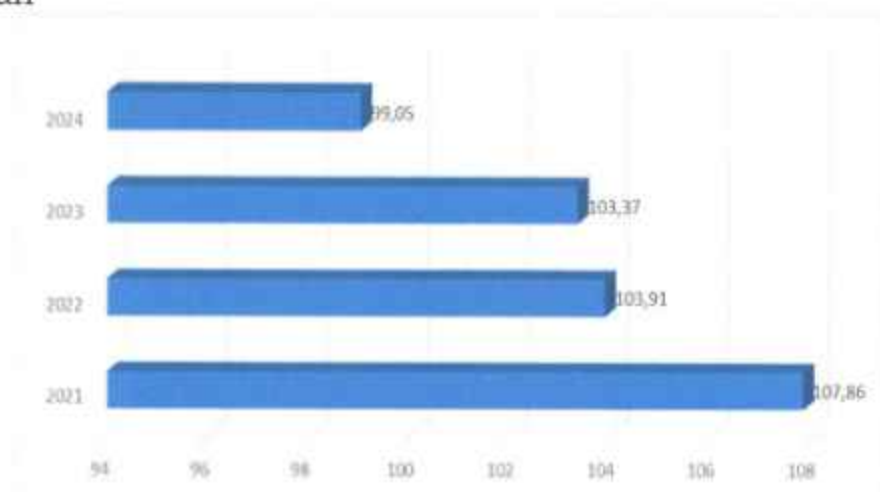
Sumber: Laporan Kinerja Ditjen PKH Tahun 2024
Gambar 19. Capaian luas wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis

Selama periode tahun 2020–2024, capaian pengendalian wilayah terhadap PHMS menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan cenderung meningkat. Pada tahun 2020, persentase wilayah yang terkendali mencapai 100,01%, dan terus mengalami fluktuasi positif hingga mencapai 100,30% pada tahun 2021, sebagai capaian tertinggi dalam periode tersebut. Meskipun pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan ke 100%, capaian kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 100,09%, dan pada tahun 2024 naik lagi menjadi 100,15%.

Capaian pengendalian wilayah berdasar pada angka kesehatan hewan di 34 Provinsi. Pada tahun 2022, meskipun ada penurunan namun tidak signifikan karena upaya pengendalian terus dilaksanakan melalui advokasi penganggaran, pelaksanaan vaksinasi, pengobatan, penerapan *biosecurity* dan KIE yang masif kepada masyarakat, sehingga pada akhir 2022 kasus melandai. Peningkatan kasus yang terjadi di awal tahun 2023 disebabkan adanya perubahan musim dan tingginya lalu lintas ternak menyambut Natal dan Tahun Baru, peningkatan tersebut juga tidak melebihi dua kali standar deviasi dan tetap bisa diupayakan pengendalian sehingga pada akhir 2023 kembali melandai.

Peningkatan capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis, seperti vaksinasi massal, surveilans aktif, peningkatan kapasitas laboratorium veteriner, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Upaya ini berkontribusi pada peningkatan status kesehatan hewan nasional dan mendukung stabilitas produksi ternak serta keamanan pangan asal hewan.

Sasaran Program 5: Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan



Sumber: Laporan Kinerja Ditjen PKH Tahun 2024

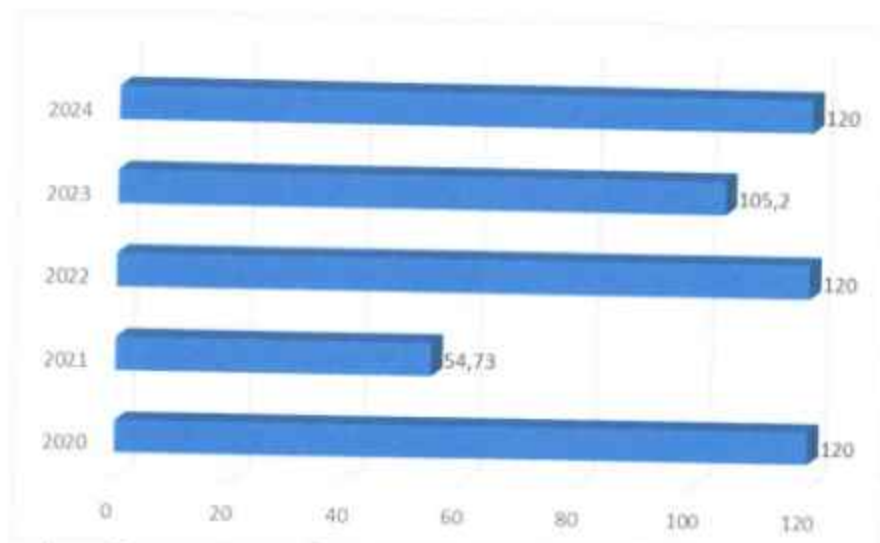
Gambar 20. Capaian Termanfaatkannya sarana pertanian sesuai dengan kebutuhan

Selama periode tahun 2020–2024, tingkat kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, yang mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan sarana produksi yang tersedia. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai 107,86%, melebihi target yang ditetapkan.

Kinerja positif ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian masing-masing 103,91% dan 103,37%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas dan sarana yang telah disediakan dapat dimanfaatkan secara efektif oleh pelaku usaha peternakan maupun unit layanan kesehatan hewan. Meski pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan ke 99,05%, capaian ini masih mencerminkan bahwa pemanfaatan sarana berada pada level mendekati target dan tetap menunjukkan konsistensi kinerja yang baik.

Secara keseluruhan, tren capaian tersebut menggambarkan efektivitas peningkatan akses dan pemanfaatan sarana produksi, baik berupa infrastruktur peternakan, peralatan kesehatan hewan, maupun fasilitas penunjang seperti laboratorium, rumah potong hewan, dan pusat pembibitan. Kinerja ini menjadi indikasi keberhasilan Ditjen PKH dalam meningkatkan kualitas layanan dan produktivitas peternakan nasional.

Sasaran Program 6: Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian



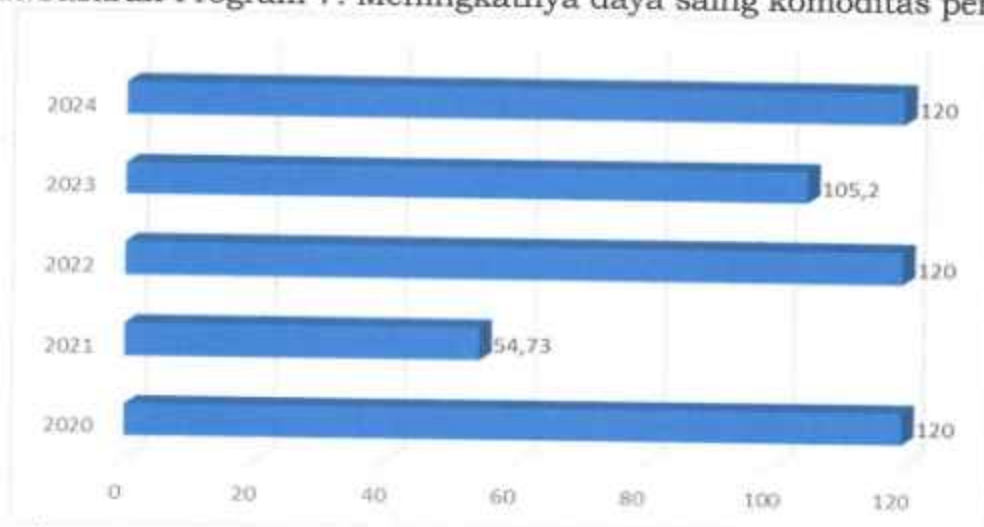
Sumber: Laporan Kinerja Ditjen PKH Tahun 2024

Gambar 21. Capaian nilai tambah komoditas pertanian

Capaian tingkat pemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan selama periode 2020–2024 menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi, dengan sebagian besar tahun mencatat capaian melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, capaian berada pada 120%, menandakan bahwa sarana yang telah dibangun dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha dan kelompok peternak.

Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan ke 54,73%, yang disebabkan oleh masih terbatasnya kapasitas pengelolaan unit pengolahan hasil peternakan, dampak pandemi *COVID-19* terhadap rantai pasok, serta penyesuaian operasional di lapangan. Meski demikian, capaian meningkat tajam pada tahun 2022 menjadi 120%, menunjukkan keberhasilan dalam optimalisasi kembali sarana yang sempat tidak beroperasi.

Kinerja positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 105,2%, dan tetap stabil pada tahun 2024 di level 120%, menandakan tingkat keberhasilan yang konsisten dalam pemanfaatan fasilitas. Secara keseluruhan, tren ini menggambarkan keberhasilan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendorong efektivitas pemanfaatan sarana pascapanen dan distribusi hasil peternakan, termasuk unit pengolahan susu, daging, telur, serta sentra pemasaran produk peternakan di berbagai daerah. Sasaran Program 7: Meningkatnya daya saing komoditas pertanian



Sumber: Laporan Kinerja Ditjen PKH Tahun 2024

Gambar 22. Capaian Meningkatnya daya saing komoditas pertanian

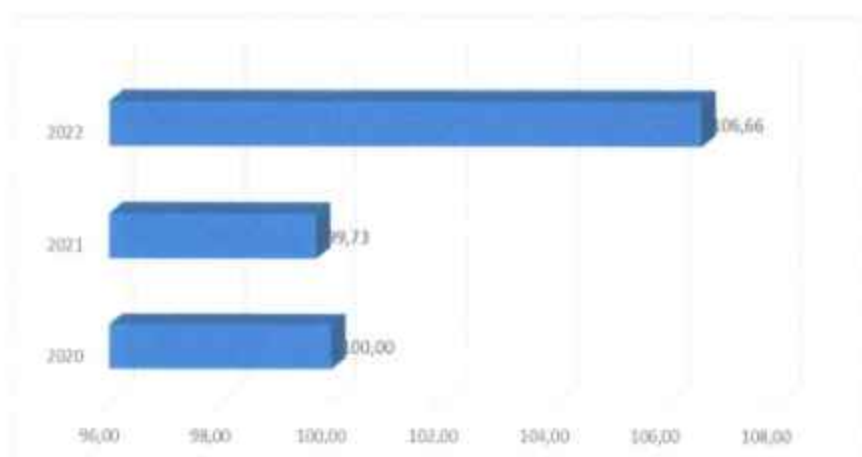
Capaian pertumbuhan nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan selama periode 2020–2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian pada sebagian besar tahun mencapai 120%. Pada tahun 2020, capaian sebesar 120% mencerminkan tingginya kinerja ekspor komoditas peternakan, seperti sarang burung walet, produk olahan unggas, serta produk kesehatan hewan, yang berhasil menembus pasar ekspor di tengah dinamika perdagangan global.

Pada tahun 2021 terjadi penurunan capaian menjadi 54,73%, yang disebabkan oleh pembatasan perdagangan internasional akibat pandemi COVID-19, gangguan rantai pasok logistik, dan penurunan permintaan dari beberapa negara tujuan ekspor. Namun, pemulihan cepat terjadi pada tahun 2022 dengan capaian kembali mencapai 120%, menandakan efektivitas upaya pemerintah dalam memperluas akses pasar, memperkuat diplomasi perdagangan veteriner, serta meningkatkan kepatuhan terhadap standar kesehatan hewan internasional.

Tren positif berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 105,2%, dan pada tahun 2024 kembali mencapai 120%, menegaskan bahwa ekspor produk peternakan Indonesia tidak hanya pulih tetapi juga tumbuh di atas ekspektasi. Secara keseluruhan, periode ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam mendorong ekspor produk peternakan bernilai tambah dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Sasaran Program 8: Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Sasaran program “Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima” merupakan upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Pertanian. Sasaran ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh proses kerja organisasi dilaksanakan secara optimal dengan hasil yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan pemangku kepentingan.



Sumber: Laporan Kinerja Ditjen PKH Tahun 2024

Gambar 23. Capaian Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

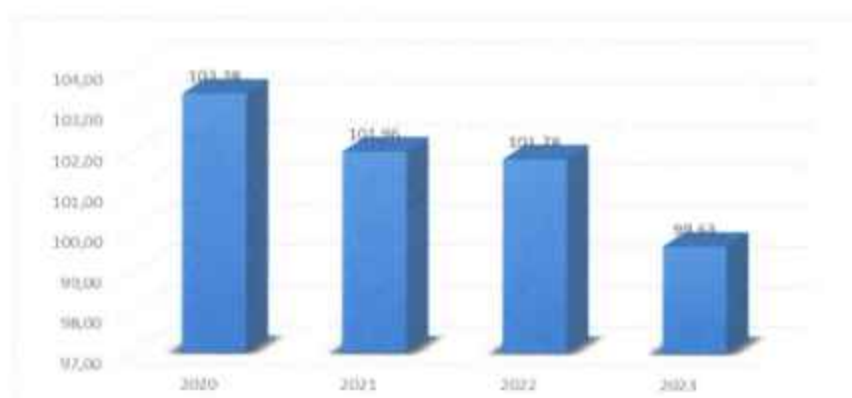
Selama periode 2020–2024, kinerja reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2020 capaian nilai PMPRB mencapai 100,00%, menurun sedikit menjadi 99,73% pada tahun 2021, dan melonjak

signifikan pada tahun 2022 hingga 106,66%, yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen PKH. Mulai tahun 2024, indikator pengukuran berubah menjadi Capaian Nilai Reformasi Birokrasi, dengan hasil sebesar 102,78%, menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi dan menggambarkan birokrasi yang semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima. Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Ditjen PKH dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani secara berkelanjutan.

Sasaran Program 9: Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Sasaran program terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas menggambarkan upaya untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Sasaran ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan, berorientasi hasil (*result-based budgeting*), dan mendukung pencapaian kinerja program pembangunan pertanian, khususnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH, yang mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Nilai ini diperoleh melalui hasil evaluasi terhadap kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kualitas pelaksanaan program dan kegiatan.



Sumber: Laporan Kinerja Ditjen PKH Tahun 2024

Gambar 24. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH

Selama periode 2020–2023, capaian nilai kinerja anggaran Ditjen PKH menunjukkan kinerja yang relatif baik dengan nilai capaian yang berada di atas atau mendekati target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, capaian nilai kinerja anggaran mencapai 103,38%, menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam pelaksanaan program serta pemanfaatan anggaran secara optimal. Pada tahun 2021 dan 2022, capaian masing-masing sebesar 101,96% dan 101,78%, yang menandakan konsistensi dalam menjaga kualitas perencanaan dan realisasi anggaran sesuai sasaran program.

Sementara itu, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan capaian menjadi 99,63%, namun angka tersebut masih mencerminkan kinerja yang baik dan

akuntabel, dengan pengelolaan anggaran yang tetap efisien dan mendukung pencapaian target kegiatan Ditjen PKH secara keseluruhan.

Mulai tahun 2024, indikator pengukuran kinerja anggaran mengalami perubahan menjadi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA merupakan instrumen evaluasi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja pemerintah. Penilaian IKPA mencakup beberapa aspek utama, yaitu kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan, serta efisiensi pelaksanaan belanja negara.

Berdasarkan indikator baru tersebut, capaian IKPA Ditjen PKH tahun 2024 mencapai 101,95%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan sangat baik, mencerminkan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan berorientasi pada hasil. Capaian ini juga menjadi bukti keberhasilan Ditjen PKH dalam beradaptasi terhadap sistem pengukuran baru dan tetap menjaga kualitas pelaksanaan anggaran secara optimal.

1.3 Potensi dan Permasalahan

Dalam penyusunan Renstra Ditjen PKH 2025-2029, diperlukan analisis mendalam terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. Analisis potensi dan permasalahan dilakukan melalui serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan Ditjen PKH. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan serta tantangan yang harus diatasi guna meningkatkan produktivitas, kesejahteraan peternak, dan ketahanan pangan nasional. Dengan memahami kondisi eksisting, tren global, serta dinamika kebijakan yang berkembang, Ditjen PKH dapat merumuskan strategi yang tepat dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan subsektor peternakan yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Berikut adalah potensi dan permasalahan peternakan dan kesehatan hewan nasional:

1.3.1 Potensi

Berdasarkan hasil uraian capaian kinerja peternakan dan kesehatan hewan sebelumnya, maka perlu dirumuskan beberapa potensi yang meliputi kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Ditjen PKH dalam menyusun arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai visi dan misi Ditjen PKH tahun 2025-2029. Berikut adalah kekuatan yang dimiliki oleh Ditjen PKH yang harus dimanfaatkan sebaik baiknya:

1. Populasi ternak

Populasi ternak di Indonesia mencakup berbagai jenis komoditas dengan jumlah cukup besar dan beragam, mencerminkan pentingnya sektor peternakan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Pada tahun 2024 populasi sapi potong mencapai sekitar 11,75 juta ekor, sapi perah 0,47 juta ekor, kerbau 0,56 juta ekor, kambing 15,71 juta ekor, domba 9,22 juta ekor, babi 4,12 juta ekor, ayam buras 146,47 juta ekor, ayam ras petelur 415,33 juta ekor, ayam ras pedaging 3.205,42 juta ekor dan itik 36,67 juta ekor (Sumber: ASEM 2024, Buku Statistik PKH). Usaha peternakan umumnya masih bersifat tradisional, yang memengaruhi skala dan produktivitasnya secara keseluruhan. Populasi ternak di Indonesia khususnya ternak sapi potong hampir 97% dikelola oleh peternak skala kecil dengan skala kepemilikan 2-3 ekor berdasarkan

hasil ST2023. Pola pemeliharaan dilakukan dengan pola intensif, semi intensif, dan ekstensif. Sebanyak 70% peternakan di Indonesia menerapkan pola intensif dan sisanya 30% menerapkan pola semi intensif dan ekstensif.

2. Eksistensi Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT lingkup Ditjen PKH memiliki eksistensi yang jelas melalui berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah (kabupaten/kota), dengan tugas utama mengkoordinasikan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, seperti penyediaan benih dan bibit ternak yang berkualitas dan bersertifikat, penyediaan Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang berkualitas, pengujian mutu dan sertifikasi pakan ternak, penyidikan dan pengujian penyakit hewan, pengujian dan keamanan produk pangan asal hewan serta pelayanan kesehatan hewan. Keberadaan UPT ini penting untuk menjamin kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional.

3. Kekayaan sumber daya genetik ternak lokal

Indonesia memiliki kekayaan plasma nutfah ternak lokal yang beragam, seperti sapi Bali, sapi Madura, kambing Peranakan Etawa, ayam KUB, dan itik Alabio. Keanekaragaman genetik ini merupakan kekuatan strategis dalam menjaga ketahanan bibit nasional dan kemandirian sumber daya genetik di tengah ketergantungan global terhadap impor bibit. Potensi ini dapat dikembangkan untuk menghasilkan varietas ternak unggul yang adaptif terhadap lingkungan lokal, efisien dalam pakan, serta tahan terhadap penyakit endemik.

4. Kerangka regulasi dan kebijakan mendukung Peternakan dan Kesehatan Hewan

Subsektor peternakan dan kesehatan hewan didukung oleh berbagai regulasi dan kebijakan yang komprehensif, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta berbagai peraturan pelaksana di bawahnya.

5. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak

Peningkatan produksi dan produktivitas ternak merupakan kunci untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat. Dengan meningkatkan produksi sumber pangan bergizi seperti daging, telur, dan susu, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor. Populasi ternak penghasil daging, telur, dan susu perlu ditingkatkan melalui program pembibitan dan budidaya yang baik dengan memanfaatkan sumber daya genetik ternak lokal secara berkelanjutan. Selain itu, investasi pada subsektor peternakan harus ditingkatkan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas ternak, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak.

6. Penerapan Praktik Peternakan yang Baik (*Good Breeding/Farming Practices*)

Penerapan praktik peternakan yang baik, seperti *Good Breeding Practices* (GBP) *Good Farming Practices* (GFP) sangat penting untuk menghasilkan ternak yang produktif. Praktik ini mencakup manajemen pemeliharaan, pemberian pakan berkualitas, dan penerapan biosekuriti yang ketat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, peternak dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk ternak mereka. Selain itu, jaminan usaha

peternakan dari hulu ke hilir harus diperkuat untuk menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan dan efisien.

7. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan

Pengendalian dan pencegahan penyakit hewan merupakan langkah kritis untuk menjaga kesehatan hewan dan melindungi masyarakat dari zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia). Penyakit hewan menular seperti ASF, PMK, dan AI dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dan mengancam ketahanan pangan. Oleh karena itu, perlu disusun rencana aksi yang komprehensif untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran penyakit hewan. Sistem pengawasan (*surveillance system*) yang kuat harus ditingkatkan untuk mendeteksi dini dan merespon cepat wabah penyakit. Selain itu, penerapan biosekuriti yang ketat di peternakan dan integrasi teknologi dalam kesehatan hewan dapat menjadi solusi untuk memperkuat sistem ketahanan dan kesehatan hewan nasional.

8. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat serta *stakeholder* terkait kesehatan hewan dan keamanan pangan sangat penting untuk mencegah penyebaran *Zoonosis*, promosi keamanan produk hewan, dan resistensi antimikroba. Masyarakat perlu memahami bahaya *Zoonosis* dan cara mencegah penularannya, seperti melakukan vaksinasi hewan, menjaga kebersihan dan menghindari kontak dengan hewan yang sakit. Selain itu, *stakeholder* di subsektor peternakan harus diedukasi tentang bahaya resistensi antimikroba akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Kesadaran tentang pentingnya keamanan pangan segar asal hewan dan olahan juga perlu ditingkatkan untuk melindungi kesehatan konsumen.

9. Keamanan dan Mutu Produk Hewan

Keamanan dan mutu produk hewan adalah faktor penting untuk memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan memenuhi standar nasional maupun internasional. Produk hewan yang diimpor harus memenuhi persyaratan teknis keamanan produk hewan yang ketat untuk mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri dan menjamin keamanan produk hewan. Di sisi lain, produk hewan nasional juga harus memenuhi standar keamanan dan mutu untuk ekspor agar dapat bersaing di pasar global. Penjaminan keamanan dan mutu produk hewan, mulai dari hulu hingga hilir, harus dilakukan secara konsisten untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat terhadap aspek keamanan dan mutu produk hewan.

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Ditjen PKH dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tingginya permintaan produk peternakan di masyarakat

Permintaan terhadap produk peternakan, seperti daging, telur, dan susu, terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan per kapita, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi protein hewani. Tren ini memberikan peluang besar bagi Ditjen PKH untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri, memperkuat sistem logistik pangan hewani, dan memperluas pasar domestik maupun ekspor. Permintaan yang tinggi juga menjadi insentif bagi pengembangan agribisnis peternakan yang lebih modern dan efisien.

Selain itu, Program Prioritas Nasional Makan Bergizi Gratis yang sedang dilaksanakan pemerintah, juga menjadi peluang pasar karena membutuhkan pangan asal hewan dalam jumlah besar untuk peningkatan gizi anak sekolah, manula dan ibu hamil. Keamanan pangan juga menjadi isu strategis yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

2. Dukungan kebijakan nasional terhadap ketahanan pangan

Dukungan kebijakan nasional terhadap ketahanan pangan, khususnya pangan asal hewan, merupakan salah satu kekuatan strategis utama dalam pembangunan subsektor peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas nasional dalam berbagai dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang, termasuk RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, yang menegaskan pentingnya penguatan produksi pangan dalam negeri, peningkatan nilai tambah, dan pengamanan rantai pasok pangan hewani yang berkelanjutan.

3. Efisiensi dan Hilirisasi Produk Peternakan

Efisiensi dan hilirisasi produk peternakan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk asal ternak. Dengan memangkas rantai distribusi, harga jual produk di tingkat peternak dapat ditingkatkan, sehingga meningkatkan pendapatan peternak. Hilirisasi produk peternakan, seperti pengolahan daging, susu, dan telur menjadi produk bernilai tambah, juga dapat meningkatkan daya saing di pasar domestik dan internasional. Inovasi teknologi dalam sistem pemasaran dan distribusi dapat membantu mengoptimalkan efisiensi subsektor peternakan.

4. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi

Penguatan kelembagaan peternak dan koordinasi antar lembaga pemerintah sangat penting untuk mendukung pengembangan subsektor peternakan. Kelembagaan peternak yang kuat dapat membantu peternak kecil mengakses sumber daya, teknologi, dan pasar. Koordinasi dengan Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan perlu ditingkatkan untuk memperkuat pengawasan dan regulasi di subsektor peternakan.

5. Kemajuan teknologi digital dan bioteknologi

Perkembangan teknologi digital dan bioteknologi memberikan peluang besar bagi transformasi subsektor peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. Pemanfaatan teknologi seperti *Internet of Things (IoT)*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Big Data Analytics*, dan sistem informasi geografis (GIS) memungkinkan peningkatan efisiensi produksi, pemantauan kesehatan hewan secara real-time, serta penguatan sistem *traceability* dan penjaminan keamanan produk asal hewan. Di sisi bioteknologi, kemajuan dalam bidang reproduksi, genetika, vaksin, dan pakan fermentasi membuka ruang peningkatan produktivitas dan ketahanan ternak terhadap penyakit. Transformasi digital ini sejalan dengan arah kebijakan nasional menuju *pertanian cerdas (smart agriculture)* dan *peternakan presisi (precision livestock farming)* yang berdaya saing dan berkelanjutan.

6. Pasar ekspor produk peternakan dan halal global

Peningkatan permintaan global terhadap produk peternakan dan pangan halal memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas

pasar ekspor. Negara-negara di kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika memiliki kebutuhan tinggi terhadap daging, telur, susu, serta produk olahan halal. Indonesia, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan produk halal dengan dukungan sistem sertifikasi halal nasional yang diakui secara internasional. Melalui pemenuhan persyaratan sanitasi (kesehatan hewan dan keamanan produk hewan), penguatan mutu produk, dan pengembangan infrastruktur rantai dingin, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dalam pasar produk peternakan dan halal global di masa mendatang.

7. Kerja sama internasional dan dukungan mitra pembangunan

Peluang kerja sama internasional dengan lembaga multilateral dan mitra pembangunan semakin terbuka luas dalam mendukung penguatan subsektor peternakan dan kesehatan hewan. Dukungan teknis dan pembiayaan dari lembaga seperti FAO, WOAH, IFAD, JICA, serta mitra bilateral lainnya berperan penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, memperluas riset dan inovasi, serta mempercepat adopsi teknologi baru. Program kerja sama internasional juga berkontribusi terhadap peningkatan sistem kesehatan hewan nasional, penjaminan keamanan produk hewan, pencegahan dan pengendalian zoonosis, pengendalian resistensi antimikroba dan pengembangan peternakan berkelanjutan yang selaras dengan pendekatan *One Health*. Kolaborasi ini menjadi peluang strategis untuk mempercepat modernisasi subsektor peternakan Indonesia.

8. Dukungan swasta dan masyarakat terhadap agribisnis peternakan

Semakin meningkatnya minat pihak swasta, koperasi, dan masyarakat terhadap usaha peternakan modern membuka peluang besar bagi penguatan rantai nilai agribisnis nasional. Peran pelaku usaha dalam pengolahan hasil, distribusi, dan pemasaran produk peternakan dapat memperluas akses pasar dan menciptakan nilai tambah ekonomi di tingkat peternak. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan bergizi, aman, dan sehat mendorong tumbuhnya permintaan terhadap produk asal hewan dalam negeri. Keterlibatan generasi muda dan wirausaha baru di bidang peternakan juga menjadi katalisator bagi munculnya inovasi usaha dan adopsi teknologi baru dalam pengelolaan peternakan yang efisien dan ramah lingkungan.

9. Investasi Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan

Subsektor peternakan dan kesehatan hewan menjadi salah satu bidang yang semakin menarik bagi investasi dalam negeri maupun luar negeri. Dukungan kebijakan pemerintah dalam bentuk kemudahan perizinan, insentif fiskal, serta pengembangan kawasan industri peternakan terpadu memberikan peluang besar untuk peningkatan investasi di bidang produksi, pengolahan hasil ternak, dan logistik rantai dingin. Selain itu, peningkatan minat investor terhadap konsep pertanian hijau dan ekonomi sirkular mendorong pengembangan teknologi pengolahan limbah menjadi biogas, pupuk organik, serta bahan baku industri. Investasi subsektor peternakan yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dan daya saing produk peternakan Indonesia di pasar global.

1.3.2 Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya, maka permasalahan dapat dijabarkan dalam kelemahan dan ancaman dihadapi oleh Ditjen PKH. Berikut ini beberapa kelemahan dari Ditjen PKH yaitu:

1. Regulasi

Regulasi peternakan dan kesehatan hewan pada dasarnya telah disusun untuk menjamin pembangunan peternakan yang berkelanjutan, keamanan pangan asal hewan, serta perlindungan dari penyakit hewan menular. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kelemahan. Salah satu persoalan utama adalah masih terjadinya fragmentasi kebijakan antar instansi dan kurangnya sinergi regulasi antar Kementerian/Lembaga. Selain itu, perlu dilakukan pemutakhiran regulasi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan saat ini. Salah satu titik lemah dalam implementasi regulasi peternakan dan kesehatan hewan adalah pengawasan dan penegakan hukum.

2. Manajemen Anggaran dan Program

Perubahan struktur anggaran untuk fokus pada penanganan wabah penyakit dan dampak bencana alam seringkali mengganggu program program peternakan yang sudah direncanakan. *Refocusing* program diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif untuk mengatasi tantangan yang mendesak. Disamping permasalahan terkait *refocusing* anggaran, perubahan kebijakan pemerintah pusat juga sering menjadi tantangan tersendiri untuk Ditjen PKH, seperti kebijakan efisiensi anggaran yang tentunya akan berdampak para pembiayaan program yang telah direncanakan.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Peternakan dan Kesehatan Hewan

Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang peternakan dan kesehatan hewan masih belum mencukupi, baik dari segi jumlah maupun pemerataan antar wilayah. Petugas teknis seperti dokter hewan, paramedik veteriner, inseminator, dan tenaga lapangan belum tersebar secara proporsional sesuai kebutuhan daerah. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya upaya pembinaan teknis peternakan dan kesehatan hewan, pelaksanaan pelayanan peternakan dan kesehatan hewan, pengawasan lalu lintas, penjaminan keamanan produk hewan dan peningkatan kesadaran masyarakat/pelaku usaha.

4. Belum optimalnya sistem data dan informasi peternakan nasional

Sistem data dan informasi di sub sektor peternakan belum sepenuhnya terintegrasi antara pusat dan daerah. Data populasi, produksi, distribusi ternak, dan penyakit hewan sering kali belum diperbarui secara real-time, serta masih tersebar dalam berbagai sistem yang belum saling terhubung. Kondisi ini menyebabkan pengambilan keputusan dan perencanaan program belum sepenuhnya berbasis pada data yang akurat dan mutakhir.

Saat ini sudah dikembangkan sistem pelaporan peternakan dan kesehatan hewan yang terintegrasi antara pusat dan daerah, namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.

5. Kapasitas laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner yang belum merata

Sebagian besar laboratorium veteriner di daerah masih menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas dan peralatan pengujian, ketersediaan

bahan standar dan tenaga analis yang kompeten. Kapasitas pengujian dan standar mutu laboratorium pun belum seragam di seluruh wilayah. Akibatnya kemampuan deteksi dini, diagnosis cepat, pengujian produk hewan dan respon terhadap penyakit hewan menular strategis maupun zoonosis masih belum optimal.

6. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung Peternakan dan Kesehatan Hewan

Infrastruktur pendukung subsektor peternakan, seperti Puskesmas, unit pembibitan, rumah potong hewan (RPH), gudang pakan, fasilitas *cold storage*, serta sarana transportasi dan logistik, masih terbatas jumlah dan kapasitasnya. Kondisi ini berpengaruh terhadap efisiensi produksi, distribusi produk hewan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan serta penjaminan keamanan produk hewan di berbagai wilayah, terutama di luar sentra utama produksi.

7. Koordinasi lintas unit dan lintas sektor belum optimal

Sinergi antara unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian, maupun dengan kementerian/lembaga terkait (seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Karantina Indonesia, Bapanas, BPOM, BKPM, BPJPH) dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Akibatnya, beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektor seperti pengendalian zoonosis, penjaminan keamanan pangan asal hewan, fasilitasi ekspor produk hewan, dan investasi peternakan belum terimplementasi secara efektif dan terpadu.

8. Kurangnya insentif dan pembiayaan bagi pelaku usaha peternakan skala kecil-menengah

Pelaku usaha peternakan rakyat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun investasi swasta. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan, keterbatasan agunan, serta skala usaha yang kecil dan belum *bankable*. Kondisi tersebut menghambat pengembangan usaha, inovasi, dan modernisasi sistem produksi di tingkat peternak.

9. Belum optimalnya pengawasan keamanan dan mutu produk hewan di seluruh rantai pasok

Sistem jaminan keamanan dan mutu pangan asal hewan masih menghadapi tantangan seperti penerapan Sertifikasi NKV, registrasi produk hewan, lalu lintas produk hewan, sertifikasi halal, dan penerapan standar teknis lainnya di seluruh rantai pasok. Variasi mutu produk antar daerah serta keterbatasan jumlah pengawas dan laboratorium pengujian menyebabkan produk hewan domestik belum sepenuhnya memenuhi standar nasional maupun internasional, sehingga daya saingnya masih relatif rendah.

Sedangkan tantangan yang harus diantisipasi oleh Ditjen PKH dalam pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain:

1. Penyakit Hewan dan Zoonosis

Penyakit hewan, terutama yang bersifat *Zoonosis*, menjadi tantangan serius bagi subsektor peternakan dan kesehatan masyarakat. Penyakit seperti PMK dan AI tidak hanya menurunkan populasi dan produktivitas ternak tetapi juga mengancam kesehatan manusia. Biaya pengobatan untuk ternak dan manusia yang tertular penyakit ini dapat sangat tinggi, bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Perubahan iklim

memperparah situasi ini dengan meningkatkan stres pada hewan, virulensi agen penyakit, dan munculnya *emerging Zoonotic disease* khususnya *vector borne diseases*. Oleh karena itu, program pengendalian penyakit melalui vaksinasi, biosekuriti, dan sistem pengawasan yang masif harus diimplementasikan.

2. Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim menimbulkan tantangan besar bagi peternakan, seperti penurunan produktivitas Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan peningkatan kerentanan ternak terhadap penyakit serta munculnya *vector borne diseases* di wilayah baru (*emerging zoonotic disease*). Stres pada hewan akibat cuaca ekstrem dan peningkatan virulensi agen penyakit memerlukan strategi adaptasi yang komprehensif. Penyediaan anggaran khusus untuk penanganan dampak bencana alam terhadap ternak juga menjadi kebutuhan mendesak. Dalam konteks ini, isu gender menjadi perhatian penting karena dampak perubahan iklim pada subsektor peternakan cenderung lebih berat bagi perempuan, khususnya peternak kecil dan rumah tangga. Keterbatasan akses perempuan terhadap informasi iklim, teknologi adaptasi, layanan kesehatan hewan, serta sumber pembiayaan membuat mereka lebih rentan kehilangan aset ternak dan pendapatan. Perempuan juga memiliki peran besar dalam pengelolaan pakan dan perawatan ternak sehari-hari, sehingga penurunan produksi hijauan dan meningkatnya risiko penyakit secara langsung meningkatkan beban kerja dan tekanan ekonomi bagi mereka.

3. Ketahanan Pangan dan Daya Saing Produk Lokal

Ketahanan pangan produk asal hewan harus dijaga untuk memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Namun, produk peternakan lokal sering kalah saing dengan produk impor yang lebih murah, menyebabkan penurunan minat berusaha di bidang peternakan. Potensi konflik dalam rantai distribusi juga perlu diatasi untuk menciptakan sistem yang adil dan efisien.

4. Ketergantungan terhadap Impor Bahan Baku Pakan dan Produk Hewan Tertentu

Sebagian besar bahan baku pakan (seperti jagung, bungkil kedelai, dan premiks) serta produk hewan tertentu masih bergantung pada impor. Ketergantungan ini membuat sub sektor peternakan rentan terhadap fluktuasi harga global, kebijakan perdagangan negara pemasok, dan gangguan rantai pasok internasional. Kondisi tersebut berpotensi menekan daya saing industri peternakan domestik dan meningkatkan harga produk di tingkat konsumen.

5. Persaingan Global dan Tekanan Pasar Produk Asal Hewan

Meningkatnya arus perdagangan bebas dan produk impor dengan harga kompetitif menjadi tantangan besar bagi produk peternakan dalam negeri. Produk asal hewan dari luar negeri sering kali memiliki efisiensi produksi dan standar mutu lebih tinggi. Tanpa peningkatan produktivitas dan efisiensi di tingkat nasional, produk lokal akan sulit bersaing di pasar domestik maupun internasional.

6. Fluktuasi Ekonomi Global dan Ketidakpastian Pasar

Perubahan ekonomi global, termasuk inflasi pangan, krisis energi, dan ketidakstabilan geopolitik, dapat memengaruhi harga pakan, biaya transportasi, dan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut berdampak

langsung terhadap keberlanjutan usaha peternakan dan kesehatan hewan, terutama bagi peternak kecil yang memiliki daya tahan ekonomi terbatas.

7. Ancaman Resistensi Anti mikroba (AMR) dan Keamanan Pangan

Penggunaan anti mikroba yang tidak terkontrol dalam usaha peternakan berpotensi menimbulkan AMR yang dapat menular ke manusia. Ancaman ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi akses ekspor produk hewan Indonesia ke pasar global yang semakin ketat terhadap isu keamanan pangan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan secara masif untuk menyediakan makanan dalam jumlah besar dan cepat dapat mendorong praktik penggunaan bahan pangan asal hewan yang tidak terjamin keamanan dan mutunya yang juga dapat berdampak pada penerima manfaat. Jika tidak diawasi dengan ketat, Program Makan Bergizi Gratis dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan/keracunan pangan atau penularan penyakit bawaan pangan.

8. Penurunan Jumlah Rumah Tangga Peternak

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian selama satu dekade mengalami penurunan. Berdasarkan hasil ST2023 dibandingkan dengan hasil ST2013, terjadi penurunan di tingkat rumah tangga usaha pertanian subsektor peternakan sebesar 7,11% dari 12,97 juta menjadi 12,05 juta. Penurunan tersebut diakibatkan karena usaha di bidang pertanian/peternakan kurang menarik, keuntungan kecil, tidak ada jaminan pasar, regenerasi tidak berjalan petani/peternak sudah tua, luas lahan terbatas (Gurem), dan banyak menjadi buruh tani.

9. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan pertanian membawa dampak langsung terhadap keberlanjutan subsektor peternakan. Berkurangnya lahan hijau yang secara tradisional berfungsi sebagai sumber pakan ternak (padang penggembalaan dan lahan untuk hijauan), sehingga meningkatkan ketergantungan pada pakan pabrikan yang mahal dan rentan fluktuasi harga. Selain itu, peternakan, terutama skala kecil, sering terdesak ke wilayah marjinal dengan produktivitas lebih rendah, sementara limbah peternakan yang seharusnya menjadi pupuk organik berharga semakin sulit dikelola karena keterbatasan lahan untuk penyerapan, berpotensi menimbulkan masalah lingkungan baru. Lebih jauh, berkurangnya lahan ini mempersulit implementasi sistem peternakan berkelanjutan yang membutuhkan integrasi dengan tanaman. Oleh karena itu, tantangan dari alih fungsi lahan mengharuskan subsektor peternakan beradaptasi melalui inovasi teknologi pakan, intensifikasi sistem, dan penguatan regulasi yang melindungi lahan pakan ternak sebagai bagian penting dari ketahanan pangan nasional.

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2.1 Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Visi merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai organisasi di masa yang akan datang. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Bappenas) Nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*) dan merupakan gambaran konsistensi kinerja K/L selama 5 (lima) tahun ke depan. Visi juga merupakan gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi serta *positioning* organisasi dalam pembangunan nasional. Visi harus mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden terlantik yang tertuang di dalam RPJMN, sehingga pernyataan Visi K/L harus mencantumkan Visi Presiden sebagai tujuan bersama. Dalam mewujudkan Visi Presiden terpilih tahun 2025-2029 serta cita-cita pembangunan nasional tahun 2025-2029, maka Kementerian Pertanian telah menetapkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, yaitu:

*"Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat
Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju
Indonesia Emas 2045"*

Secara umum, Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 ini bermakna bahwa Pembangunan pertanian dilanjutkan dengan serangkaian upaya strategis dalam mewujudkan pertanian yang maju sesuai perkembangan jaman. Selain itu, pembangunan pertanian juga harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Rakyat Indonesia, sehingga dapat mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Secara detail, makna Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pertanian

Berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 2 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pertanian bermakna kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

b. Pertanian Maju

Pertanian yang maju bermakna bahwa Pertanian Indonesia yang akan mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik pertanian terkini pada seluruh rantai proses utama pertanian, meliputi Penyiapan Prasarana dan Sarana Pertanian, Budidaya Pertanian, Pasca Panen komoditas Pertanian, Pengolahan komoditas Pertanian, serta Pemasaran komoditas pertanian.

c. Pertanian Berkelanjutan

Pertanian berkelanjutan berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 1 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sehingga, dalam praktik Pertanian berkelanjutan, sumber daya

pertanian yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya. Selain itu, pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular pada pembangunan nasional, dimana peran sektor pertanian adalah melalui penerapan pertanian berkelanjutan.

d. Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia

Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia bermakna bahwa Pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, dimana melalui pembangunan pertanian tersebut, maka manfaat yang didapat rakyat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komoditas pertanian yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian.
2. Pertanian bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Komoditas pertanian dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk rakyat.
4. Kesehatan rakyat (*one health*) dapat terwujud, khususnya dari pencegahan dan penanganan penyakit yang ditularkan melalui hewan.

Ditjen PKH sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I harus dapat turut serta dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 tersebut. Untuk itu, maka Visi Ditjen PKH tahun 2025-2029 yang selaras dengan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 adalah:

*"Pernakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan
dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia"*

Visi Ditjen PKH ini mengandung beberapa kata kunci yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Peternakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, peternakan bermakna segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusaha, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

b. Kesehatan Hewan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka Kesehatan Hewan didefinisikan sebagai segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.

c. Peternakan Maju

Pernakan yang maju bermakna bahwa Peternakan Indonesia mampu mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik peternakan terkini pada seluruh rantai proses utama peternakan, meliputi penyiapan prasarana dan sarana peternakan, budidaya ternak berkelanjutan, kesehatan ternak, mutu dan keamanan produk asal ternak, pascapanen komoditas peternakan, pengolahan komoditas peternakan, serta pemasaran komoditas peternakan.

d. **Peternakan Berkelanjutan**

Pertanian berkelanjutan berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Peternakan merupakan salah satu komoditas, sehingga dalam praktik Peternakan berkelanjutan, sumber daya pertanian yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya. Selain itu, pelaksanaan sistem budidaya Peternakan berkelanjutan sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular pada pembangunan nasional, dimana peran subsektor peternakan adalah melalui penerapan pertanian berkelanjutan dalam mengurangi susut pangan asal ternak.

e. **Peternakan yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia**

Peternakan yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia bermakna bahwa pembangunan peternakan juga harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, dimana melalui pembangunan peternakan tersebut, maka manfaat yang didapat rakyat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komoditas peternakan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal peternakan.
2. Peternakan bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan peternak.
3. Kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan (*one health*) dapat terwujud, khususnya dari pencegahan dan penanganan penyakit yang ditularkan melalui hewan dan produk asal hewan.

2.2 **Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 disusun dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 serta memastikan kontribusi dalam pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 tersebut adalah:

1. **Meningkatkan kesejahteraan petani**

Kesejahteraan Petani merupakan kondisi di mana petani dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Meningkatkan kesejahteraan petani dilakukan melalui upaya strategis agar petani mendapatkan harga yang layak, melindungi usaha petani, mendorong kemandirian petani serta memberikan bantuan pemerintah dalam rantai nilai pertanian, meliputi Penyiapan Prasarana dan Sarana Pertanian, Budidaya Pertanian, Pasca Panen komoditas Pertanian, Pengolahan komoditas Pertanian, serta Pemasaran komoditas pertanian.

2. **Mendorong kemandirian pangan asal pertanian**

Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Hal ini berarti bermakna bahwa kemandirian pangan dapat diwujudkan melalui swasembada pangan pada beberapa komoditas pertanian strategis yang menjadi prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maupun prioritas Kementerian Pertanian.

3. Meningkatkan nilai manfaat produk pertanian bagi rakyat Indonesia.
Produk pertanian memberikan nilai manfaat bagi rakyat Indonesia, yaitu:
 - a. Manfaat dalam memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian;
 - b. Manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani;
 - c. Manfaat sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT)
4. Mencegah dan menangani penularan penyakit hewan kepada manusia
Misi 4 menekankan pada pencegahan dan penanganan penularan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) kepada manusia, sehingga berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan dapat memengaruhi tingkat kesehatan manusia, bahkan beberapa dapat menyebabkan kematian. Penyakit tersebut diantaranya adalah *monkeypox* (Mpox), Rabies, Anthrax, dan lain sebagainya. Penerapan sistem kesehatan hewan nasional secara komprehensif diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan, dapat meminimalisir dampak dari penularan penyakit dari hewan dan/atau produk hewan ini.
5. Meningkatkan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang berdampak langsung kepada masyarakat
Misi ini merupakan kontribusi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi Birokrasi (RB) Kementan dibagi atas 2 (dua), yaitu RB General dan RB Tematik. Fokus RBN yang diterjemahkan menjadi Reformasi Birokrasi (RB) level mikro (K/L) adalah RB Kementan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dalam mewujudkan Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 tersebut, maka Misi Ditjen PKH Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan produksi komoditas peternakan secara berkelanjutan dalam menghasilkan pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)
Misi ini menekankan pada peningkatan produksi ternak dengan sistem budi daya peternakan berkelanjutan agar hasil peternakan dapat terus dinikmati hingga generasi berikutnya. Budidaya peternakan berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peningkatan produksi dimulai dari pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG), budidaya ternak hingga produksi ternak dalam memenuhi kebutuhan pangan asal ternak dalam negeri.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi peternak rakyat
Kesejahteraan peternak, khususnya peternak rakyat menjadi prioritas dan muara atas upaya yang dilakukan, baik dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan, maupun melalui penyediaan akses terhadap pasar produk peternakan. Hilirisasi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat yang berkeadilan, sehingga taraf hidup peternak rakyat dapat semakin meningkat. Misi ini fokus pada meningkatkan kesejahteraan maupun keadilan peternak rakyat melalui upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan, hilirisasi produk

peternakan maupun memastikan ketersediaan akses pasar produk peternakan.

3. Menegakkan sistem kesehatan hewan nasional dalam meningkatkan kesehatan masyarakat

Misi ketiga adalah menegakkan sistem kesehatan hewan nasional dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, baik dari pangan asal ternak maupun dari penularan penyakit hewan dan produk hewan kepada manusia. Misi ini menekankan pada pentingnya keamanan pangan asal ternak bagi kesehatan manusia. Selain itu, misi ini juga menekankan pencegahan dan penanganan penyakit hewan khususnya yang dapat berdampak kepada kesehatan manusia.

2.3 Tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tujuan merupakan visi yang dipersempit yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi serta melaksanakan misi. Tujuan ditetapkan berdasarkan Misi dalam mewujudkan Visi tahun 2025-2029. Tujuan Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Meningkatnya volume usaha pertanian dan kapasitas SDM Pertanian

Tujuan 1 Meningkatnya volume usaha pertanian dan kapasitas SDM Pertanian merupakan peran Kementerian Pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan volume usaha pertanian dan SDM pertanian diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani dari tahun ke tahun, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara bertahap. Tujuan 1 ini memiliki 2 (dua) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- a. IT.1: Pertumbuhan volume usaha pertanian
- b. IT.2: Pertumbuhan pelaku usaha pertanian yang naik kelas

2. Tujuan 2: Terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas

Tujuan 2 adalah terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas, dimana sebagian besar produksi dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Penerapan sistem budidaya pertanian berkelanjutan memastikan produksi tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan jangka pendek, namun juga harus dapat memenuhi kebutuhan pangan di masa yang akan datang, khususnya dalam mengantisipasi krisis pangan yang diperkirakan akan melanda dunia, termasuk Indonesia. Pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus menjadi bentuk kontribusi Kementerian Pertanian dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional ekonomi sirkuler dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Tujuan ini memiliki 3 (tiga) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- a. IT.3: Indeks swasembada pangan prioritas
- b. IT.4: Indeks penerapan sistem budidaya pertanian berkelanjutan
- c. IT.5: Indeks cadangan pangan asal pertanian nasional

3. Tujuan 3: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat

Tujuan 3 adalah meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat. Komoditas pertanian yang dihasilkan harus bernilai tambah dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas pertanian tersebut dan meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan nilai tambah dilakukan melalui hilirisasi rantai nilai pertanian, dimana orientasi penjualan tidak lagi berbasiskan

produk mentah, namun sudah masuk pada produk setengah jadi dan produk jadi. Tujuan ini memiliki 3 (tiga) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- a. IT.6: Persentase pemenuhan produksi pertanian terhadap kebutuhan bahan baku *bio energy*
 - b. IT.7: Pertumbuhan volume ekspor komoditas pertanian
 - c. IT.8: Persentase peningkatan hilirisasi komoditas pertanian
4. Tujuan 4: Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit akibat hewan dan produk hewan
Tujuan 4 adalah meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit akibat hewan dan produk hewan, sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Munculnya berbagai penyakit hewan yang berdampak kepada manusia beberapa waktu belakangan ini, seperti *Monkeypox*, *Anthrax*, Flu Burung, dan penyakit bawaan pangan lainnya dapat memengaruhi kesehatan manusia khususnya di wilayah penularan penyakit. Untuk itu maka dibutuhkan penerapan Sistem Kesehatan Hewan Nasional dalam meningkatkan kesehatan hewan, mencegah dampak penyakit hewan kepada manusia serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit hewan bagi kesehatan. Tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan IT.9: Indeks Kesehatan Masyarakat Veteriner.
5. Tujuan 5: Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional
Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) merupakan upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) yang telah berlangsung sejak tahun 2010. Reformasi Birokrasi (RB) dilakukan secara berjenjang, baik di tingkat makro, meso maupun mikro. Tujuan 5 Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional, merupakan upaya reformasi birokrasi tingkat mikro (K/L) dalam membentuk birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik Kementerian Pertanian yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan IT.10: Nilai RB Kementerian Pertanian

Berdasarkan tujuan Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 tersebut, maka tujuan Ditjen PKH tahun 2025-2029 adalah:

1. Tujuan 1: Meningkatnya volume usaha peternakan
Ditjen PKH merupakan lingkup dipersempit dari Tujuan 1 Kementerian Pertanian, yaitu meningkatnya volume usaha peternakan. Peningkatan volume usaha peternakan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani dari tahun ke tahun, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara bertahap. Tujuan 1 ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu IT.1: Indeks Harga yang diterima peternak
2. Tujuan 2: Terpenuhinya produksi komoditas peternakan
Tujuan 2 adalah terpenuhinya produksi komoditas peternakan. Hal ini mengindikasikan bahwa produksi pangan asal ternak prioritas, yaitu daging, telur, dan susu telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu IT.2: Persentase terpenuhinya produksi pangan asal ternak prioritas.
3. Tujuan 3: Terwujudnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan
Tujuan 3 adalah terwujudnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan. Komoditas peternakan yang dihasilkan harus bernilai

tambah dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas peternakan tersebut dan meningkatkan pendapatan peternak. Peningkatan nilai tambah dilakukan melalui hilirisasi, dimana orientasi penjualan tidak lagi berbasiskan produk mentah, namun sudah masuk pada produk setengah jadi dan produk jadi. Tujuan ini memiliki 2 (dua) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- a. IT.2: Volume ekspor komoditas peternakan
- b. IT.3: Indeks hilirisasi komoditas peternakan

4. Tujuan 4: Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit akibat hewan dan produk hewan

Tujuan 4 Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit akibat hewan dan produk hewan. Munculnya berbagai penyakit hewan yang berdampak kepada manusia beberapa waktu belakangan ini, seperti *Monkeypox*, *Anthrax*, AI, dan penyakit bawaan produk hewan lainnya, dapat memengaruhi kesehatan manusia khususnya di wilayah penularan penyakit. Untuk itu, dibutuhkan penerapan sistem kesehatan hewan nasional dalam meningkatkan kesehatan hewan, mencegah dampak penyakit hewan kepada manusia serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit hewan bagi kesehatan. Tujuan ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu: Indeks Kesehatan Masyarakat Veteriner.

2.4 Sasaran Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Sasaran Program (SP) mencerminkan hasil kinerja Program yang ingin dicapai secara nasional, sedangkan Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja Program dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif. Sasaran Program terkait Ditjen PKH diterjemahkan berdasarkan pohon kinerja Kementerian Pertanian pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, dimana Sasaran Program (SP) merupakan kinerja strategis subsektor yang diturunkan dari kinerja strategis sektor atau *Critical Success Factor* (CSF) dari setiap *final outcome*.

Pohon kinerja Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 terkait Ditjen PKH berdasarkan *Final Outcome* (FO) dan CSF yang telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat pada lampiran.

2.5 Manajemen Risiko Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Berdasarkan Peraturan Presiden No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga perlu dilengkapi dengan identifikasi indikasi risiko. Identifikasi indikasi risiko adalah proses yang bertujuan untuk mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Risiko Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Renstra Kementerian Pertanian telah memasukkan penerapan manajemen risiko lingkup Kementerian Pertanian yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara kolaboratif, terstruktur, dan sistematis. Penerapan manajemen risiko di Kementerian Pertanian tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis secara efektif, dengan mengintegrasikan proses identifikasi, analisis, mitigasi,

serta pemantauan risiko ke dalam seluruh tahapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Sebagai unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Ditjen PKH juga memasukan MRPN dalam Renstra Ditjen PKH Tahun 2025-2029 dalam bentuk Manajemen Risiko Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penerapan manajemen risiko memfokuskan pada risiko yang pencapaian SP Ditjen PKH. Berikut tabel identifikasi risiko SP Ditjen PKH.

Tabel 5. Manajemen Risiko

No	Sasaran Program	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
1	Meningkatnya indeks harga yang diterima peternak	Indeks harga yang diterima peternak rendah	· Pengaturan harga acuan terendah di tingkat peternak dan tertinggi di Tingkat konsumen berkoordinasi dengan K/L terkait · Pemantauan harga · Peningkatan akses pasar dalam negeri dan ekspor produk peternakan · Penyediaan informasi harga dan pasar	Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan
2	Terpenuhinya Produksi Komoditas Peternakan	Produksi Peternakan menurun	· Mendorong fasilitasi prasarana sarana pengelolaan pakan · Pemantauan harga dan stok pakan/bahan pakan · Mendorong cadangan bahan pakan pemerintah · Pengendalian penyakit hewan	1. Direktorat Pakan 2. Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
3	Terjaminnya mutu komoditas peternakan	Indeks Mutu komoditas peternakan rendah	· Pendampingan penerapan dan/atau fasilitasi sertifikasi mutu dan izin edar berkolaborasi dengan K/L atau Lembaga sertifikasi terkait · Peningkatan kapasitas SDM melalui Bimtek/Pelatihan Penjaminan Mutu	Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan

No	Sasaran Program	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
			· Pembinaan dan pendampingan penyusunan Dokumen Sistem Mutu · Pengawasan mutu terhadap produk peternakan yang beredar	
4	Terjaminnya keamanan komoditas peternakan	Indeks keamanan komoditas peternakan rendah	Penjaminan keamanan dan kesehatan produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha peternakan	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
5	Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan yang siap digunakan	Volume ekspor komoditas peternakan menurun	· Harmonisasi SPS dan TBT, koordinasi K/L dan peningkatan kerjasama perdagangan. · Diversifikasi negara tujuan ekspor, promosi dan misi dagang. · Negosiasi dan harmonisasi kerjasama teknis dengan otoritas negara tujuan. · Promosi dan misi dagang ke pasar potensial, pendampingan sertifikasi dan standarisasi internasional, penyediaan informasi pasar ekspor.	Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan
6	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang telah menerapkan	Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan	· Penyusunan/revisi regulasi dan NSPK · Fasilitasi akses sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan	Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan

No	Sasaran Program	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
	hilirisasi		· Pembinaan dan pendampingan pemanfaatan prasarana sarana dan teknologi pasca panen dan pengolahan · Bimbingan Teknis pasca panen dan pengolahan · Fasilitasi akses pembiayaan dan mendorong investasi · Peningkatan kerjasama hilirisasi peternakan dengan K/L terkait	
7	Terkendalinya wilayah atau kawasan dari penyakit hewan	Wilayah dari penyakit hewan tidak terkendali	· Melakukan identifikasi dan pemetaan prioritas berdasarkan penyakit, wilayah, spesies hewan dan waktu pelaksanaan vaksinasi · Menyiapkan standar penilaian kompartemen bebas PHMS dan standar minimal biosekuriti peternakan, dan pembinaan penerapan biosekuriti untuk peternak kecil dan menengah · Melakukan pelatihan pelaporan dan komunikasi risiko secara berkala · Pemantauan kejadian penyakit (surveilans aktif dan pasif) · Pembentukan tim respon cepat dan Melakukan pelatihan secara berkala	Direktorat Kesehatan Hewan

No	Sasaran Program	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
			· Melakukan simulasi kesiagaan darurat PHM secara berkala · Menyiapkan mekanisme percepatan penambahan tenaga kerja ketika ada kebutuhan mendesak (<i>surgin mechanism</i>) · Pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan antar wilayah	
8	Terkendalinya wilayah dari zoonosis & penyimpangan produk hewan	Wilayah zoonosis & penyimpangan produk hewan tidak terkendali	Penjaminan keamanan dan kesehatan produk hewan, pencegahan dan pengendalian zoonosis	Direktorat Kesehatan masyarakat veteriner
9	Terwujudnya tata kelola birokrasi lingkup Ditjen PKH yang baik, transparan, dan akuntabel	· Ketidaktepatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan kinerja · Rendahnya integritas dan etika aparatur dalam pelaksanaan tugas · Tidak optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola	· Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan regulasi keuangan dan kinerja. · Memperkuat peran APIP dan mekanisme review internal sebelum pelaporan. · Penguatan budaya integritas melalui kampanye dan kode etik ASN. · Penerapan <i>Whistleblowing System</i> dan <i>reward-punishment</i> yang konsisten. · Pengembangan sistem informasi manajemen terintegrasi. · Pelatihan literasi digital dan optimalisasi e-office, e-performance, dan	Sekretariat Ditjen PKH

No	Sasaran Program	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
		birokrasi · Kurangnya transparansi dan akses publik terhadap informasi kinerja Ditjen PKH.	e-planning. · Optimalisasi publikasi kinerja melalui website, media sosial, dan laporan publik.- Implementasi keterbukaan informasi publik secara berkala dan mudah diakses.	

Pemetaan risiko Sasaran Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional dapat dilihat pada lampiran.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian memuat program untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pertanian nasional yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah. Implementasi arah kebijakan dan strategi memiliki dampak yang besar terhadap capaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian 2025–2029. Perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian dilakukan mengacu dan menjabarkan RPJMN 2025-2029 dan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 (delapan) misi agenda pembangunan (Asta Cita). Misi Pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama.

Kerangka yang digunakan dalam perumusan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian yaitu rumah strategi. Pendekatan rumah strategi dimulai dengan merumuskan atap (kuning) sebagai tujuan akhir atau visi Kementerian Pertanian yang akan terwujud jika tujuan antara dapat tercapai (merah). Kelima hasil antara dapat tercapai jika ke delapan pilar (hijau) dapat terlaksana. Pelaksanaan kedelapan yang efektif dan efisien perlu didukung oleh fondasi yang kuat (biru). Penjabaran lebih detail mengenai rumah strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029 dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 25. Rumah Strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029

Berdasarkan rumah strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029, tujuan akhir yang ingin diwujudkan adalah “Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia” yang diterjemahkan menjadi Visi Kementerian Pertanian 2025 – 2029.

Oleh karena itu, sebagai wujud komitmen nyata dalam mewujudkan visi Kementerian Pertanian, maka Ditjen PKH merancang Arah Kebijakan dan Kegiatan secara kolaboratif yang berorientasi pada hasil dan berkelanjutan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Arah kebijakan dan kegiatan Ditjen PKH merupakan upaya strategis (*strategic direction*) yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan Ditjen PKH guna mencapai Visi dan Misi Ditjen PKH tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan kegiatan Ditjen PKH disusun berdasarkan kerangka strategis Ditjen PKH yang selaras dengan rumah strategi Kementerian Pertanian, seperti diuraikan pada gambar berikut ini.



Gambar 26. Kerangka Strategis Ditjen PKH tahun 2025-2029

Berdasarkan kerangka strategis Ditjen PKH tahun 2025-2029 di atas, dapat dilihat bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai Ditjen PKH adalah "Peternakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan dan bermanfaat bagi Rakyat Indonesia". Tujuan akhir tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) tujuan antara, yaitu:

- a. Pertumbuhan volume usaha peternakan
- b. Kemandirian pangan asal peternakan berkelanjutan
- c. Nilai tambah dan daya saing produk peternakan
- d. Kesehatan masyarakat dari penyakit hewan dan produk hewan

Untuk mewujudkan tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat) pilar strategis yang harus dilakukan, yaitu:

1. Pilar strategis 1: Ketersediaan akses pasar peternakan

Pilar ini merupakan upaya dalam menyediakan dan/atau memperluas akses pasar peternakan, sehingga dapat meningkatkan pemasaran dan penjualan produk peternakan nasional. Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan dalam pilar strategis 1 ini adalah Arah kebijakan 1: Hilirisasi hasil peternakan bernilai tambah dan berdaya saing

- a. Kegiatan 1.1 : Pengembangan dan perluasan akses pasar domestik bagi pelaku usaha peternakan.
- b. Kegiatan 1.2 : Perluasan pasar ekspor peternakan dalam memperluas *market share* produk peternakan Indonesia.

2. Pilar strategis 2: Budidaya ternak modern, produktif dan berkelanjutan dalam menghasilkan pangan bermutu dan aman

Pilar ini merupakan upaya dalam pelaksanaan budidaya ternak berkelanjutan sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Penerapan *Good Farming Practices*, *Good Breeding Practices* maupun regulasi terkait peternakan dan kesehatan hewan terkait ternak akan dilaksanakan pada pilar strategis 2 ini. Arah kebijakan dan kegiatan pada pilar strategis 2 ini adalah Arah kebijakan 2: Produksi ternak produktif berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan pangan asal ternak nasional

- a. Kegiatan 2.1: Pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) ternak
- b. Kegiatan 2.2: Pembibitan dan produksi ternak berkelanjutan berdasarkan prioritas
- c. Kegiatan 2.3 : Memastikan ketersediaan pakan yang bermutu, aman, dan terjangkau
- d. Kegiatan 2.4 : Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada ternak dalam meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak, termasuk mengurangi susut pangan asal ternak
- e. Kegiatan 2.5 : Penjaminan mutu dan keamanan produk peternakan

3. Pilar strategis 3: Pengolahan hasil peternakan

Hilirisasi merupakan upaya transformatif yang giat dilaksanakan di tingkat nasional. Indonesia tidak lagi diharapkan menjual bahan baku namun menjual produk yang jadi dan siap dikonsumsi masyarakat, termasuk produk peternakan. Proses pengolahan bahan baku pada rantai pasok hulu menjadi produk yang siap konsumsi pada rantai pasok hilir akan meningkatkan nilai ekonomis produk pertanian. Pasca panen dan pengolahan yang tepat adalah proses penting untuk mendekat ke pasar (*close to market*), namun efisiensi rantai pasok adalah isu strategis berbeda. Rantai pasok yang efisien dari peternak menuju ke pengguna akhir (*end customer*) akan memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan peternak karena proses distribusi yang berkurang dan kontrol terhadap harga jual yang meningkat.

Peningkatan daya saing produk peternakan menitikberatkan pada persaingan terhadap produk peternakan sejenis dari negara lain. Penerimaan negara tujuan ekspor terhadap produk peternakan nasional dibanding produk peternakan negara lain merupakan tolok ukur daya saing. Standar mutu yang ketat dan pemenuhan standar teknis lainnya yang dipersyaratkan perlu menjadi perhatian dalam penyiapan dan pemilihan produk serta negara tujuan ekspor.

Pilar strategis hilirisasi hasil peternakan merupakan upaya strategis dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan. Hal ini dilaksanakan antara lain dengan: a) penanganan pasca panen, pengolahan dan diversifikasi produk dengan tujuan meningkatkan nilai tambah; b) integrasi hulu hilir dari penyediaan input produksi, budidaya, pasca panen pengolahan, penjaminan mutu dan pemasaran dengan tujuan memperkuat rantai nilai; c) pengembangan pasar baik domestik maupun ekspor. Hilirisasi hasil peternakan selain meningkatkan nilai tambah dan daya saing peternakan juga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan peternak. Pemerintah mendorong pelaku usaha peternakan melakukan hilirisasi hasil peternakan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas produk peternakan dengan memperhatikan permintaan dan preferensi pasar, serta substitusi produk peternakan impor.

Pengembangan pasca panen, pengolahan dan pemasaran diharapkan juga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan usaha peternakan. Hal ini harus didukung dengan upaya peningkatan investasi di bidang peternakan terintegrasi yang memanfaatkan produksi dalam negeri. Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan pada pilar hilirisasi hasil peternakan adalah Arah Kebijakan 3: Hilirisasi hasil peternakan bernilai tambah dan berdaya saing

- a. Kegiatan 3.1 : Pengolahan produk peternakan berbasis hilirisasi
- b. Kegiatan 3.2 : Meningkatkan kualitas produk ekspor peternakan dalam memenuhi permintaan ekspor pangan asal peternakan.

4. Pilar strategis 4: Sistem Kesehatan Hewan Nasional

Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu. Penyelenggaraan Siskeswanas merupakan salah satu upaya kesehatan melalui Kementerian Pertanian untuk berkontribusi menjaga kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit hewan menular, *Zoonosis*, keamanan produk hewan serta menekan resiko penyebaran penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia, produksi pangan asal hewan, dan ketahanan pangan nasional. Siskeswanas terdiri atas subsistem kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, karantina hewan, penelitian dan pengembangan kesehatan hewan, sumber daya kesehatan hewan, informasi kesehatan hewan dan peran serta masyarakat.

Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan pada pilar strategis 4 ini adalah Arah Kebijakan 4: Penegakan Sistem Kesehatan Hewan Nasional:

- a. Kegiatan 4.1: Kesiapsiagaan dari penularan penyakit hewan dan Produk Hewan
- b. Kegiatan 4.2: Ketahanan dari penularan penyakit hewan
- c. Kegiatan 4.3: Kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap *zoonosis*, keamanan dan kesehatan produk hewan

5. Pondasi strategis: SDM, Kelembagaan, dan Reformasi Birokrasi Ditjen PKH

Pondasi strategi merupakan dasar yang menopang berdirinya seluruh pilar strategis. Dalam konteks strategi, pondasi strategis merupakan *strategic assets* atau aset strategis yang harus dimiliki organisasi. Pilar strategis dalam kerangka strategi Ditjen PKH ini terdiri atas SDM, organisasi dan kelembagaan Ditjen PKH maupun tata kelola birokrasi Ditjen PKH.

Arah Kebijakan dan Kegiatan yang dilakukan pada Pondasi Strategis ini adalah Arah Kebijakan 5: Birokrasi Ditjen PKH yang transparan dan akuntabel:

- a. Kegiatan 5.1: Mengembangkan modal manusia (*human capital*) SDM Ditjen PKH yang produktif.
- b. Kegiatan 5.2: Mengembangkan tata kelola organisasi Ditjen PKH yang tepat fungsi dan ukuran.
- c. Kegiatan 5.3: Mendukung pelaksanaan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Ditjen PKH.
- d. Kegiatan 5.4: Memberikan layanan internal yang berkualitas dan berbasis digital.

3.3 Proyek Strategis Nasional (PSN): Peningkatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN)

Dalam rangka substitusi impor susu dan mewujudkan swasembada daging, guna menjamin ketahanan pangan nasional, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri, serta mendorong peningkatan kesejahteraan peternak, perlu dilakukan percepatan produksi susu dan daging nasional. Hal ini sebagai upaya mewujudkan asta cita dalam mengusung visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Percepatan peningkatan produksi susu dan daging nasional masuk dalam indikasi PSN dalam RPJMN 2025-2029. Program ini dapat dicapai dengan penambahan populasi sapi perah dan sapi pedaging dengan mendorong pelaku usaha lokal maupun luar negeri untuk berinvestasi, utamanya dengan indukan sapi perah dan sapi pedaging.

a. Arah Kebijakan 1: Pengembangan investasi peternakan sapi perah dan sapi pedaging

- 1) Kegiatan : Promosi investasi peternakan
- 2) Kegiatan : Kemudahan dalam perizinan
- 3) Kegiatan : Fasilitasi insentif usaha peternakan
- 4) Kegiatan : Pendampingan dan identifikasi lokasi untuk investasi
- 5) Kegiatan : Pendampingan pembiayaan investasi dan mitigasi risiko usaha
- 6) Kegiatan : Pendampingan kerjasama usaha/kemitraan
- 7) Kegiatan : Pengembangan usaha peternakan dan kelembagaan kelompok peternak

b. Arah Kebijakan 2: Penyediaan Informasi Lahan dan Pemanfaatannya

- 1) Kegiatan : Penyediaan informasi lahan
- 2) Kegiatan : Fasilitasi kemudahan dan pendampingan proses pemanfaatan lahan

c. Arah Kebijakan 3: Pengembangan Hilirisasi peternakan sapi perah dan sapi pedaging

- 1) Kegiatan : Pendampingan penyerapan SSDN dan akses pasar pelaku usaha UMKM
- 2) Kegiatan : Pendampingan pasca panen dan pengolahan susu

- d. Arah Kebijakan 4: Kemudahan importasi sapi perah dan sapi pedaging
- 1) Kegiatan : Peningkatan kerjasama dan sumber sapi dengan negara sumber
 - 2) Kegiatan : Kemudahan dan pendampingan importasi sapi perah dan sapi pedaging.

3.4 Kontribusi Ditjen PKH terhadap Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) dalam RPJMN

Tabel 6. Kontribusi Ditjen PKH Terhadap Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) dalam RPJMN

NO	PN/PP / KP	KONTRIBUSI
		DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Prioritas Nasional (PN) 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
	Program Prioritas (PP) 10: Swasembada Pangan	
	Kegiatan Prioritas (KP) 10: Pengembangan Pangan Hewani	
1	KP 02.10.10 Produksi Daging (Sapi dan kerbau, kambing dan domba, babi, ayam ras, itik)	IKP 5.1 Produksi Daging
2	KP 02.10.10 Produksi Telur	IKP 5.2 Produksi telur
3	KP 02.10.10 Produksi Susu	IKP 5.3 Produksi susu
	Kegiatan Prioritas (KP) 13: Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Penjaminan Mutu dan keamanan Pangan	
4	KP 02.10.13 Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu	IKK1.1 Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar
5	KP 02.10.13 Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan	IKP 7.1 Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan
	KP 18: Pengembangan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	
6	KP 02.10.18 Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	IKP 02.10.18 Jumlah varietas/galur unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas
	PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.	
	PP 14: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	
	KP 01: Penguatan Surveilans, Pengendalian KLB/wabah dan Penanganan Bencana	

NO	PN/PP / KP	KONTRIBUSI
		DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
7	KP 04.14.01 Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan	IKK 2.2 Jumlah Kab/Kota yang dapat menekan kasus Rabies pada hewan

3.5 Kerangka Regulasi

Sub bab kerangka regulasi ini menjelaskan mengenai gambaran umum regulasi yang dibutuhkan oleh Ditjen PKH dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Program Ditjen PKH dalam rangka mendukung Sasaran Strategis Kementerian Pertanian. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Ditjen PKH dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Kerangka Regulasi Ditjen PKH

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR/DPD/ Pemerintah	2029
2	R-Perpres: Sistem Kesehatan Hewan Nasional			seluruh K/L terkait	
3	R-INPRES tentang Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN) Dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan	Percepatan Produksi Daging dan Susu Nasional		seluruh K/L terkait	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4	R-Permentan tentang Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pendelegasian PP No. 28 Tahun 2025	Ditjen PKH untuk subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	BKPM, Kemenko Perekonomian, Kemenko Pangan, Biro Hukum Kementerian Pertanian	2025
5	R-Permentan tentang Impor Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pendelegasian PP No. 28 Tahun 2025	Ditjen PKH untuk subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kementerian Perdagangan, Kemenko Perekonomian, Kemenko Pangan, Bappanas, Biro Hukum Kementan	2025-2026
6	R-Permentan tentang Ekspor Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pendelegasian PP No. 28 Tahun 2025	Ditjen PKH untuk subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kementerian Perdagangan, Kemenko Perekonomian, Kemenko Pangan, Bappanas, Biro Hukum Kementan	2025-2026
7	R-Permentan tentang Pelayanan Veteriner	Pendelegasian PP No. 28 Tahun 2025	Ditjen PKH untuk subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan dan K/L terkait	2025-2026
8	R- Permentan tentang Pengawasan PB dan PBUMKU peternakan dan Kesehatan Hewan	Pendelegasian PP No. 28 Tahun 2025	Ditjen PKH untuk subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	BKPM, Kemenko Perekonomian, Kemenko Pangan, Biro Hukum Kementerian Pertanian	2025-2025

3.6 Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga, struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Penyusunan kerangka kelembagaan Ditjen PKH dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan, kontribusi dan peran Ditjen PKH dalam mencapai Visi Kementerian Pertanian serta agenda pembangunan jangka panjang pada RPJPN, prioritas pembangunan pada RPJMN, dan Visi Misi Presiden. Penyusunan kerangka kelembagaan Ditjen PKH juga mengacu kepada kebijakan pembangunan, peraturan perundangan undangan dan memperhatikan prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan.

Kerangka kelembagaan Ditjen PKH disusun melalui serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pemangku kepentingan di lingkungan Ditjen PKH. Kegiatan FGD dilakukan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait SOTK saat ini dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi pada periode Renstra 2025-2029. Permasalahan-permasalahan terkait SOTK tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menyusun desain kriteria (*criteria design*) organisasi yang baru. Berikut adalah permasalahan terkait SOTK saat ini:

1. Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan belum menyatakan secara eksplisit unit kerja khusus yang melaksanakan tata kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan, sehingga saat ini tata kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan dilakukan secara parsial di masing-masing unit eselon I teknis.
2. Pelaksanaan sertifikasi standar (*mandatory*) mutu dan keamanan pangan dilakukan oleh unit teknis.
3. Belum ada unit kerja khusus yang menangani penerapan teknologi *digital farming* menuju pertanian maju dan modern.
4. Pelaksanaan fungsi sebenarnya dari Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diperuntukkan hanya untuk hewan ternak, belum ada otoritas veteriner khusus setingkat UKE1.

Lebih jelasnya terkait permasalahan terkait SOTK saat ini dan desain kriteria organisasi yang baru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Permasalahan terkait SOTK dan Desain kriteria Ditjen PKH

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	Belum ada unit kerja khusus dalam melaksanakan tata kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan	Butuh unit kerja dengan kewenangan setingkat eselon I di bawah Menteri yang melaksanakan tata kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan
2	Penjaminan mutu dan keamanan pangan dilakukan secara desentralisasi	Butuh unit kerja dengan kewenangan setingkat eselon II di bawah 1 (satu) unit kerja eselon I yang menangani penjaminan mutu dan keamanan pangan secara terpusat (sentralisasi)
3	Belum ada unit kerja khusus yang menangani adopsi teknologi <i>digital farming</i> menuju pertanian maju dan modern	Butuh Unit Kerja setingkat Eselon I yang menangani adopsi teknologi <i>digital farming</i> menuju pertanian maju dan modern
4	Pelaksanaan fungsi sebenarnya dari Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diperuntukkan hanya untuk hewan ternak, belum ada otoritas veteriner khusus setingkat UKE 1	Butuh Unit Kerja setingkat Eselon I sebagai Otoritas Veteriner Nasional

Desain kriteria organisasi Ditjen PKH disusun berdasarkan kebutuhan Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2025-2029. Desain kriteria organisasi Ditjen PKH bukan merupakan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Pertanian. Untuk menghasilkan struktur organisasi Kementerian Pertanian yang ideal, diperlukan analisis lebih lanjut di luar dokumen Renstra Kementerian Pertanian.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah pencapaian yang diharapkan sebagai hasil akhir dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Target ini mencerminkan ukuran atas keberhasilan yang ingin dicapai organisasi, yang meliputi: Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Dengan menetapkan target kinerja yang jelas, organisasi dapat memantau perkembangan, mengukur keberhasilan, dan melakukan evaluasi yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan/program yang dilaksanakan selaras dengan rencana strategis yang telah disusun.

Target kinerja Ditjen PKH disusun melalui serangkaian FGD dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk menyepakati Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK) beserta indikator kinerja (IKP dan IKK) beserta target. Penentuan SP, SK, IKP, dan IKK Ditjen PKH dilakukan dengan mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Pertanian, dan mempertimbangkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta RPJMN dan RPJPN. Berikut adalah SP, SK, IKP, dan IKK Ditjen PKH yang telah disepakati:

Tabel 9. Target Kinerja Ditjen PKH 2025-2029

No	Sasaran Program (SP)	Kode IKSP	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP 1	Meningkatnya indeks harga yang diterima Peternak	IKSP 1	Indeks harga yang diterima Peternak (indeks)	124,75	126,62	128,52	130,45	132,41
SP 2	Terpenuhinya produksi komoditas peternakan	IKSP 2	Produksi Daging (juta ton)	4,97	5,12	5,28	5,44	5,60
			Produksi Telur (juta ton)	7,436	7,753	8,085	8,432	8,795
			Produksi Susu (ribu ton)	866,285	893,960	922,448	939,554	943,637
SP 3	Terjaminnya mutu komoditas peternakan	IKSP 3	Indeks Mutu komoditas peternakan (indeks)	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57
SP 4	Terjaminnya keamanan komoditas peternakan	IKSP 4	Indeks keamanan komoditas peternakan (indeks)	0,61	0,63	0,66	0,68	0,69
SP 5	Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan yang siap digunakan	IKSP 5	Volume ekspor komoditas peternakan (ton)	499.432	514.415	540.136	567.143	595.500

No	Sasaran Program (SP)	Kode IKSP	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP 6	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	IKSP 6	Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan (indeks)	0,2	0,4	0,6	0,8	1
SP 7	Terkendalnya wilayah atau kawasan dari penyakit hewan	IKSP 7	Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan (%)	80	80,3	80,6	85	90
SP 8	Terkendalnya wilayah dari zoonosis dan penyimpangan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia	IKSP 8	Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis dan penyimpangan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia (%)	41	41,5	42	42,5	43
SP 9	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baik, transparan dan akuntabel	IKSP 9	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen PKH	0,885	0,887	0,891	0,895	0,899

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan salah satu komponen krusial dalam Renstra Ditjen PKH tahun 2025-2029. Kerangka ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kerangka pendanaan ini mencakup sumber pendanaan APBN yang meliputi Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Hibah luar negeri.

Melalui kerangka pendanaan yang komprehensif, Ditjen PKH berkomitmen untuk mencapai visi dan misinya dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan hewan di Indonesia selama periode 2025-2029. Target kinerja dan kerangka pendanaan Ditjen PKH dapat dilihat pada tabel target kinerja dan kerangka pendanaan Ditjen PKH 2025-2029 pada lampiran.

BAB V PENUTUP

Renstra Ditjen PKH tahun 2025-2029 disusun sebagai panduan strategis dalam mewujudkan visi “Peternakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan, dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia”. Renstra ini telah dirancang dengan mengacu pada kerangka pembangunan nasional, termasuk RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian Pertanian, serta Asta Cita sebagai landasan kebijakan pembangunan pertanian. Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang di subsektor peternakan dan kesehatan hewan, Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kontribusi Ditjen PKH terhadap pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

Melalui implementasi Renstra ini, Ditjen PKH berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara terukur, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Ditjen PKH siap menghadapi dinamika global dan lokal, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Renstra ini dapat menjadi langkah strategis dalam mencapai kemajuan sub sektor peternakan dan kesehatan hewan yang lebih baik di masa depan.

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



AGUNG SUGANDA
NIP 197611252003121001

LAMPIRAN

Tabel 1. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Difjen PKH 2025-2029

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
				Kementerian Pertanian										
SS 1	Meningkatnya pendapatan petani								31.894.909,14					
IKSS 1.1	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)			123,64	125,02	126,42	127,8	129,27		40.145.000		60.416.429,5		
IKSS 1.2	Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian	%		3,5	3,8	4	3,6	3,3						
SS 2	Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan													
IKSS 2.1	Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas	%		66	68	68	70	72						
SS 3	Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian													
IKSS 3.1	Market share produk ekspor pertanian	%		2,65	2,7	2,75	2,8	2,85						
SS 4	Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan													
IKSS 4.1	Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan			0,23	0,41	0,66	0,84	1						
SS 5	Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian	%												
IKSS 5.1	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi	%		90	92	92	93	95						

Sasaran Program (Outcome/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan n	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SS 6	Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia											
IKSS 6.1	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia	%	2,7	2,7	2,7	2,7	1,7					
SS 7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi											
IKSS 7.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian		86,98	88,17	89,77	90,67	91,28					
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN												
SP.6	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baik, transparan dan akuntabel							486.232,71	560.150,537	651.619,82	696.115,69	704.729,66
IKP 6.1	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen PKH	Indeks	0,885	0,887	0,891	0,895	0,899	486.232,71	560.150,537	651.619,82	696.115,69	704.729,66

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1787 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIK LAINNYA DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN													
SK 1	Ditundaknya/nya hasil temuan pengawas internal dan eksternal								2.129,828	3.262,41	3563,368	3564,181	3764,208
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH	%	94,15	94,15	94,25	94,35	94,45	94,5					
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal												
RO	EBD Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	63	11	7	7	7	7	2.129,828	1.463,868	1.484,74	1.484,74	1.484,74
RO	EBD Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kantor Daerah	Dokumen	RO baru	0	28	28	28	28		167,34	232,493	233,306	433,333
IKK 1.2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH	%	85	85	85,5	86	86,5	87					
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal												
RO	EBD Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	63	0	8	8	8	8		1.463,87	1.484,74	1.484,74	1.484,74
RO	EBD Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kantor Daerah	Dokumen	RO baru	0	28	28	28	28		167,34	361,4	361,4	361,4
SK 2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian								13.704,846	1.859	2.643,22	4.365,28	5.575,22

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKK 2.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKH	Nilai	90,67	90,7	90,75	90,8	90,85	90,9					
KRO EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal												
RO EBD Z26 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	239	1	1	1	1	1	7.078,706	400	450	460	470
RO EBD Z27 Layanan Manajemen Keuangan Kantor Daerah/Provinsi	Layanan	RO baru	0	61	61	61	61	0	1.159	1.564,33	2.876,39	3.876,33
RO EBD 952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	396	13	0	0	0	0	6.138,64				
KRO EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal												
RO EBA 956 Layanan BMN	Layanan	131	240	0	0	0	0	487,496				
RO EBA Z06 Layanan BMN	Layanan	RO baru	1	1	1	1	1	0	300	628,89	1028,89	1228,89
SK 3 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen/Badan di lingkungan Kementerian Pertanian								450.699,732	545.355,29	627.961,38	666.734,38	671.828,38
IKK 3.24 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen PKH	Skala likert	3,626	3,626	3,631	3,636	3,641	3,646					
KRO EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal												
RO EBA 957 Layanan Hukum	Layanan	1	1	0	0	0	0	3.060,487				
RO EBA Z01 Layanan Hukum	Layanan	RO baru	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
RO EBA 958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	5	1	0	0	0	0	133,21				

	Sasaran/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	EBA 202 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	RO baru	0	1	1	1	1		276,155	471,86	321,86	521,86
RO	EBA 963 Layanan Data dan Informasi	Layanan	37	39	39	39	39	39	3.239,495	3.340,09	3.647,35	6.757,35	6.875,35
RO	EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	23	1	0	0	0	0	950				
RO	EBA 208 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	RO baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	EBA 969 Layanan Bantuan Hukum	Layanan	1	6	0	0	0	0	150,416	0	0	0	0
RO	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	47	45	1	1	1	1	443.166,122	541.739	623.842	659.655	664.431
SK 4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Dipten PKH								19.698,304	9.674	17.452	21.452	23.562
IKK 4.1	Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Dipten PKH	Skala likert	3,28	3,28	3,3	3,35	3,4	3.45					
KRO	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal												
RO	EBA 962 Layanan Umum	Layanan	2	28	1	1	1	1	15.921,755	8.673,85	13.405	14.405	15.515
KRO	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
RO	EBB 951 Layanan Sarana Internal	Unit	14	1	3	6	6	6	1.500	500	1.500	1.500	1.500
KRO	EBC Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia Internal												

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EBC 954 Layanan Manajemen SDM	Orang	RO baru	1823					2.276,549				
EBC Z13 Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	Orang	RO baru	0	125	3.040	3.133	3.236		500	2.547	5.547	6.547

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Satuan	Basislin e	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS													
SP. 5. Terpenuhinya produksi komoditas peternakan									754.780,36	614.719,345	5.798.855,18	5.897.637,87	6.086.335,23
IKP 5.1. Produksi Daging	Juta ton	4,814	4,972	5,122	5,277	5,437	5,602	571.715,402	574.575,192	4.817.436,88	4.898.226,69	5.029.567,43	
IKP 5.2. Produksi Telur	Juta ton	6,668	7,436	7,753	8,085	8,432	8,795	165.811,749	31.338,682	82.937,4	82.937,4	92.937,4	
IKP 5.3. Produksi Susu	Ribu ton	808,35	866,285	893,96	922,448	939,554	943,637	948	643,316	593.320,39	584.345,78	617.065,4	
SP. 6. Terjaminnya keamanan komoditas peternakan								14.543,99	5.553,155	51.287	55.086	59.453	
IKP 6.1. Indeks Keamanan komoditas peternakan	Indeks	0,488	0,613	0,634	0,656	0,678	0,695	14.543,99	5.553,155	51.287	55.086	59.453	
SP 7. Terkendalinya wilayah atau kawasan dari penyakit hewan								0	0	154.857,51	172.120	172.120	
IKP 7.1. Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan	%	80	80	80,3	80,6	85	90	0	0	154.857,51	172.120	172.120	
SP 8. Terkendalinya wilayah dari zoonosis dan penyimpangan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia								1.761,22	2.609	99.016	104.922	115.192	
IKP 8.1. Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis dan penyimpangan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia	%	40,5	41	41,5	42	42,5	43	1.761,22	2.609	99.016	104.922	115.192	

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline me	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1783 PENINGKATAN PRODUKSI PAKAN TERNAK													
SK.1	Terpenuhinya kebutuhan pakan ternak yang bermutu dan aman untuk produksi daging, telur dan susu								1.294,71 ³	3.047,338	835.189,6	844.255,88	822.283,72
IKK 1.1	Persentase pemenuhan pakan ternak terhadap kebutuhan populasi ternak untuk produksi daging	%	93,45	93,94	94,29	94,64	95,01	95,34	1.294,71 ³	3.047,338	373.900	400.340	359.118,51
KRO	QEG Bantuan Peralatan/Sarana								0	0	339.100	365.540	323.719
RO	QEG.001 Bantuan Hijauan Pakan Ternak	Ha	RO baru	0	0	260	400	425	0	0	335.600	364.000	320.044
RO	QEG.002 Bantuan pakan olahan/bahan pakan	Ton	RO baru	0	0	500	220	525	0	0	3.500	1.540	3.675
KRO	RAg Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup								0	0	27.500	27.500	27.500
RO	RAg.003 Hijauan Pakan Ternak	Unit	RO baru	0	0	5	5	5	0	0	15.000	15.000	15.000
RO	RAg.004 Pakan Olahan dan Bahan Pakan	Unit	RO baru	0	0	5	5	5	0	0	12500	12500	12500
KRO	AEA Koordinasi								1.119,01 ¹	2.647	4.400	4.400	4.400
RO	AEA.001 Koordinasi pakan	Kegiatan ⁿ	1	5	3	4	4	4	1.119,01 ¹	2.647	2.400	2.400	2.400
	AEA.002 Koordinasi penjaminan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan	Kegiatan ⁿ	RO baru	0	0	4	4	4	0	0	2.000	2.000	2.000
KRO	AFA Norma. Standar. Prosedur dan Kriteria								175,702	400	500	500	500
RO	AFA.001 NSPK pakan	NSPK	4	4	0	0	0	0	175,702	0	0	0	0
RO	AFA.002 NSPK bidang pakan/bahan pakan	NSPK	RO baru	0	2	2	2	2	0	400	500	500	500

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Basis line	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat							0	0	2.400	2.400	3.000	
RO	QDC.001 Fasilitasi dan pembinaan produsen pakan/bahan pakan	Produse n	RO baru	0	0	40	40	50	0	0	2.400	2.400	3.000
IKK 1.2	Persentase pemenuhan pakan ternak terhadap kebutuhan populasi ternak untuk produksi telur	%	100	100	100	100	100	100	0	0	2.600	2.600	2.600
KRO	AEA Koordinasi								0	0	1.600	1.600	1.600
RO	AEA.001 Koordinasi penjaminan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan	Kegiatan n	RO baru	0	1	4	4	4	0	0	1.600	1.600	1.600
KRO	AFA Norma. Standar. Prosedur dan Kriteria								0	0	500	500	500
RO	AFA.001 NSPK bidang pakan/bahan pakan	NSPK	RO baru	0	1	2	2	2	0	0	500	500	500
KRO	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat								0	0	500	500	500
RO	QDC.001 Fasilitasi dan pembinaan produsen pakan/bahan pakan	Produse n	RO baru	0	0	25	25	25	0	0	500	500	500
IKK 1.3	Persentase pemenuhan pakan ternak terhadap kebutuhan populasi ternak untuk produksi susu	%	85,26	85,43	86,6	87,9	88,5	89,94	0	0	446,372,99	427,995,88	445,415
KRO	QEG Bantuan Peralatan/Sarana								0	0	369,372,99	388,059,68	390,000
RO	QEG.001 Bantuan Hijauan Pakan Ternak	Ha	RO baru	0	0	500	400	550	0	0	355,373	381,060	383,000
RO	QEG.002 Bantuan pakan olahan/bahan pakan	Ton	RO baru	0	0	2.000	1.000	2.000	0	0	14.000	7.000	7.000
KRO	RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								0	0	58.900	25.000	29.900

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO RAQ.003 Hijauan Pakan Ternak	Unit	RO baru	0	0	10	5	5	0	0	28.900	12.500	14.900
RO RAQ.004 Pakan Olahan dan Bahan Pakan	Unit	RO baru	0	0	10	5	5	0	0	30.000	12.500	15.000
KRO AEA Koordinasi								0	0	1.600	1.600	1.600
RO AEA.001 Koordinasi penjaminan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan	Kegiatan	RO baru	0	1	4	4	4	0	0	1.600	1.600	1.600
KRO AFA Norma. Standar. Prosedur dan Kriteria								0	0	500	500	500
RO AFA.001 NSPK bidang pakan/bahan pakan	NSPK	RO baru	0	1	2	2	2	0	0	500	500	500
KRO QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat								0	0	16.000	12.836	23.415
RO QDC.001 Fasilitasi dan pembinaan produsen pakan/bahan pakan	Produsen	RO baru	0	0	40	40	50	0	0	16.000	12.836	23.415
IKK 1.4 memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pakan terhadap total pakan ternak untuk produksi daging, telur dan susu	%	86.21	100	100	100	100	100	0	0	12.316,61	13.320	15.150,21
KRO AEA Koordinasi								0	0	6.340	7.170	8.000
RO AEA.001 Koordinasi penjaminan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan		RO baru	0	0	9	9	9	0	0	6.340	7.170	8.000
KRO RAQ Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup								0	0	2.500	2.500	2.850
RO RAQ.005 Sarana penjaminan mutu dan keamanan pakan		RO baru	0	0	5	5	5	0	0	2.500	2.500	2.850

Susunan Program (Outcome)/Susunan Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Basis Perhitungan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KRO AFA Norma. Standar. Prosedur dan Kriteria								0	0	227	400	600	
RO AFA.002 NSPK penjaminan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan		RO baru	0	0	10	10	10	0	0	227	400	600	
KRO ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan								0	0	249,61	250	250,21	
RO ABR.002 Kebijakan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan		RO baru	0	0	1	1	1	0	0	249,61	250	250,21	
KRO QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat								0	0	3.000	3.000	3.450	
RO QDC.002 Fasilitasi dan pembinaan penjaminan mutu dan keamanan pakan		RO baru	0	0	20	20	20	0	0	3.000	3.000	3.450	
SK.2 Terpenyubinya bahan pakan sumber energi dalam negeri berdasarkan kebutuhan bahan pakan untuk produksi Daging dan Telur								0	0	1.550	1.605	1.860	
IKK. 2.1 Persentase bahan pakan sumber energi dalam negeri terhadap total bahan pakan untuk produksi Daging dan Telur		%	72	73	75	76	78	79	0	0	1.550	1.605	1.860
KRO AEA Koordinasi								0	0	500	500	700	
RO AEA.003 Koordinasi pemanfaatan bahan pakan ternak sumber energi dalam negeri		Kegiatan baru	0	0	10	10	10	0	0	500	500	700	
KRO ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan								0	0	500	500	500	
RO ABR.001 Kebijakan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan		Rekomendasi Kebijakan baru	0	0	2	2	2	0	0	500	500	500	

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KRO FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah FBA.001 Fasilitasi dan pembinaan Pemda dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bahan pakan ternak sumber energi dalam negeri	Daerah (Prov/K ab/Kota)	RO baru	0	0	11	11	11	0	0	550	605	660
SK.3 Terperuhnya mutu dan Keamanan Pakan Ternak								4.634,5	3.563	30.000	33.000	34.000
IKK.3 .1 Persentase pengujian mutu dan keamanan pakan ternak yang dapat dilaksanakan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian	%	75	78	81	84	87	90	4.635	3.563	30.000	33.000	34.000
KRO QJA Penyidikan dan Pengujian Produk								4.634,5	3.563	30.000	33.000	34.000
RO QJA 001 Pengujian mutu dan keamanan pakan/bahan pakan	Produk	343	3.887	1.782	5.000	5.500	6.000	4.634,5	3.563	30.000	33.000	34.000
SK.4 Tersedianya hijauan pakan ternak dalam memenuhi permintaan dari peternak								0	0	77.000	70.000	84.000
IKK 4.1 Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Indrapuri	%		75%	80%	85%	90%	95%	0	0	11.000	10.000	12.000
KRO RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								0	0	11.000	10.000	12.000
RO RAG.002 Hijauan Pakan Ternak di UPT	Unit	1	0	0	1	1	1	0	0	11.000	10.000	12.000
IKK 4.2 Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap	%		75%	80%	85%	90%	95%	0	0	11.000	10.000	12.000

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KRO								0	0	11.000	10.000	12.000
RO	Unit	1	0	0	1	1	1	0	0	11.000	10.000	12.000
IKK 4.3	%		75%	80%	83%	85%	90%	0	0	11.000	10.000	12.000
KRO								0	0	11.000	10.000	12.000
RO	Unit	1	0	0	1	1	1	0	0	11.000	10.000	12.000
IKK 4.4	%		75%	80%	85%	90%	95%	0	0	11.000	10.000	12.000
KRO								0	0	11.000	10.000	12.000
RO	Unit	1	0	0	1	1	1			11.000	10.000	12.000
IKK 4.5	%		75%	80%	83%	86%	90%	0	0	11.000	10.000	12.000
KRO								0	0	11.000	10.000	12.000

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Basell ne	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	RAG.002 Sarana Pakan Hijauan di UPT	Unit	1	0	0	1	1	1	0	0	11.000	10.000	12.000
IKK 4.6	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Denpasar	%		75	80	85	90	95	0	0	11.000	10.000	12.000
KRO	RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								0	0	11.000	10.000	12.000
RO	RAG.002 Sarana Pakan Hijauan di UPT	Unit	1	0	0	1	1	1	0	0	11.000	10.000	12.000
IKK 4.7	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Pelahari	%		75	80	85	90	95	0	0	11.000	10.000	12.000
KRO	RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								0	0	11.000	10.000	12.000
RO	RAG.002 Sarana Pakan Hijauan di UPT	Unit	1	0	0	1	1	1	0	0	11.000	10.000	12.000
SK.5	Tersedianya pakan ternak yang bermutu dan aman dalam memenuhi kebutuhan pakan			0	281	50	60	70	0	8.010	100.000	100.000	130.000
IKK 5.1	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Indrapuri	%		100%	100%	100%	100%	100%	0	890	10.000	10.000	13.000
KRO	RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								0	890	10.000	10.000	13.000
RO	RAG.001 Sarana Pakan/bahan pakan	Unit	1	0	9	5	6	7	0	890	10.000	10.000	13.000

Sasaran Program (Outcome/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator)	Satuan	Basil ne	Target							Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
IKK 5.2 Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Padang Mengatas	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	795,205	10.000	10.000	13.000	
KRO RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup									0	795,205	10.000	10.000	13.000	
RO RAG.001 Sarana Pakan/bahan pakan	Unit	1	0	14	5	6	7		0	795,205	10.000	10.000	13.000	
IKK 5.3 Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Siborongborong	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	1.813,5	10.000	10.000	13.000	
KRO RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup									0	1.813,5	10.000	10.000	13.000	
RO RAG.001 Sarana Pakan/bahan pakan	Unit	1	0	5	5	6	7		0	1.813,5	10.000	10.000	13.000	
IKK 5.4 Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Sembawa	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	465,488	10.000	10.000	13.000	
KRO RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup									0	465,488	10.000	10.000	13.000	
RO RAG.001 Sarana Pakan/bahan pakan	Unit	1	0	4	5	6	7		0	465,488	10.000	10.000	13.000	
IKK 5.5 Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Baturraden	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	980	10.000	10.000	13.000	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Basis me	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KRO	RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								0	980	10.000	10.000	13.000
RO	RAG.001 Sarana Pakan/bahan pakan	Unit	1	0	3	5	6	7	0	980	10.000	10.000	13.000
IKK 5.6	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Denpasar	%		100%	100%	100%	100%	100%	0	832,204	10.000	10.000	13.000
KRO	RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								0	832,204	10.000	10.000	13.000
RO	RAG.001 Sarana Pakan/bahan pakan	Unit	1	0	6	5	6	7	0	832,204	10.000	10.000	13.000
IKK 5.7	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Pelaihari	%		100%	100%	100%	100%	100%	0	602,522	10.000	10.000	13.000
KRO	RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								0	602,522	10.000	10.000	13.000
RO	RAG.001 Sarana Pakan/bahan pakan	Unit	1	0	2	5	6	7	0	602,522	10.000	10.000	13.000
IKK 5.8	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BIB Lembang	%		100%	100%	100%	100%	100%	0	716,081	10.000	10.000	13.000
KRO	RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								0	716,081	10.000	10.000	13.000
RO	RAG.001 Sarana Pakan/bahan pakan	Unit	1	0	8	5	6	7	0	716,1	10.000	10.000	13.000

	Sasaran Program (Outcome/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator)	Satuan	Basis no	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKK 5.9	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BBIB Singosari	%		100%	100%	100%	100%	100%	0	500	10.000	10.000	13.000
KRO	RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								0	500	10.000	10.000	13.000
RO	RAG.001 Sarana Pakan/bahan pakan	Unit	1	0	3	5	6	7	0	500	10.000	10.000	13.000
IKK 5.10	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BET Cipelang	%		100%	100%	100%	100%	100%	0	415	10.000	10.000	13.000
KRO	RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								0	415	10.000	10.000	13.000
RO	RAG.001 Sarana Pakan/bahan pakan	Unit	1	0	227	5	6	7	0	415	10.000	10.000	13.000

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1784 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN													
SK.1 Meningkatnya perlindungan ternak dari PHMS									337.690,941	463.614,602	2.153.659,68	2.233.306,99	2.310.000
IKK 1.1 Presentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi daging	%		72	72	72	72	72	233.869,356	429.380,33	761.814,178	813.346,499	882.689,01	
KRO AEA Koordinasi	%							748	1.308,545	10.748	10.848	10.948	
RO AEA.001 Koordinasi Kesehatan Hewan	Kegiatan	2	2	3	2	2	2	748	1.308,545	748	748	748	
RO AEA.002 Koordinasi Kesehatan Ternak	Kegiatan	RO baru	-	0	94	94	94	0	0	9.400	9.400	9.400	
RO AEA.003 Koordinasi deteksi dan respon cepat	Kegiatan	RO baru	-	0	1	1	1	0	0	600	700	800	
RO AEA.004 Koordinasi pengawasan mutu dan keamanan obat hewan yang beredar	Kegiatan	RO baru											
KRO AFA Norma. Standar. Prosedur dan Kriteria								100	200	2.200	2.200	2.200	
RO AFA.001 NSPK Kesehatan Hewan	NSPK	7	3	2	4	4	4	100	200	400	400	400	
RO AFA.002 NSPK pengendalian dan penanggulangan penyakit	NSPK	RO baru	-	0	2	2	2	0	0	400	400	400	
RO AFA.003 NSPK deteksi dan respon cepat kejadian penyakit hewan	NSPK	RO baru	-	0	2	2	2	0	0	400	400	400	
RO AFA.004 NSPK layanan kefarmasian dan sumberdaya kesehatan hewan	NSPK	RO baru	-	0	2	2	2	0	0	400	400	400	
RO AFA.005 NSPK perlindungan hewan ternak dari PHMS	NSPK	RO baru	-	0	2	2	2	0	0	400	400	400	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	AFA.006 NSPK obat hewan dan alat kesehatan hewan	NSPK	RO baru	-	0	1	1	1	0	0	200	200	200
KRO	QAH Pelayanan Publik Lainnya								103.628	125.000	196.388	247.832	317.074
RO	QAH.001 Layanan Kesehatan Hewan	Layanan	4.506.784	492.923	4.219.411	7.244.000	9.149.320	13.010.150	103.628	125.000	195.588	247.032	316.274
RO	QAH.002 Layanan pencegahan dan pemberantasan PHMS pada ternak	Layanan	RO baru	-	0	2	2	2	0	0	800	800	800
RO	QAH.003 Layanan pengawasan obat hewan	Layanan	RO baru										
KRO	RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			-	7	8	9	11	34.127,78	99.492,039	536.000	536.000	536.000
RO	RAG.001 Sarana Bidang Kesehatan Hewan	Unit	2	0	0	1	1	1	0	0	268.000	268.000	268.000
RO	RAG.004 Sarana Laboratorium Kesehatan Hewan Infeksi RO baru dan zoonosis untuk kesehatan semua	Unit	RO baru	0	1	0	0	0	0	41.113,269	0,00	0,00	0,00
RO	RAG.005 Sarana laboratorium terpadu produksi dan pengembangan obat hewan nasional	Unit	RO baru	0	1	0	0	0	0	58.378,77	0	0	0
RO	RAG.007 SBSN Sarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia	Unit	1	1	0	0	0	0	16.466,58	0	0	0	0
RO	RAG.008 SBSN Sarana Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan, Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah	Unit	1	1	0	0	0	0	17.661,2	0	0	0	0

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	RAG.010 Sarana SBSN di UPT Kesehatan Hewan	Unit	RO baru	0	0	1	1	1	0	0	268.000	268.000	268.000	
KRO	RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			-	3	3	3	3	95.265,776	203.379,746	16.478,178	16.466,859	16.466,96	
RO	RBK.004 Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan. Infeksi RO baru dan Zoonosis untuk Kesehatan Semua (One Health)	Unit	RO baru	0	1	0	0	0	0	73.064,75	0	0	0	
RO	RBK.005 Prasarana Laboratorium Terpadu Produksi dan Pengembangan Obat Hewan Nasional	Unit	RO baru	0	1	0	0	0	0	130.314,996	0	0	0	
RO	RBK.007 SBSN Sarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia	Unit	1	1	0	0	0	0	55.533,42	0	0	0	0	
RO	RBK.008 SBSN Sarana Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan, Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah	Unit	1	1	0	0	0	0	35.838,8	0	0	0	0	
RO	RBK.009 Prasarana Laboratorium Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Barat Indonesia	Unit	1		0	0	0	0	3.893,556	0	0	0	0	
RO	RBK.010 Prasarana SBSN di UPT Kesehatan Hewan	Unit	RO baru	0	0	1	1	1	0	0	16.478,178	16.466,859	16.466,96	
IKSKI.2	Presentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi susu	%	76,29	72	72	72	72	72	848	636,182	22.862,4	32.264,9	37.265,4	
KRO	AEA Koordinasi								748	436,182	957,4	1.257,4	1.257,4	

	Sasaran Program (Outcome/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	AEA.001 Koordinasi Kesehatan Hewan	Kegiatan	2	2	1	2	2	2	748	436,182	748	748	748
RO	AEA.002 Koordinasi Kesehatan Ternak	Kegiatan	RO baru	0	0	94	94	94	0	0	9,4	9,4	9,4
RO	AEA.003 Koordinasi deteksi dan respon cepat	Kegiatan	RO baru	0	0	1	1	1	0	0	200	500	500
KRO	AFA Norma. Standar. Prosedur dan Kriteria								100	200	800	800	800
RO	AFA.001 Norma. Standar. Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan	NSPK	7	2	2	4	4	4	100	200	800	800	800
KRO	QAH Pelayanan Publik Lainnya								0	0	21.105	30.207,5	35.208
RO	QAH.001 Layanan Kesehatan Hewan	Layanan	4.506,78 ⁴	0	0	209.00 ⁰	300.0 ⁰⁰	350.00 ⁰	0	0	20.900	30.000	35.000
RO	QAH.002 Layanan pencegahan dan pemberantasan PHMS pada ternak	Layanan	RO baru	0	0	100	150	160	0	0	5	7,5	8
RO	QAH.003 Layanan pengawasan obat hewan	Layanan	RO baru	0	0	2	2	2	0	0	200	200	200
IKSKI.3	Presentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi telur	%	95,5	95,5	95,6	95,7	95,8	95,9	849,074	536,182	1.012,4	1.012,40	1.012,40
KRO	AEA Koordinasi	Kegiatan							749,074	436,182	709,4	709,4	709,4
RO	AEA.001 Koordinasi Kesehatan Hewan	Kegiatan	2	2	1	2	2	2	749,074	436,182	200	200	200
RO	AEA.002 Koordinasi Kesehatan Ternak	Kegiatan	RO baru	0	0	94	94	94	0	0	9,4	9,4	9,4
RO	AEA.003 Koordinasi deteksi dan respon cepat	Kegiatan	RO baru	0	0	1	1	1	0	0	500	500	500
KRO	AFA Norma. Standar. Prosedur dan Kriteria								100	100	100	100	100

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO AFA.001 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan	NSPK	7	2	1	1	1	1	100	100	100	100	100
KRO QAH Pelayanan Publik Lainnya			0					0	0	203	203	203
RO QAH.001 Layanan Kesehatan Hewan	Layanan	4.506.784	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	3	3	3
RO QAH.003 Layanan pengawasan obat hewan	Layanan	RO baru	0	0	2	2	2	0	0	200	200	200
SK. 2 Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Ketahanan terhadap wabah penyakit Hewan								0	0	154.857,51	172.120	172.120
IKK 2.1 Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Terhadap Wabah Penyakit Hewan	Indeks	0,48	0,6	0,64	0,67	0,71	0,74	0	0	72.509,8	76.972	76.972
KRO AFA Norma, Standar, Prosedur, Kriteria								0	0	400	400	400
RO AFA 007 NSPK pelaporan dan deteksi dini potensi wabah penyakit hewan	NSPK	RO baru	-	-	1	1	1	0	0	200	200	200
RO AFA 008 NSPK respon potensi wabah penyakit hewan	NSPK	RO baru	-	-	1	1	1	0	0	200	200	200
KRO AEA Koordinasi								0	0	1.122	1.122	1.122
RO AEA 005 Koordinasi deteksi dini potensi wabah penyakit hewan	Laporan	RO baru	-	-	2	2	2	0	0	748	748	748
RO AEA 006 Koordinasi respon potensi wabah penyakit hewan	Laporan	RO baru	-	-	1	1	1	0	0	374	374	374
KRO QAH Pelayanan publik lainnya								0	0	70.987,8	75.450	75.450
RO QAH 005 Layanan untuk deteksi dini potensi wabah penyakit hewan	Layanan	RO baru	-	-	11	11	11	0	0	1.650	1.650	1.650

	Susunan Program (Outcome/Susunan Kegiatan (Output)/Indikator)	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	QAH 006 Layanan untuk respon potensi wabah penyakit hewan	Layanan	RO baru	-	-	9	9	9	0	0	1.800	1.800	1.800
RO	QAH.007 Layanan untuk Pemberantasan penyakit hewan		RO baru			1.876.050	2.000.000	2.000.000	0	0	67.537,8	72.000	72.000
IKK 2.2	Jumlah Kab/Kota yang dapat menekan kasus Rabies pada hewan	Kabupat en/Kota		100	200	300	400	514	0	0	82.347,71	95.148	95.148
KRO	QAH Pelayanan publik lainnya								0	0	7.574,71	20.375	20.375
RO	QAH 007 Layanan untuk Pemberantasan penyakit hewan	Layanan	RO baru	-	0	284.900	1.000.000	1.000.000	0	0	5.099,71	17.900	17.900
RO	QAH 008 Layanan surveillans penyakit untuk pemberantasan penyakit hewan	Layanan	RO baru	-	-	11	11	11	0	0	2.475	2.475	2.475
KRO	AFA Norma, Standar, Prosedur, Kriteria								0	0	200	200	200
	AFA 009 NSPK												
RO	Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan ketahanan wabah penyakit hewan	NSPK	RO baru	-	-	1	1	1	0	0	200	200	200
KRO	AEA Koordinasi								0	0	374	374	374
	AEA 007 Koordinasi												
RO	Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan ketahanan wabah penyakit hewan	Kegiatan	RO baru	-	-	1	1	1	0	0	374	374	374
KRO	QAH Pelayanan publik lainnya								0	0	74.199	74.199	74.199
RO	QAH 009 layanan unit pelayanan kesehatan hewan dalam kesiapsiagaan dan	Layanan	RO baru	-	-	38	38	38	0	0	73.074	73.074	73.074

	Sasaran Program (Outcome/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	ketahanan wabah penyakit hewan												
RO	QAH 010 Layanan Penyiangan Penyakit dalam kesiapsiagaan dan ketahanan wabah penyakit hewan	Layanan	RO baru	-	-	1.500	1.500	1.500	0	0	1.125	1.125	1.125
SK.3	Tersedianya obat hewan sesuai kebutuhan								50.669,1 ⁹	10.060,65	47.669,19	47.669,19	47.669,1 ⁹
IKK 3.1	Persentase ketersediaan obat hewan terhadap kebutuhan	%	100	95	95	95	95	95	50.669,1 ⁹	10.060,65	47.669,19	47.669,19	47.669,1 ⁹
KRO	RAG Sarana Bidang Pertanian. Ketahanan dan Lingkungan Hidup								50.669,1 ⁹	10.060,65	47.669,19	47.669,19	47.669,1 ⁹
RO	RAG 003 Obat Hewan dan Bahan Biologi	Unit	7.655,850	7.175.105	1.000.000	5.610.250	6.817.775	9.120.300	50.669,1 ⁸	10.060,65	47.669,19	47.669,19	47.669,1 ⁹
SK.4	Terjaminnya mutu dan keamanan obat hewan yang beredar								7.759,18	2.083,7	15.919	16.919	17.919
IKK 4.1	Persentase obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap obat hewan yang beredar	%	90	90	91	92	93	94	7.759,18	2.083,7	15.919	16.919	17.919
KRO	QA Penyiangan dan Pengujian Produk								7.759,18	2.083,7	15.919	16.919	17.919
RO	QA 001 Hasil mutu dan sertifikasi obat hewan	Produk	1350	2500	621	2000	2000	2.000	7.759,17 ⁵	2.083,699	8.386	8.386	8.386
RO	QA 002 Layanan Mutu Obat Hewan dan Pengujian Obat Hewan	Produk	RO baru	0	0	700	800	900	0	0	7.533	8.533	9.533
SK.5	Terpenutuhnya pengujian PHMS pada hewan di wilayah kerja UPT Veteriner			77.675	52.163	339,750	339,750	339,750	43.696,1 ⁴⁸	20.917,564	1.124,775	1.124,775	1.124,77 ⁵
IKK 5.1	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu	%		98%	98%	98%	98%	98%	0	0	124.975	124.975	124.975

	Sasaran Program (Outcome/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	terhadap permintaan pengujian PHMS di BBVet Maros												
KRO	QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit								0	0	124.575	124.575	124.575
RO	QJC 001 sampel penyakit hewan yang teramat dan teridentifikasi	Sampel	574	0	0	339.75 0	339.7 50	339.75 0	0	0	93.431,25	93.431,25	93.431,2 5
	QJC 002 Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua	Sampel	RO baru	0	0	113.25 0	113.2 50	113.25 0	0	0	31.143,75	31.143,75	31.143,7 5
KRO	QAH Pelayanan Publik Lainnya								0	0	400	400	400
RO	QAH 004 Layanan Investigasi Penyakit hewan	Layanan	RO baru	0	0	9	9	9	0	0	400	400	400
IKK 5.2	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di BBVet Denpasar	%		98%	98%	98%	98%	98%	0	0	124.975	124.975	124.975
KRO	QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit								0	0	124.575	124.575	124.575
RO	QJC 001 sampel penyakit hewan yang teramat dan teridentifikasi	Sampel	574	-	-	339.75 0	339.7 50	339.75 0	0	0	93.431,25	93.431,25	93.431,2 5
	QJC 002 Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua	Sampel	RO baru	0	0	113.25 0	113.2 50	113.25 0	-	0	31.143,75	31.143,75	31.143,7 5
KRO	QAH Pelayanan Publik Lainnya								0	0	400	400	400
RO	QAH 004 Layanan Investigasi Penyakit hewan	Layanan	RO baru	0	0	9	9	9	-	0	400	400	400
IKK 5.3	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu	%		98%	98%	98%	98%	98%	0	0	124.975	124.975	124.975

	Sasaran Program (Outcome/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	terhadap permintaan pengujian PHMS di BBVET Wates												
KRO	QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit								0	0	124.575	124.575	124.575
RO	QJC 001 sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi	Sampel	574	66.433	-	339.75 0	339.7 50	339.75 0	0	0	93.431,25	93.431,25	93.431,2 5
	QJC 002 Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua	Sampel	RO baru	0	0	113.25 0	113.2 50	113.25 0	-	0	31.143,75	31.143,75	31.143,7 5
KRO	QAH Pelayanan Publik lainnya								0	0	400	400	400
RO	QAH 004 Layanan Investigasi Penyakit hewan	Layanan	RO baru	0	0	9	9	9	0	0	400	400	400
	Investigasi Penyakit hewan								0	0	400	400	400
IKK 5.4	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Medan	%		98%	98%	98%	98%	98%	0	0	124.975	124.975	124.975
KRO	QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit								0	0	124.575	124.575	124.575
RO	QJC 001 sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi	Sampel	574	-	-	339.75 0	339.7 50	339.75 0	0	0	93.431,25	93.431,25	93.431,2 5
	QJC 002 Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua	Sampel	RO baru	0	0	113.25 0	113.2 50	113.25 0	-	0	31.143,75	31.143,75	31.143,7 5
KRO	QAH Pelayanan Publik lainnya								0	0	400	400	400
RO	QAH 004 Layanan Investigasi Penyakit hewan	Layanan	RO baru	0	0	9	9	9	0	0	400	400	400

	Sasaran Program (Outcome/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)			
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKK 5.5	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Bukittinggi	%		98%	98%	98%	98%	98%	0	0	124.975	124.975	124.975
KRO	QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit								0	0	124.575	124.575	124.575
RO	QJC 001 sampel penyakit hewan yang teramat dan teridentifikasi	Sampel	574	-	-	339.75 0	339.7 50	339.75 0	0	0	93.431,25	93.431,25	93.431,2 5
	QJC 002 Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua	Sampel	RO baru	0	0	113.25 0	113.2 50	113.25 0	-	0	31.143,75	31.143,75	31.143,7 5
KRO	QAH Pelayanan Publik Lainnya								0	0	400	400	400
RO	QAH 004 Layanan Investigasi Penyakit hewan	Layanan	RO baru	0	0	9	9	9	0	0	400	400	400
IKK 5.6	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Bender Lampung	%		98%	98%	98%	98%	98%	0	0	124.975	124.975	124.975
KRO	QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit								0	0	124.575	124.575	124.575
RO	QJC 001 sampel penyakit hewan yang teramat dan teridentifikasi	Sampel	574	-	-	339.75 0	339.7 50	339.75 0	0	0	93431,25	93431,25	93431,2 5
	QJC 002 Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua	Sampel	RO baru	0	0	113.25 0	113.2 50	113.25 0	-	0	31143,75	31143,75	31143,7 5
KRO	QAH Pelayanan Publik Lainnya								0	0	400	400	400
RO	QAH 004 Layanan Investigasi Penyakit hewan	Layanan	RO baru	0	0	9	9	9	0	0	400	400	400

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKK 5.7	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Subang	%		98%	98%	98%	98%	98%	0	0	124.975	124.975	124.975
KRO	QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit								0	0	124.575	124.575	124.575
RO	QJC 001 sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi	Sampel	574	-	-	339.75 0	339.7 50	339.75 0	0	0	93.431,25	93.431,25	93.431,2 5
	QJC 002 Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua	Sampel	RO baru	-	-	113.25 0	113.2 50	113.25 0	-	0	31.143,75	31.143,75	31.143,7 5
KRO	QAH Pelayanan Publik Lainnya								0	0	400	400	400
RO	QAH 004 Layanan Investigasi Penyakit hewan	Layanan	RO baru	-	-	9	9	9	-	0	400	400	400
IKK 5.8	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Banjarbaru	%		98%	98%	98%	98%	98%	0	0	124.975	124.975	124.975
KRO	QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit								0	0	124.575	124.575	124.575
RO	QJC 001 sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi	Sampel	574	-	-	339.75 0	339.7 50	339.75 0	0	0	93.431,25	93.431,25	93.431,2 5
	QJC 002 Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua	Sampel	RO baru	-	-	113.25 0	113.2 50	113.25 0	-	0	31.143,75	31.143,75	31.143,7 5
KRO	QAH Pelayanan Publik Lainnya								0	0	400	400	400
RO	QAH 004 Layanan Investigasi Penyakit hewan	Layanan	RO baru	-	-	9	9	9	0	0	400	400	400

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKK 5.9	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Jayapura	%		98%	98%	98%	98%	98%	0	0	124.975	124.975	124.975
KRO	QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit								0	0	124.575	124.575	124.575
RO	QJC 001 sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi	Sampel	574	-	-	339.75 0	339.7 50	339.75 0	0	0	93.431,25	93.431,25	93.431,2 5
	QJC 002 Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua	Sampel	RO baru	-	-	113.25 0	113.2 50	113.25 0	-	0	31.143,75	31.143,75	31.143,7 5
KRO	QAH Pelayanan Publik Lainnya								0	0	400	400	400
RO	QAH 004 Layanan Investigasi Penyakit hewan	Layanan	RO baru	-	-	9	9	9	0	0	400	400	400
SK 6	Tersedianya informasi PHMS pada ternak berdasarkan hasil identifikasi								0	0	24.750	25.200	26.550
IKSK 6.1	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di BBVet Maros	%	73	81	82	83	84	85	0	0	2.750	2.800	2.950
KRO	QAH. Pelayanan Publik Lainnya								0	0	2.750	2.800	2.950
RO	QAH.004 Layanan Investigasi Penyakit hewan		RO baru	0	0	5	5	5	0	0	2.750	2.800	2.950
IKSK 6.2	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di BBVet Denpasar	%	81	81	82	83	84	85	0	0	2.750	2.800	2.950
KRO	QAH. Pelayanan Publik Lainnya								0	0	2.750	2.800	2.950

	Sasaran Program (Outcome/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator)	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	QAH.004 Layanan Investigasi Penyakit hewan		RO baru	0	0	5	5	5	0	0	2.750	2.800	2.950
IKSK 6.3	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di BBVET Waes	%	81	81	82	83	84	85	0	0	2.750	2.800	2.950
KRO	QAH. Pelayanan Publik lainnya								0	0	2.750	2.800	2.950
RO	QAH.004 Layanan Investigasi Penyakit hewan		RO baru	0	0	5	5	5	0	0	2.750	2.800	2.950
IKSK 6.4	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Medan	%	80	81	82	83	84	85	0	0	2.750	2.800	2.950
KRO	QAH. Pelayanan Publik lainnya								0	0	2.750	2.800	2.950
RO	QAH.004 Layanan Investigasi Penyakit hewan		RO baru	0	0	5	5	5	0	0	2.750	2.800	2.950
IKSK 6.5	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Bukittinggi	%	81	81	82	83	84	85	0	0	2.750	2.800	2.950
KRO	QAH. Pelayanan Publik lainnya								0	0	2.750	2.800	2.950
RO	QAH.004 Layanan Investigasi Penyakit hewan		RO baru	0	0	5	5	5	0	0	2.750	2.800	2.950
IKSK 6.6	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Lampung	%	81	81	82	83	84	85	0	0	2.750	2.800	2.950
KRO	QAH. Pelayanan Publik lainnya								0	0	2.750	2.800	2.950

	Sasaran Program (Outcome/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	QAH.004 Layanan Investigasi Penyakit hewan		RO baru	0	0	5	5	5	0	0	2.750	2.800	2.950
IKSK 6.7	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Subang.	%	81	81	82	83	84	85	0	0	2.750	2.800	2.950
KRO	QAH. Pelayanan Publik Lainnya								0	0	2.750	2.800	2.950
RO	QAH.004 Layanan Investigasi Penyakit hewan		RO baru	0	0	5	5	5	0	0	2.750	2.800	2.950
IKSK 6.8	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Banjarbaru	%	80	81	82	83	84	85	0	0	2.750	2.800	2.950
KRO	QAH. Pelayanan Publik Lainnya								0	0	2.750	2.800	2.950
RO	QAH.004 Layanan Investigasi Penyakit hewan		RO baru	0	0	5	5	5	0	0	2.750	2.800	2.950
IKSK 6.9	Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Javapura	%	70	81	82	83	84	85	0	0	2.750	2.800	2.950
KRO	QAH. Pelayanan Publik Lainnya								0	0	2.750	2.800	2.950
RO	QAH.004 Layanan Investigasi Penyakit hewan		RO baru	0	0	5	5	5	0	0	2.750	2.800	2.950
KRO	QAH. Pelayanan Publik Lainnya								0	0	2.750	2.800	2.950
RO	QAH.004 Layanan Investigasi Penyakit hewan		RO baru	0	0	5	5	5	0	0	2.750	2.800	2.950

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan ukur	Basislin e	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1785 PENYEDIAAN BENIH DAN BIBIT SERTA PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK													
SK. 1 Terpenuhinya potensi produksi ternak untuk produksi daging, telur dan susu									171.519,863	69.322,717	809.465	809.840	908.465
IKK 1.1 Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas daging	%		94,92	95,12	95,32	95,53	95,76	6.457,188	38.513,083	607.060	607.435	685.760	
KR 0 QAH. Pelayanan Publik lainnya								0	14.261,866	407.250	407.625	474.750	
RO QAH.001. Layanan Optimalisasi Reproduksi	Layanan	1.547.009	0	499.761	2.475.000	2.475.000	2.700.000	0	14.261,866	371.250	371.625	432.000	
RO QAH.002. Layanan Penandaan dan Pendataan Ternak	Layanan baru	RO 1.499.878	-	-	1.440.000	1.440.000	1.710.000	0	0	36.000	36.000	42.750	
KR 0 RAG Sarana Bidang Pertanian Kehutanan dan lingkungan Hidup								0	0	3.150	3.150	3.150	
RO RAG.006. Sarana Penandaan dan Pendataan Ternak	Unit	1.011.145	0	0	90.000	90.000	90.000	0	0	3.150	3.150	3.150	
KR 0 AFA. Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria			-					300	200	500	500	500	
RO AFA.001. Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak	NSPK	5	4	2	5	5	5	300	200	500	500	500	
KR 0 AEA. Koordinasi								1.850	2.619,617	14.650	14.650	14.650	
RO AEA.001. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak	Kegiatan	1	6	4	5	5	5	1.850	2.619,617	3.250	3.250	3.250	

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan Pengukuran	Basis Hitung	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO AEA. 002. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di Daerah	Kegiatan Ternak	RO baru	0	0	38	38	38	0	0	11.400	11.400	11.400
KR QDD. Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat								0	0	4.260	4.260	4.260
RO QDD.002. Fasilitas dan pembinaan pada wilayah sumber bibit untuk kelompok peternak	Kelompok Masyarakat	RO baru	0	0	12	12	12	0	0	4.260	4.260	4.260
KR QEO. Bantuan Produk dan Peralatan			0	0				4.307,188	21.431,6	177.250	177.250	188.450
RO QEO. 003. Ternak Ruminansia Potong	Ekor	RO baru	1.000	5.200	15.000	15.500	16.000	3.060,04	20.800	130.000	130.000	138.500
RO QEO. 005. Ternak Lainnya	Ekor	RO baru	100	50	3.500	3.600	3.700	1.247,148	631,6	47.250	47.250	49.950
IKS K1. Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas telur			102,1	102,14	102,18	102,22	102,26	164.962,675	30.802,5	78.705	78.705	88.705
KR AFA. Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria								100	-	100	100	100
RO AFA.001. Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak	NSPK	5	1	0	1	1	1	100	-	100	100	100
KR AEA. Koordinasi								-	-	8.250	8.250	8.250
RO AEA.001. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak	Kegiatan Ternak	1	0	0	1	1	1	-	-	650	650	650
RO AEA. 002. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di Daerah	Kegiatan Ternak	RO baru	0	0	38	38	38	-	-	7.600	7.600	7.600

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan n	Fase/In e	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)			
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KR O QDD. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat								-	-	355	355	355
RO QDD.002. Fasilitasi dan pembinaan pada wilayah sumber bibit untuk kelompok peternak		RO baru	0	0	1	1	1	-	-	355	355	355
KR O QEO. Bantuan Produk dan Peralatan								164.862, 675	30.802,5	70.000	70.000	80.000
RO QEO.004. Ternak Unggas	Ekor	RO baru	7.500	92.500	200.000	350.000	400.000	164.862, 675	30.802,5	70.000	70.000	80.000
IKS K1. Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas susu			21,03	25,17	29,03	33,69	39,08	100	7,134	123.700	123.700	134.000
KR O QAH. Pelayanan Publik lainnya								-	7,134	31.500	31.500	34.750
RO QAH.001. Layanan Optimalisasi Reproduksi	Layan an	1.547. 009	0	250	275.000	275.000	300.000	-	7,134	27.500	27.500	30.000
RO QAH.002. Layanan Penandaan dan Pendataan Ternak	Layan an	RO baru	0	0	160.000	160.000	190.000	-	-	4.000	4.000	4.750
KR O RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								-	-	350	350	350
RO RAG.006. Sarana Penandaan dan Pendataan Ternak	Unit	1.011. 145	0	0	10.000	10.000	10.000	-	-	350	350	350
KR O AFA. Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria								100	-	100	100	100
RO AFA.001. Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak	NSPK	5	1	0	1	1	1	100	-	100	100	100
KR O AEA. Koordinasi								-	-	2.150	2.150	2.150

	Susunan Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indicator	Satuan n	Baseline	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)			
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	AEA.001. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak	Kegiatan tan	1	0	0	1	1	1	-	-	650	650	650
RO	AEA. 002. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di Daerah	Kegiatan tan	RO baru	0	0	10	10	10	-	-	1.500	1.500	1.500
KR O	QDD. Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat								-	-	2.100	2.100	2.100
RO	QDD.001. Fasilitas dan pembinaan penguatan uji zuriat sapi perah untuk kelompok peternak	Kelompok Masyarakat	RO baru	0	0	25	25	25	-	-	2.100	2.100	2.100
KR O	QEO. Bantuan Produk dan Peralatan								-	-	87.500	87.500	94.550
RO	QEO. 002. Ternak Ruminansia Perah	Ekor	RO baru	1.438	0	2.500	3.000	4.000	-	-	87.500	87.500	94.550
SK 2	Tersedianya bibit/benih ternak bermutu berdasarkan kebutuhan produksi daging, telur dan susu								-	-	3.405	3.405	4.105
IKK 2.1	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi daging	%	67,3	86,87	87,34	88,26	88,59	88,92	-	-	2.400	2.400	3.100
KR O	PDC. Sertifikasi produk								-	-	2.100	2.100	2.800
RO	PDC.001. Sertifikasi benih/bibit ternak	Sertifikasi	RO baru	0	0	15	20	25	-	-	1.050	1.050	1.750
RO	PDC.002. Penilaian penerapan Good Breeding Practices/Good Farming	Sertifikasi	RO baru	0	0	6	6	6	-	-	1.050	1.050	1.050

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Practices/Good Hatchery Practices												
KR O QIA. Pengawasan dan Pengendalian Produk								-	-	300	300	300
RO QIA.001. Pengawasan dan penerapan mutu bibit ternak dan tata kelola perbibitan dan produksi ternak	Laporan	RO baru	0	0	1	1	1	-	-	300	300	300
IKK 2.2 Persentase ketersediaan bibit/ benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi telur			102,1	102,14	102,18	102,22	102,26	-	-	620	620	620
KR O PDC. Sertifikasi produk								-	-	470	470	470
RO PDC.001. Sertifikasi benih/bibit ternak	Sertifikat	RO baru	0	0	10	10	10	-	-	350	350	350
RO PDC.002. Penilaian penerapan Good Breeding Practices/Good Farming Practices/Good Hatchery Practices	Sertifikat	RO baru	0	0	6	6	6	-	-	120	120	120
KR O QIA. Pengawasan dan Pengendalian Produk								-	-	150	150	150
RO QIA.001. Pengawasan dan penerapan mutu bibit ternak dan tata kelola perbibitan dan produksi ternak	Laporan	RO baru	0	0	1	1	1	-	-	150	150	150
IKK 2.3 Persentase ketersediaan bibit/ benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi susu			0,21	0,28	0,37	0,5	0,68	-	-	385	385	385

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KR 0	PDC. Sertifikasi produk								-	-	235	235	235
RO	PDC.001. Sertifikasi benih/bibit ternak	Sertifikat	RO baru	0	0	5	5	5	-	-	175	175	175
RO	PDC.002. Penilaian penerapan Good Breeding Practices/Good Farming Practices/Good Hatchery Practices	Sertifikat	RO baru	0	0	3	3	3	-	-	60	60	60
KR 0	QA. Pengawasan dan Pengendalian Produk								-	-	150	150	150
RO	QA.001. Pengawasan dan penerapan mutu bibit ternak dan tata kelola perbibitan dan produksi ternak	Laporan	RO baru	0	0	1	1	1	-	-	150	150	150
SK 3	Terlindungnya varietas unggul tanaman dan hewan								-	-	900	900	900
IKK 3	Jumlah varietas/galur unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	Galur		38	41	44	47	50	-	-	900	900	900
KR 0	REB. Konservasi Jenis / Spesies	Galur							-	-	900	900	900
RO	REB. 001. Pengelolaan SDGH	Jenis	RO baru	0	0	3	3	3	-	-	600	600	600
RO	REB. 002. Rumpun/Galur yang dilepas	Jenis	RO baru	0	0	2	2	2	-	-	300	300	300
SK 4	Tersedianya bibit/benih ternak dalam memenuhi permintaan dari peternak/instansi peternak di UPT								147.921,703	-	1.259.391,6	1.241.439,35	1.194.257,61

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan Pengukuran	Baseline	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Perbibitan dan Produksi Ternak													
IKK 4.1 Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTU-HPT Indrapuri	%		77	80	82	84	85	1.693,817	-	38.840,7	100.550,4	114.650	
KR O RAG, Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan lingkungan Hidup								1.693,817	-	14.650	70.550,4	84.650	
RO RAG.001. Sarana Perbibitan Ternak	Unit	1	5.465	0	1	1	1	1.693,817	-	14.650	70.550,4	84.650	
RO RAG.007. SBSN Sarana UPT	Unit	0											
KR O RBK. Prasarana Bidang Pertanian Kehutanan dan lingkungan Hidup								-	-	24.190,7	30.000	30.000	
RO RBK.001. Prasarana Perbibitan Ternak	Unit	0	3	0	1	1	1		-	24.190,7	30.000	30.000	
RO RBK.006. SBSN Prasarana UPT	Unit	0											
IKK 4.2 Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Siborongborong	%		70	75	78	82	85	3.940,458	-	39.650	149.650	149.650	
KR O RAG, Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan lingkungan Hidup								3.940,458	-	14.650	119.650	119.650	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indicator	Satuan	Baseline	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	RAG.001. Sarana Perbibitan Ternak	Unit	1	3.006	0	1	1	1	3.940,458	-	14.650	119.650	119.650	
RO	RAG.007. SBSN Sarana UPT	Unit	0											
KR O	RBK. Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup								-	-	25.000	30.000	30.000	
RO	RBK.001. Prasarana Perbibitan Ternak	Unit	0	4	0	1	1	1	-	-	25.000	30.000	30.000	
RO	RBK.006. SBSN Prasarana UPT	Unit	0											
IKK 4.3	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Padang Mengatas	%		72	74	76	78	80	1.425,421	-	39.650	109.650	109.650	
KR O	RAG. Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup								1.425,421	-	14.650	79.650	79.650	
RO	RAG.001. Sarana Perbibitan Ternak	Unit	1	3.008	0	1	1	1	1.425,421	-	14.650	79.650	79.650	
RO	RAG.007. SBSN Sarana UPT	Unit	1											
KR O	RBK. Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup								-	-	25.000	30.000	30.000	
RO	RBK.001. Prasarana Perbibitan Ternak	Unit	1	3	0	1	1	1		-	25.000	30.000	30.000	
RO	RBK.006. SBSN Prasarana UPT	Unit	1											

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator	Satuan n	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKK 4.4 Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Sembawa	%		95	96	97	98	98	3.478,27 6	0	214.650	162.150	158.150
KR O RAG, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								3.478,27 6	0	54.650	132.150	128.150
RO RAG.001. Sarana Perbibitan Ternak	Unit	1	2.506	0	1	1	1	3.478,27 6	0	4.650	132.150	128.150
RO RAG.007. SBSN Sarana UPT	Unit	0								50.000		
KR O RBK. Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								0	0	160.000	30.000	30.000
RO RBK.001. Prasarana Perbibitan Ternak	Unit	0	4	0	1	1	1		0	20.000	30.000	30.000
RO RBK.006. SBSN Prasarana UPT	Unit	0								140.000		
IKK 4.5 Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BBPTUHPT Batutraden	%		64	75	83	87	90	4.249,75 6	0	84.650	174.662	173.745,15
KR O RAG, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								4.249,75 6	0	64.650	144.662	145.745,15
RO RAG.001. Sarana Perbibitan Ternak	Unit	1	5.763	0	1	1	1	4.249,75 6	0	64.650	144.662	145.745,15
RO RAG.007. SBSN Sarana UPT	Unit	0										

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan Pengukuran	Baseline	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KR O RBK. Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup								0	0	20.000	30.000	30.000	
RO RBK.001. Prasarana Perbibitan Ternak	Unit	0	4	0	1	1	1		0	20.000	30.000	30.000	
RO RBK.006. SBSN Prasarana UPT	Unit	0											
IKK 4.6 Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Demasar	%		90	91	92	93	95	2.959,03 ⁹	0	174.650	104.650	104.650	
KR O RAQ. Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup								2.959,03 ⁹	0	54.650	74.650	74.650	
RO RAQ.001. Sarana Perbibitan Ternak	Unit	1	2.002	0	1	1	1	2.959,03 ⁹	0	4.650	74.650	74.650	
RO RAQ.007. SBSN Sarana UPT	Unit	0								50.000			
KR O RBK. Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup								0	0	120.000	30.000	30.000	
RO RBK.001. Prasarana Perbibitan Ternak	Unit	0	1	0	1	1	1	0	0	20.000	30.000	30.000	
RO RBK.006. SBSN Prasarana UPT	Unit	0								100.000			
IKK 4.7 Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Pelaihari	%		70	73	75	78	80	1.165,52 ²	0	174.650	157.150	157.149,5	

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KR O	RAG, Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup								1.165,52 2	0	54.650	127.150	127.149,51	
RO	RAG.001. Sarana Perbibitan Ternak	Unit	1	2.003	0	1	1	1	1.165,52 2	0	4.650	127.150	127.149,51	
RO	RAG.007. SBSN Sarana UPT	Unit	0								50.000			
KR O	RBK. Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup								0	0	120.000	30.000	30.000	
RO	RBK.001. Prasarana Perbibitan Ternak	Unit	0	3	0	1	1	1		0	20.000	30.000	30.000	
RO	RBK.006. SBSN Prasarana UPT	Unit	0								100.000			
IKK 4.8	Persentase permintaan benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BIB Lembang	%		95	96	97	98	98	3.806,70 2	-	289.650	92.650	85.921,95	
KR O	RAG, Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup								3.806,70 2	-	79.650	62.650	55.921,95	
RO	RAG.001. Sarana Perbibitan Ternak	Unit	1	3.509	0	1	1	1	3.806,70 2	-	4.650	62.650	55.921,95	
RO	RAG.007. SBSN Sarana UPT	Unit	0								75.000			
KR O	RBK. Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup								-	-	210.000	30.000	30.000	
RO	RBK.001. Prasarana Perbibitan Ternak	Unit	0	2	0	1	1	1		-	20.000	30.000	30.000	
RO	RBK.006. SBSN Prasarana UPT	Unit	0								190.000			

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indicator	Satuan	Baseline	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 4.9 Persentase permintaan benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BBIB Singosari	%		95	96	97	98	98	120.576,171	-	29.650	94.900	59.041	
KR O RAG, Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup								23.271,071	-	9.650	64.900	29.041	
RO RAG.001. Sarana Perbibitan Ternak	Unit	1	5.738	0	1	1	1	1.262,871	-	9.650	64.900	29.041	
RO RAG.007. SBSN Sarana UPT	Unit	0	1.155	0				22.008,2					
KR O RBK. Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup								97.305,1	-	20.000	30.000	30.000	
RO RBK.001. Prasarana Perbibitan Ternak	Unit	0	2	0	1	1	1	11.971,1	-	20.000	30.000	30.000	
RO RBK.006. SBSN Prasarana UPT	Unit	0	1	0	0	0	0	85.334					
IKK 4.10 Persentase permintaan benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BET Cipelang	%		90	91	93	94	95	4.626,541	0	163.350,9	55.426,95	39.650	
KR O RAG, Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup								4.626,541	0	54.650	25.426,95	9.650	
RO RAG.001. Sarana Perbibitan Ternak	Unit	1	0	0	1	1	1	4.626,541	0	4.650	25.426,95	9.650	
RO RAG.007. SBSN Sarana UPT	Unit	0								50.000			

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KR O RBK. Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup								0	0	108.700,9	30.000	30.000	
RO RBK.001. Prasarana Perbibitan Ternak	Unit	0	0	0	1	1	1	1	0	0	20.000	30.000	30.000
RO RBK.006. SBSN Prasarana UPT	Unit	0								88.700,9			
IKK 4.11 Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BET Cipelang	%		75	80	82	85	85	-	-	10.000	40.000	40.000	
KR O RAG. Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup								-	-	10.000	10.000	10.000	
RO RAG.001. Sarana Perbibitan Ternak	Unit	1	3.912	0	1	1	1	1	-	-	10.000	10.000	10.000
RO RAG.007. SBSN Sarana UPT	Unit	0											
KR O RBK. Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup								-	-	0	30.000	30.000	
RO RBK.001. Prasarana Perbibitan Ternak	Unit	0	2	0	1	1	1	1	-	-		30.000	30.000
RO RBK.006. SBSN Prasarana UPT	Unit	0											
Sk. 5 Terdapatnya mutu bibit/benih ternak unggul yang beredar di wilayah kerja UPT Perbibitan dan Produksi Ternak								75.413,4 31	58.999,5 34	377.991,3	399.877,6 5	421.818,9	

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indicator	Satuan	Basislin e	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKK 5.1 Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPPT Indrapuri	%		77	80	82	84	85	1.358,68 6	728	4.170	4.672,5	5.242,5
KR O PDA. Standardisasi Produk								1.358,68 6	728	3.645	4.147,5	4.717,5
RO PDA. 002. Bibit Ternak Unggul	Produ k	586,40 7	369	112	486	553	629	1.358,68 6	728	3.645	4.147,5	4.717,5
KR O PDC, Sertifikasi produk								-	-	175	175	175
RO PDC.003. Sertifikasi benih/bibit ternak UPT	Produ k	RO baru	0	0	486	553	629		-	175	175	175
KR O AEA. Koordinasi								-	-	350	350	350
RO AEA.003. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di UPT	Produ k	RO baru								350	350	350
IKK 5.2 Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPPT Siborongborong	%		81	84	85	86	87	1.021,35	673,53	7.466	9.338	11.222
KR O PDA. Standardisasi Produk								1.021,35	673,53	6.906	8.778	10.662
RO PDA. 002. Bibit Ternak Unggul	Produ k	586,40 7	361	195	1.151	1.463	1.777	1.021,35	673,53	6.906	8.778	10.662
KR O PDC, Sertifikasi produk								-	-	210	210	210
RO PDC.003. Sertifikasi benih/bibit ternak UPT	Produ k	RO baru		0	1.151	1.463	1.777		-	210	210	210
KR O AEA. Koordinasi								-	-	350	350	350

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan Pengukuran	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO AEA.003. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di UPT	Kegiatan tan	RO baru								350	350	350
IKK 5.3 Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPPT Padang Mengatas	%		85	86	87	88	90	2.332,23 2	1.786,15	2.775	2.925	3.075
KR O PDA. Standardisasi Produk								2.332,23 2	1.786,15	2.250	2.400	2.550
RO PDA. 002. Bibit Ternak Unggul	Produ k	586.40 7	490	252	300	320	340	2.332,23 2	1.786,15	2.250	2.400	2.550
KR O PDC, Sertifikasi produk								-	-	175	175	175
RO PDC.003. Sertifikasi benih/bibit ternak UPT	Produ k	RO baru		0	300	320	340		-	175	175	175
KR O AEA. Koordinasi								-	-	350	350	350
RO AEA.003. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di UPT	Kegiatan tan	RO baru								350	350	350
IKK 5.4 Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPPT Sembawa	%		95	96	97	98	98	7.484,81 9	2.045	144.521,5	155.577,7	166.658,2
KR O PDA. Standardisasi Produk								7.484,81 9	2.045	143.926,5	154.982,7	166.063,2
RO PDA. 002. Bibit Ternak Unggul	Produ k	586.40 7	749.136	171.050	959.510	1.033.21 8	1.107,08 8	7.484,81 9	2.045	143.926,5	154.982,7	166.063,2
KR O PDC, Sertifikasi produk								-	-	245	245	245
RO PDC.003. Sertifikasi benih/bibit ternak UPT	Produ k	RO baru		0	959.510	1.033.21 8	1.107,08 8		-	245	245	245

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan n	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KR O AEA. Koordinasi								-	-	350	350	350
RO AEA.003. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di UPT	Kegiatan	RO baru								350	350	350
IKK 5.5 Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BBPTU-HPT Baturaden	%		80	82	83	84	85	10.007,2 91	6.170	10.945	11.515	11.885
KR O PDA. Standardisasi Produk								10.007,2 91	6.170	10.350	10.920	11.290
RO PDA. 002. Bibit Ternak Unggul	Produk	586,40 7	867	950	1.035	1.092	1.129	10.007,2 91	6.170	10.350	10.920	11.290
KR O PDC, Sertifikasi produk								-	-	245	245	245
RO PDC.003. Sertifikasi benih/bibit ternak UPT	Produk	RO baru		0	1.035	1.092	1.129		-	245	245	245
KR O AEA. Koordinasi								-	-	350	350	350
RO AEA.003. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di UPT	Kegiatan	RO baru								350	350	350
IKK 5.6 Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Denpasar	%		90	91	92	93	95	1.811,35 2	893,251	2.010	2.092,5	2.175
KR O PDA. Standardisasi Produk								1.811,35 2	893,251	1.485	1.567,5	1.650
RO PDA. 002. Bibit Ternak Unggul	Produk	586,40 7	350	137	198	209	220	1.811,35 2	893,251	1.485	1.567,5	1.650
KR O PDC, Sertifikasi produk								-	-	175	175	175

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indicator	Satuan Pengukuran	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO PDC.003. Sertifikasi benih/bibit ternak UPT	Produ k	RO baru		0	198	209	220			175	175	175
KR O AEA. Koordinasi								-	-	350	350	350
RO AEA.003. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di UPT	Kegia tan	RO baru								350	350	350
IKK 5.7 Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPPT Pelaihari	%		75	80	85	88	88	5.056,98 5	5.210	139.253,8	146.189,9 5	153.473,2
KR O PDA. Standardisasi Produk								5.056,98 5	5.210	138.658,8	145.594,9 5	152.878,2
RO PDA. 002. Bibit Ternak Unggul	Produ k	586,40 7	1.038,55 1	410.520	924.392	970.633	1.019,18 8	5.056,98 5	5.210	138.658,8	145.594,9 5	152.878,2
KR O PDC, Sertifikasi produk								-	-	245	245	245
RO PDC.003. Sertifikasi benih/bibit ternak UPT	Produ k	RO baru		0	924.392	970.633	1.019,18 8		-	245	245	245
KR O AEA. Koordinasi								-	-	350	350	350
RO AEA.003. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di UPT	Kegia tan	RO baru								350	350	350
IKK 5.8 Persentase benih ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan benih ternak di BIB Lembang	%		95	96	97	98	98	19.626,1 63	18.726,4 87	22.225	22.325	22.425
KR O PDA. Standardisasi Produk								19.626,1 63	18.726,4 87	21.700	21.800	21.900
RO PDA. 001. Benih Ternak Unggul	Produ k	586,40 7	2.900,00 0	2.260,00 0	2.170,00 0	2.180,00 0	2.190,00 0	19.626,1 63	18.726,4 87	21.700	21.800	21.900

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KR O PDC, Sertifikasi produk								-	-	175	175	175
RO PDC.003. Sertifikasi benih/bibit ternak UPT	Produ k	RO baru	0	0	600	600	600	-		175	175	175
KR O AEA. Koordinasi								-	-	350	350	350
RO AEA.003. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di UPT	Kegia tan	RO baru								350	350	350
IKK 5.10 Persentase benih ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan benih ternak di BET Cipelang	%		90	92	93	94	95	5.358,34 4	947,387	7.725	7.837	8.013
KR O PDA. Standardisasi Produk								5.358,34 4	947,387	7.200	7.312	7.488

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan n	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO PDA. 001. Benih Ternak Unggul	Produ k	4.869. 325	800	75	900	914	936	5.358,34 4	947,387	7.200	7.312	7.488
KR O PDC. Sertifikasi produk								-	-	175	175	175
RO PDC.003. Sertifikasi benih/bibit ternak UPT	Produ k	RO baru	0	0	40	40	40			175	175	175
KR O AEA. Koordinasi								-	-	350	350	350
RO AEA.003. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di UPT	Kegia tan	RO baru								350	350	350
IKK 5.11 Persentase ketersediaan bibit ternak unggul bermutu terhadap total ternak yang beredar di wilayah kerja BET Cipelang	%		80	80	80	85	85	272,232	225,5	625	625	625
KR O PDA. Standardisasi Produk								272,232	226	450	450	450
RO PDA. 002. Bibit Ternak Unggul	Produ k	4.869. 325	60	60	60	60	60	272,232	226	450	450	450
KR O PDC. Sertifikasi produk								-	0	175	175	175
RO PDC.003. Sertifikasi benih/bibit ternak UPT	Produ k	RO baru	0	0	60	60	60			175	175	175

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Busch re	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1786 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER													
SK.1	Terpenuhinya persyaratan keamanan komoditas produk peternakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku								-	0	20.344	21.161	22.182
IKK 1.1	Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan keamanan komoditas pangan terhadap total komoditas produk peternakan siap edar	%	90	90,5	91	91,5	92	92,5	-	0	20.344	21.161	22.182
KRO	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga								-	0	20.344	21.161	22.182
RO	QIC 001 Pengawasan unit usaha, peredaran dan lalu lintas produk hewann produk hewann	Lembaga	RO baru	0	0	39	39	39	-	0	20.344	21.161	23.127
SK.2	Meningkatnya kesiapsiagaan dan Ketahanan terhadap zoonosis, keamanan dan kesehatan produk hewann								1.761,217	2.609	99.016	104.922	115.192
IKK 2.1	Indeks keamanan dan kesehatan produk hewann	Indeks	0,51	0,54	0,56	0,58	0,61	0,63	1.561,217	1.809	74.544	77.736	84.928
KRO	AFA Norma, Standar, Prosedur, Kriteria								300	300	1.500	1.650	1.800
RO	AFA 001 NSPK Kesehatan masyarakat veteriner	NSPK	6	5	3	6	6	6	300	300	1.500	1.650	1.800
KRO	AEA Koordinasi								1.261,217	1.509	15.000	15.000	15.000
RO	AEA 001 Koordinasi kesehatan masyarakat veteriner	Kegiatan	1	5	4	7	7	7	1.261,217	1.509	15.000	15.000	15.000
KRO	UAC Peningkatan Kapasitas aparaturnegara								-	0	12.000	12.000	12.000
RO	UAC 001 Bimbingan Teknis SDM Penjaminan Keamanan Produk Hewann	Orang	RO baru	0	0	1.200	1.200	1.200	-	0	12.000	12.000	12.000
KRO	PDF Sertifikasi Lembaga								-	0	8.000	10.000	14.000

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)			
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO PDF 001 Sertifikasi NKV Unit Usaha Produk Hewan	Lembaga	RO baru	70	0	400	500	700	-	0	8.000	10.000	14.000
KRO QAH Pelayanan publik lainnya								-	0	1.164	1.166	1.168
RO QAH 001 Pelayanan publik penjaminan keamanan produk hewan	Layanan	RO baru	0	0	3.500	3.516	3.533	-	0	1.164	1.166	1.168
KRO PCA Perijinan Produk								-	0	880	920	960
RO PCA 001 Registrasi Produk hewan	Produk	RO baru	0	0	110	115	120	-	0	880	920	960
KRO RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								-	0	36.000	37.000	40.000
RO RAG 001 Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	Unit		13	0	10	10	10	-	0	36.000	37.000	40.000
IKK 2.2 Tingkat kesadaran masyarakat terhadap penyakit hewan dan keamanan produk hewan	%	65	70	75	80	85	90	100	400	8.900	9.750	10.600
KRO AFA Norma, Standar, Prosedur, Kriteria								100	100	4.000	4.000	4.000
RO AFA 001 NSPK Kesehatan masyarakat veteriner	Kegiatan	6	0	1	2	2	2	100	100	4.000	4.000	4.000
KRO AEA Koordinasi								0	300	500	550	600
RO AEA 001 Koordinasi kesehatan masyarakat veteriner	NSPK	1	0	1	2	2	2	0	300	500	550	600
KRO QKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat								0	0	2.400	3.200	4.000
RO QKA 001 Pemantauan dugaan kejadian penyakit pada manusia yang berasal dari hewan dan/atau produk hewan	Kelompok Masyarakat	RO baru	0	0	24	32	40	0	0	2.400	3.200	4.000
KRO UAC Peningkatan Kapasitas aparatur negara								0	0	1.000	1.000	1.000
RO UAC 002 Bimbingan Teknis SDM Zoonosis	orang	RO baru	0	0	100	100	100	0	0	1.000	1.000	1.000
KRO QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat								0	0	1.000	1.000	1.000

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indicator)		Satuan	Basel line	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	QDC 001 Masyarakat yang teredukasi keamanan produk hewan dan zoonosis	Orang	RO baru	150	0	500	500	1000	0	0	1.000	1.000	1.000
IKK 2.3	Tingkat kepatuhan terhadap kesejahteraan hewan nasional	%	58	60	62	65	67	70	100	400	15.572	17.436	19.664
KRO	AFA Norma, Standar, Prosedur, Kriteria								100	100	500	550	600
RO	AFA 001 NSPK Kesehatan masyarakat veteriner	NSPK	6	0	1	2	2	2	100	100	500	550	600
KRO	AEA Koordinasi								-	300	4.000	4.000	4.000
RO	AEA 001 Koordinasi kesehatan masyarakat veteriner	Kegiatan	1	0	1	2	2	2	-	300	4.000	4.000	4.000
KRO	UAC Peningkatan Kapasitas aparatur negara								-	0	1.000	1.000	1.000
RO	UAC 003 Bimbingan Teknis SDM Kesnavet	Orang	RO baru	0	0	100	100	100	-	0	1.000	1.000	1.000
KRO	QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat								-	0	1.000	1.000	1.000
RO	QDC 002 Masyarakat yang teredukasi kesejahteraan hewan	Orang	RO baru	0	0	500	500	500	-	0	1.000	1.000	1.000
KRO	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga								-	0	9.072	10.886	13.064
RO	QIC 002 Pengawasan unit usaha penanganan hewan	Lembaga	RO baru	0	0	39	39	39	-	0	9.072	10.886	13.064
SK.3	Terperubuhnya permintaan pengujian keamanan produk hewan								14.543,992	5.553,155	30.943	34.925	37.271
IKK 3.1	Persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di BPMSPH	%		98	98	98	98	98					
IKK 3.2	Persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Besar Veteriner Wates	%		98	98	98	98	98					

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKK 3.3	Persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Besar Veteriner Maros	%	98	98	98	98	98					
IKK 3.4	Persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Besar Veteriner Denpasar	%	98	98	98	98	98					
IKK 3.5	Persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Medan	%	98	98	98	98	98					
IKK 3.6	Persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Bukittinggi	%	98	98	98	98	98					
IKK 3.7	Persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Lampung	%	98	98	98	98	98					
IKK 3.8	Persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Subang	%	98	98	98	98	98					
IKK 3.9	Persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Banjarbaru	%	98	98	98	98	98					
IKK 3.10	Persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan	%	98	98	98	98	98					

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Rasio	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	pengujian di Balai Veteriner Jayapura												
KRO	QA Penyidikan dan Pengujian Produk								14.543,992	5.553,155	30.943	33.925	37.271
RO	QA 001 Layanan Pengujian Keamanan Produk Hewan	Produk	2.921	37.915	12.796	72.802	79.890	87.720	14.543,992	5.553,155	30.943	33.925	37.271

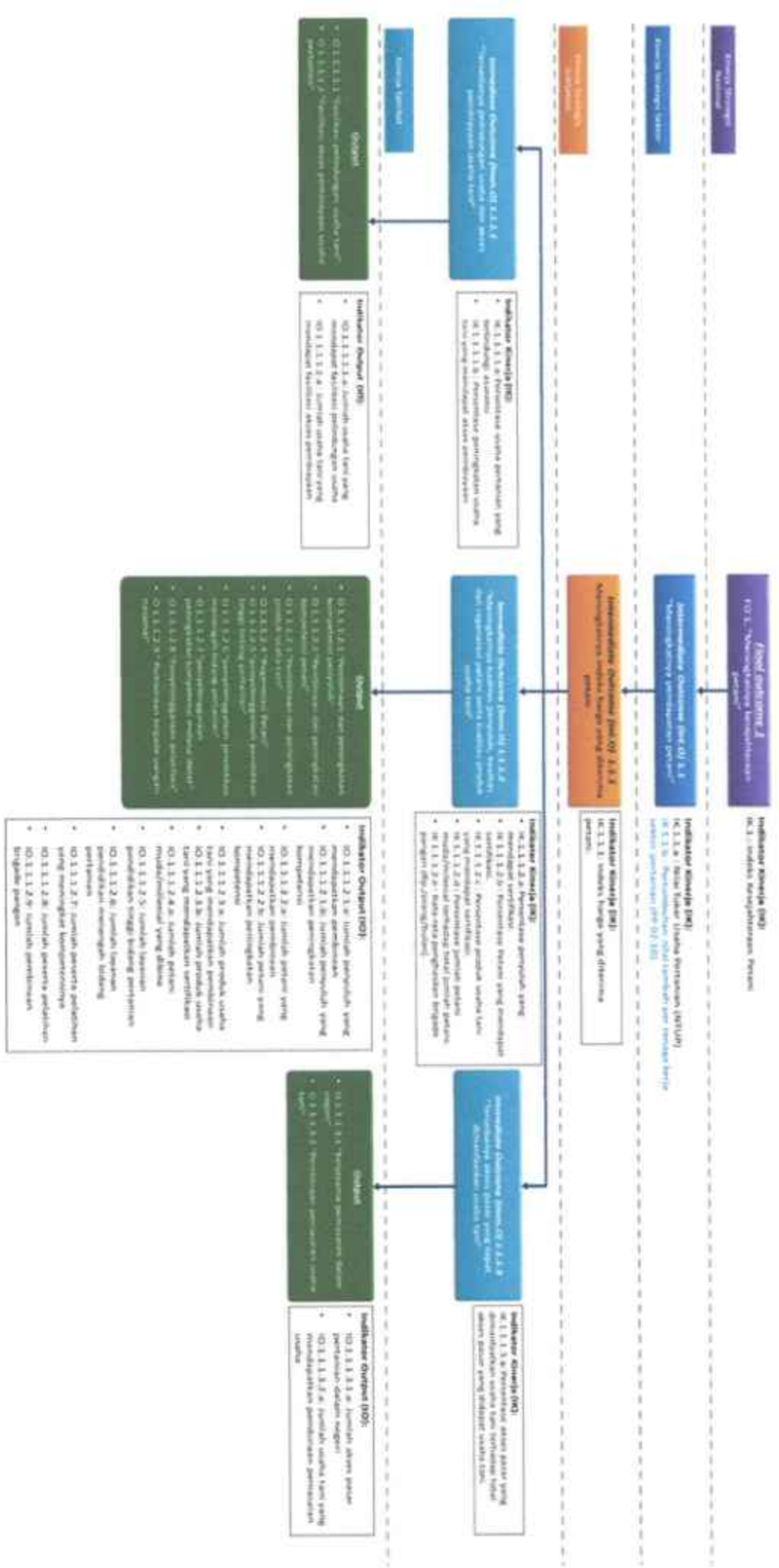
	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program	Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri									4.500	25.000	80.377	81.524	84.471
SP.15	Meningkatnya indeks harga yang diterima peternak									300	400	600	700	1.000
IKP 15.1	Indeks Harga yang diterima peternak	indeks	122,91	124,75	126,62	128,52	130,45	132,41	300	400	600	700	1.000	1.000
SP.16	Terjaminnya mutu komoditas peternakan								1.923,19	270	5.400	5.750	6.520	6.520
IKP 16.1	Indeks Mutu komoditas peternakan	indeks	0	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	1.923,19	270	5.400	5.750	6.520	6.520
SP.17	Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan								0	860	3.077	3.474	3.750	3.750
IKP 17.1	Volume ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan	Ton	489.639	499.432	514.415	540.136	567.143	595.500	0	860	3.077	3.474	3.750	3.750
SP.18	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi								2.276,81	23.470	71.300	71.600	73.201	73.201
IKP 18.1	Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan	indeks	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	2.276,81	23.470	71.300	71.600	73.201	73.201

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Satuan	Baseline	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)				
5891 HILIRISASI HASIL PETERNAKAN				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1	Tersedianya akses pasar komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan usaha peternakan								4.500	25.000	80.377	81.524	84.471	
IKK 1.1	Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan	%	100	100	100	100	100	100	300	400	600	700	1.000	
KRO	AFA Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur								300	400	600	700	1.000	
RO	AFA 001 NSPK Bidang Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Peternakan	NSPK	RO baru	3	4	4	4	4	300	400	600	700	1.000	
SK.2	Meningkatnya ketersediaan produk komoditas peternakan siap ekspor								-	860	3.077	3.474	3.750	
IKK 2.1	Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan	%	40	45	50	55	60	65	-	860	3.077	3.474	3.750	
KRO	PEH Promosi								-	860	3.077	3.474	3.750	
RO	PEH 001 Promosi produk dan usaha peternakan	Promosi	RO baru	0	5	6	7	8	-	860	3.077	3.474	3.750	
SK.3	Meningkatnya komoditas peternakan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing								2.276,81	1.970	4.800	4.800	5.280	
IKK 3.1	Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan	%	0	20	40	60	80	100	2.276,81	1.970	4.800	4.800	5.280	
KRO	AEA Koordinasi								2.276,81	1.970	4.800	4.800	5.280	
RO	AEA 001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Kegiatan	4	4	0	0	0	0						
RO	AEA 002 Koordinasi Bidang Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Peternakan	Kegiatan	RO baru	0	10	12	14	16	2.276,81	1.970	4.800	4.800	5.280	
KRO	RAQ Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								-	-	-	-	-	
RO	RAQ 001 Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Unit	41	0	0	7	7	10		-				
KRO	RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								-	-	-	-	-	
RO	RBK 001 Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Unit	38	0	0	7	7	10						
SK.4	Meningkatnya investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan								-	21.500	66.500	66.800	67.921	

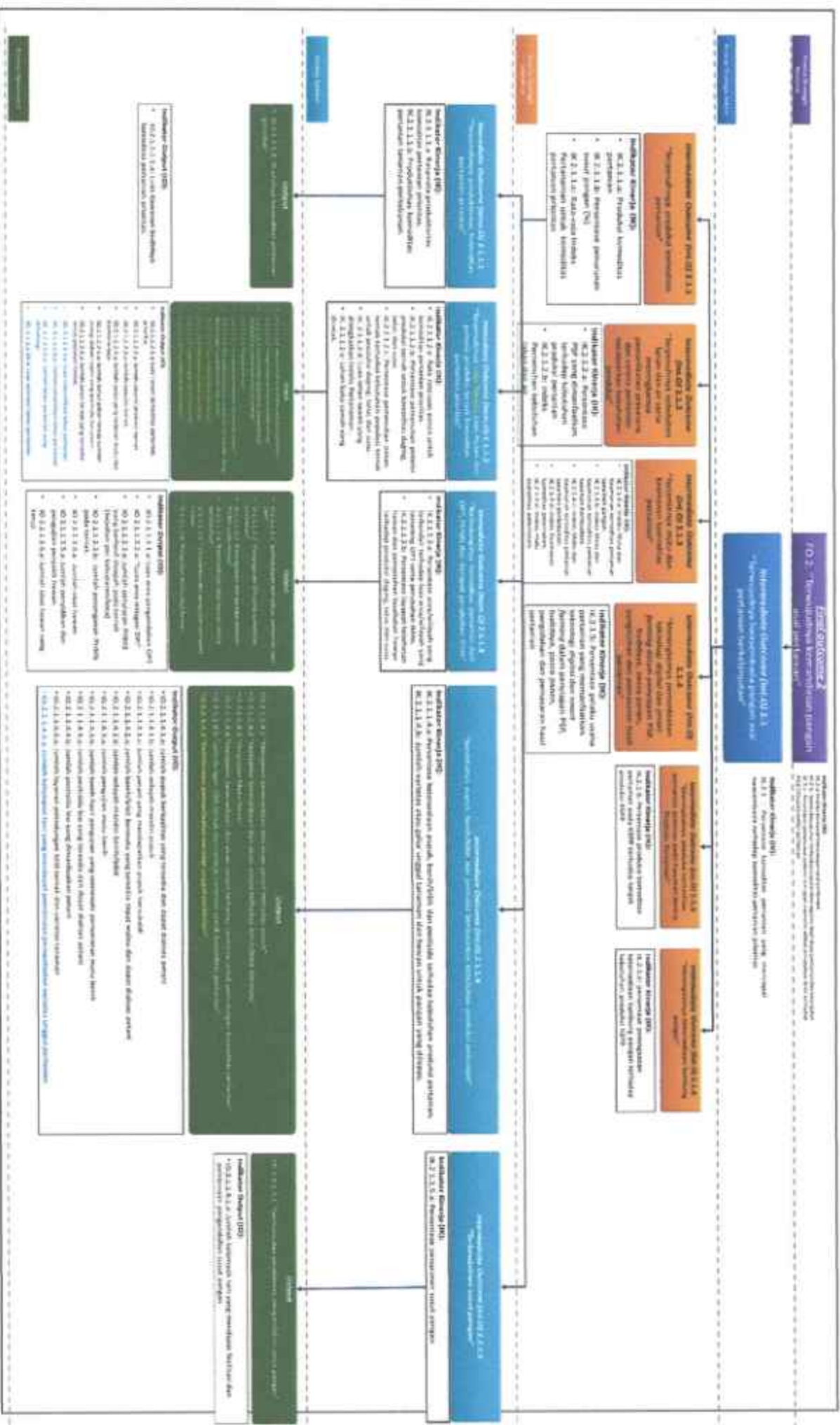
	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 4.1	Peningkatan investasi bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	15,76	16,26	16,76	17,26	17,76	18,26	-	21.500	66.500	66.800	67.921	
KRO	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga								-	21.500	66.500	66.800	67.921	
RO	QDB 002 Fasilitasi, Pembinaan dan Pendampingan Investasi Peternakan	Lembaga	RO baru	0	274	274	274	274	-	21.500	66.500	66.800	67.921	
SK.5	Terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu								1.923,19	270	5.400	5.750	6.520	
IKK 5.1	Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar	%	0	100	100	100	100	100	1.923,19	220	4.900	5.000	5.320	
KRO	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			20	6	8	10	12	1.923,19	220	4.900	5.000	5.320	
RO	QDB 001 Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	Lembaga	43	20	6	8	10	12	1.923,19	220	4.900	5.000	5.320	
IKK 5.2	Persentase pengujian mutu produk peternakan yang dilakukan terhadap permintaan pengujian di BPMSPH	%	0	98	98	98	98	98	-	50	500	750	1.200	
KRO	QIC Pengawasan dan pengendalian lembaga								-	50	500	750	1.200	
RO	QIC 002 Pengujian penerapan jaminan mutu pada unit usaha produk hewan		RO baru	0	4	6	8	10	-	50	500	750	1.200	

Lampiran 1

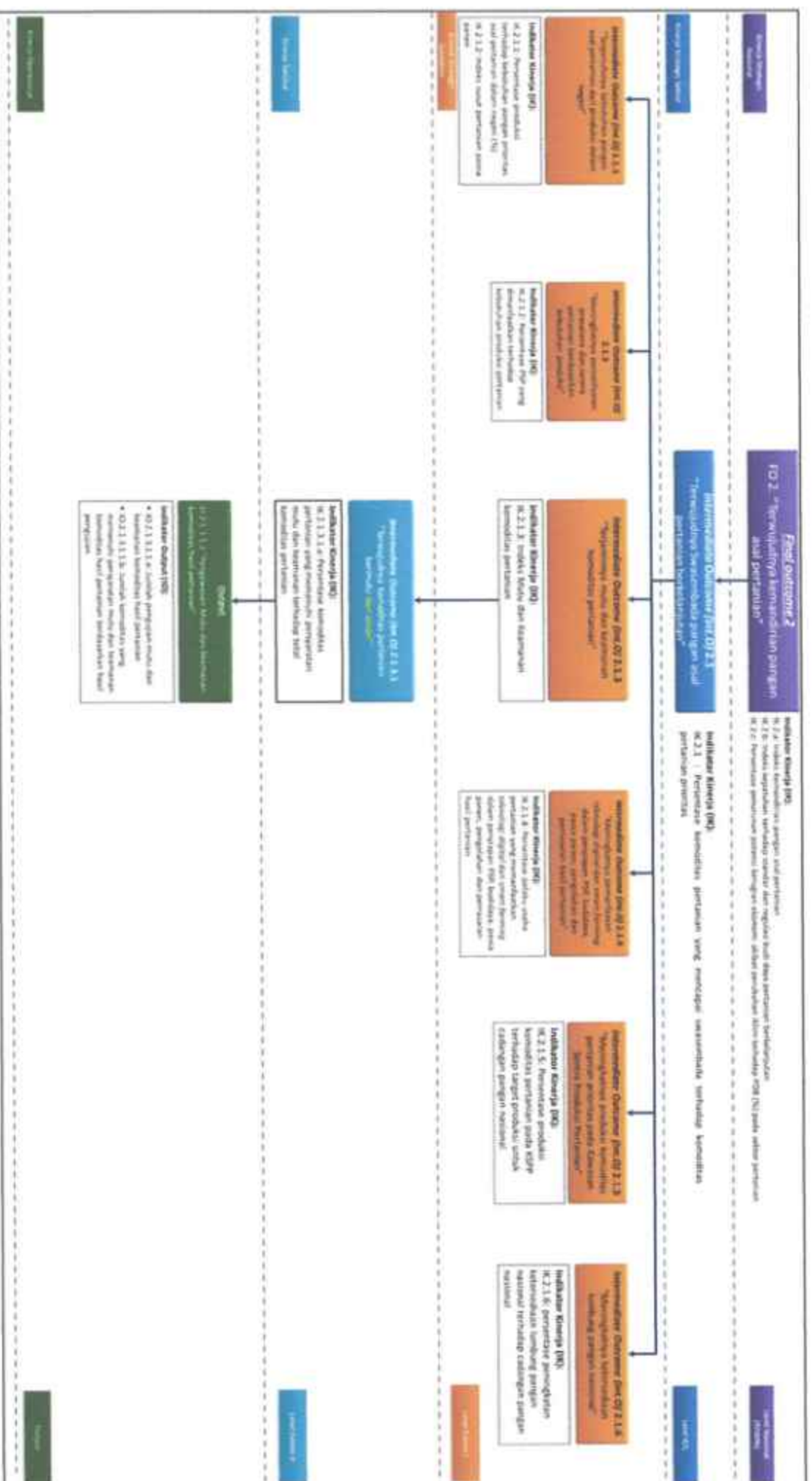
POHON KINERJA FO 1



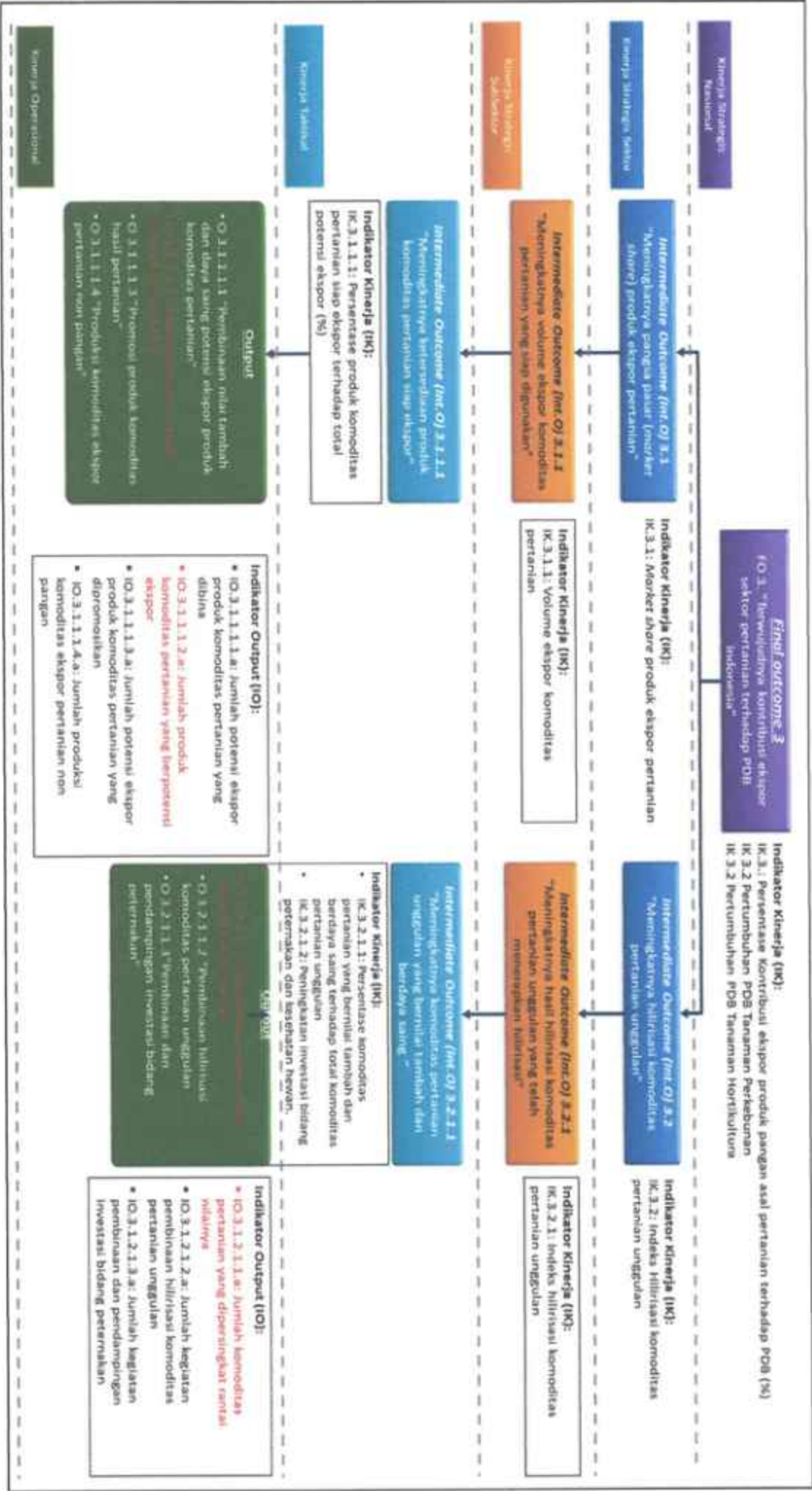
POHON KINERJA FO 2



POHON KINERJA FO 2



POHON KINERJA FO3



POHON KINERJA FO 5

FO 5: "Memperbaiki kesehatan masyarakat Indonesia"

Indikator Kinerja (IK):
IK.5: Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Intervensi Output Outcome (Int.O) S.1
"Meningkatkan status kesehatan masyarakat hewan dan peternak kawasan pedesaan melalui peningkatan kualitas pemeliharaan"

Indikator Kinerja (IK):

IK.5.1: Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia

Intervensi Output Outcome (Int.O) S.1.1
"Peningkatan jumlah peternak yang menerapkan praktik pemeliharaan yang baik melalui pelatihan"

Intervensi Output Outcome (Int.O) S.1.2
"Peningkatan jumlah peternak yang menerapkan praktik pemeliharaan yang baik melalui penyediaan sarana dan prasarana"

Indikator Kinerja (IK):

• IK.5.1.1: Persentase jumlah wilayah atau kawasan yang berstatus baik atau terbandar dari penyakit hewan terhadap wilayah atau kawasan kesehatan
• IK.5.1.1.1: Persentase wilayah yang terbandar dari zoonosis dan penyimpangan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia

Intervensi Output Outcome (Int.O) S.1.1.1
"Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak tentang penyakit hewan"

Intervensi Output Outcome (Int.O) S.1.1.2
"Meningkatkan akses peternak ke layanan kesehatan hewan dan penyediaan sarana dan prasarana"

Indikator Kinerja (IK):

• IK.5.1.1.1: Indeks pengetahuan dan keterampilan peternak tentang penyakit hewan
• IK.5.1.1.1.1: Jumlah kabupaten/kota yang dapat menangani kasus rabies pada hewan
• IK.5.1.1.1.2: Indeks keamanan dan kesehatan produk hewan
• IK.5.1.1.1.3: Tingkat kesadaran Masyarakat terhadap penyakit hewan dan keamanan produk hewan
• IK.5.1.1.1.4: Tingkat kepercayaan terhadap kesejahteraan hewan nasional

Output

• S.1.1.1: Peningkatan jumlah peternak
• S.1.1.2: Kualitas peternak yang menerapkan praktik pemeliharaan

Output

• S.1.1.1: Peningkatan jumlah peternak yang menerapkan praktik pemeliharaan yang baik
• S.1.1.2: Peningkatan jumlah peternak yang menerapkan praktik pemeliharaan yang baik
• S.1.1.3: Peningkatan jumlah peternak yang menerapkan praktik pemeliharaan yang baik

Indikator Output (IO):

• IO.5.1.1.1: Jumlah kegiatan pelatihan peternak
• IO.5.1.1.2: Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana peternak
• IO.5.1.1.3: Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana peternak
• IO.5.1.1.4: Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana peternak

Indikator Output (IO):

• IO.5.1.1.1: Jumlah kegiatan pelatihan peternak
• IO.5.1.1.2: Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana peternak
• IO.5.1.1.3: Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana peternak
• IO.5.1.1.4: Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana peternak

PROYEKSI POPULASI SAPI POTONG TAHUN 2025-2029 (EKOR)

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	272.251	274.293	276.350	278.422	280.511
2	Sumatera Utara	767.933	773.692	779.495	785.341	791.231
3	Sumatera Barat	238.166	239.952	241.752	243.565	245.392
4	Riau	182.367	183.734	185.112	186.501	187.899
5	Jambi	107.310	108.115	108.926	109.742	110.566
6	Sumatera Selatan	278.888	280.980	283.087	285.210	287.349
7	Bengkulu	117.022	117.900	118.784	119.675	120.572
8	Lampung	826.398	832.596	838.840	845.132	851.470
9	Kepulauan Bangka Belitung	19.889	20.038	20.189	20.340	20.492
10	Kepulauan Riau	15.893	16.012	16.133	16.254	16.376
11	DKI Jakarta	2.926	2.948	2.970	2.992	3.015
12	Jawa Barat	369.137	371.905	374.695	377.505	380.336
13	Jawa Tengah	1.266.654	1.276.154	1.285.725	1.295.368	1.305.083
14	DI. Yogyakarta	287.198	289.352	291.522	293.708	295.911
15	Jawa Timur	3.133.449	3.156.950	3.180.627	3.204.482	3.228.515
16	Banten	23.508	23.684	23.862	24.041	24.221
17	Bali	355.919	358.588	361.277	363.987	366.717
18	Nusa Tenggara Barat	817.975	824.110	830.291	836.518	842.792
19	Nusa Tenggara Timur	598.088	602.574	607.093	611.646	616.234
20	Kalimantan Barat	102.534	103.303	104.078	104.859	105.645
21	Kalimantan Tengah	37.802	38.086	38.372	38.659	38.949
22	Kalimantan Selatan	99.257	100.001	100.751	101.507	102.268
23	Kalimantan Timur	63.148	63.622	64.099	64.580	65.064
24	Kalimantan Utara	12.987	13.084	13.182	13.281	13.381
25	Sulawesi Utara	47.639	47.996	48.356	48.719	49.084
26	Sulawesi Tengah	214.609	216.218	217.840	219.474	221.120
27	Sulawesi Selatan	820.283	826.435	832.634	838.878	845.170
28	Sulawesi Tenggara	237.453	239.234	241.028	242.835	244.657
29	Gorontalo	155.772	156.940	158.117	159.303	160.498
30	Sulawesi Barat	82.369	82.987	83.609	84.236	84.868
31	Maluku	54.951	55.363	55.778	56.197	56.618
32	Maluku Utara	112.009	112.849	113.695	114.548	115.407
33	Papua Barat	17.376	17.507	17.638	17.770	17.904
34	Papua	22.659	22.829	23.000	23.172	23.346
35	Papua Barat Daya	41.736	42.049	42.364	42.682	43.002
36	Papua Selatan	17.391	17.522	17.653	17.786	17.919
37	Papua Tengah	12.382	12.475	12.569	12.663	12.758
38	Papua Pegunungan	4.577	4.611	4.646	4.681	4.716
Nasional		11.837.905	11.926.688	12.016.139	12.106.259	12.197.056

PROYEKSI POPULASI SAPI PERAH TAHUN 2025-2029 (EKOR)

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	11	11	11	11	11
2	Sumatera Utara	3.529	3.572	3.603	3.620	3.624
3	Sumatera Barat	638	646	652	655	656
4	Riau	58	59	59	60	60
5	Jambi	6	6	6	6	6
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	63	64	64	65	65
8	Lampung	1.126	1.140	1.150	1.155	1.157
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	3	3	3	3	3
11	DKI Jakarta	853	864	871	875	876
12	Jawa Barat	95.384	96.543	97.382	97.859	97.958
13	Jawa Tengah	81.866	82.862	83.582	83.991	84.076
14	DI. Yogyakarta	2.826	2.860	2.885	2.899	2.902
15	Jawa Timur	289.533	293.054	295.599	297.046	297.349
16	Banten	45	45	46	46	46
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	2	2	2	2	2
19	Nusa Tenggara Timur	25	26	26	26	26
20	Kalimantan Barat	17	17	17	17	17
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	59	60	60	61	61
23	Kalimantan Timur	40	40	41	41	41
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	9	9	9	9	9
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	652	660	666	669	670
28	Sulawesi Tenggara	24	24	25	25	25
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-
35	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
36	Papua Selatan	-	-	-	-	-
37	Papua Tengah	-	-	-	-	-
38	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
Nasional		476.769	482.567	486.759	489.141	489.640

PROYEKSI POPULASI KERBAU TAHUN 2025-2029 (EKOR)

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	58.514	58.573	58.632	58.690	58.749
2	Sumatera Utara	66.121	66.187	66.253	66.320	66.386
3	Sumatera Barat	26.779	26.806	26.832	26.859	26.886
4	Riau	20.761	20.782	20.802	20.823	20.844
5	Jambi	26.772	26.799	26.825	26.852	26.879
6	Sumatera Selatan	24.535	24.559	24.584	24.608	24.633
7	Bengkulu	15.183	15.198	15.214	15.229	15.244
8	Lampung	10.129	10.139	10.149	10.160	10.170
9	Kepulauan Bangka Belitung	227	227	228	228	228
10	Kepulauan Riau	24	24	24	24	24
11	DKI Jakarta	40	40	40	40	40
12	Jawa Barat	50.190	50.240	50.291	50.341	50.391
13	Jawa Tengah	19.766	19.786	19.805	19.825	19.845
14	DI. Yogyakarta	292	293	293	293	293
15	Jawa Timur	9.944	9.954	9.964	9.974	9.984
16	Banten	20.396	20.417	20.437	20.458	20.478
17	Bali	697	697	698	699	699
18	Nusa Tenggara Barat	37.765	37.802	37.840	37.878	37.916
19	Nusa Tenggara Timur	68.338	68.407	68.475	68.544	68.612
20	Kalimantan Barat	1.504	1.505	1.507	1.508	1.510
21	Kalimantan Tengah	3.704	3.707	3.711	3.715	3.719
22	Kalimantan Selatan	8.812	8.821	8.829	8.838	8.847
23	Kalimantan Timur	4.258	4.263	4.267	4.271	4.275
24	Kalimantan Utara	1.543	1.544	1.546	1.547	1.549
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	1.068	1.069	1.070	1.071	1.072
27	Sulawesi Selatan	64.730	64.794	64.859	64.924	64.989
28	Sulawesi Tenggara	2.026	2.028	2.030	2.032	2.034
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	4.965	4.970	4.975	4.980	4.985
31	Maluku	6.494	6.501	6.508	6.514	6.521
32	Maluku Utara	1.509	1.511	1.513	1.514	1.516
33	Papua Barat	2	2	2	2	2
34	Papua	3	3	3	3	3
35	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
36	Papua Selatan	137	137	137	138	138
37	Papua Tengah	69	69	69	69	69
38	Papua Pegunungan	54	54	54	54	54
Nasional		557.351	557.908	558.466	559.025	559.584

PROYEKSI POPULASI KAMBING TAHUN 2025-2029 (EKOR)

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	202.930	204.452	205.985	207.530	209.086
2	Sumatera Utara	385.093	387.981	390.891	393.822	396.776
3	Sumatera Barat	126.872	127.823	128.782	129.748	130.721
4	Riau	156.412	157.585	158.767	159.958	161.158
5	Jambi	115.423	116.289	117.161	118.040	118.925
6	Sumatera Selatan	425.866	429.060	432.278	435.520	438.787
7	Bengkulu	94.005	94.710	95.420	96.136	96.857
8	Lampung	1.981.586	1.996.448	2.011.421	2.026.507	2.041.706
9	Kepulauan Bangka Belitung	4.638	4.672	4.707	4.743	4.778
10	Kepulauan Riau	22.068	22.234	22.401	22.569	22.738
11	DKI Jakarta	4.126	4.157	4.188	4.219	4.251
12	Jawa Barat	1.307.091	1.316.894	1.326.771	1.336.722	1.346.747
13	Jawa Tengah	3.537.215	3.563.744	3.590.472	3.617.400	3.644.531
14	DI. Yogyakarta	430.175	433.402	436.652	439.927	443.226
15	Jawa Timur	5.071.101	5.109.134	5.147.453	5.186.059	5.224.954
16	Banten	196.098	197.569	199.050	200.543	202.047
17	Bali	51.367	51.753	52.141	52.532	52.926
18	Nusa Tenggara Barat	281.328	283.438	285.564	287.706	289.864
19	Nusa Tenggara Timur	384.505	387.389	390.295	393.222	396.171
20	Kalimantan Barat	92.430	93.123	93.822	94.525	95.234
21	Kalimantan Tengah	28.121	28.332	28.545	28.759	28.975
22	Kalimantan Selatan	40.751	41.057	41.365	41.675	41.988
23	Kalimantan Timur	44.735	45.071	45.409	45.749	46.092
24	Kalimantan Utara	4.501	4.534	4.568	4.603	4.637
25	Sulawesi Utara	10.208	10.285	10.362	10.439	10.518
26	Sulawesi Tengah	86.955	87.608	88.264	88.927	89.593
27	Sulawesi Selatan	314.777	317.138	319.517	321.913	324.327
28	Sulawesi Tenggara	66.021	66.516	67.014	67.517	68.023
29	Gorontalo	17.913	18.048	18.183	18.319	18.457
30	Sulawesi Barat	127.438	128.393	129.356	130.327	131.304
31	Maluku	31.415	31.650	31.888	32.127	32.368
32	Maluku Utara	146.693	147.793	148.902	150.018	151.144
33	Papua Barat	5.294	5.334	5.374	5.414	5.455
34	Papua	13.179	13.278	13.378	13.478	13.579
35	Papua Barat Daya	4.194	4.226	4.257	4.289	4.321
36	Papua Selatan	6.698	6.748	6.799	6.850	6.901
37	Papua Tengah	5.221	5.260	5.299	5.339	5.379
38	Papua Pegunungan	3.437	3.462	3.488	3.514	3.541
Nasional		15.827.880	15.946.590	16.066.189	16.186.685	16.308.085

PROYEKSI POPULASI DOMBA TAHUN 2025-2029 (EKOR)

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	20.264	20.294	20.324	20.355	20.385
2	Sumatera Utara	345.681	346.199	346.719	347.239	347.760
3	Sumatera Barat	418	418	419	419	420
4	Riau	8.628	8.641	8.654	8.667	8.680
5	Jambi	5.350	5.358	5.366	5.374	5.382
6	Sumatera Selatan	29.515	29.560	29.604	29.648	29.693
7	Bengkulu	1.459	1.461	1.464	1.466	1.468
8	Lampung	56.735	56.820	56.905	56.991	57.076
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	112	112	113	113	113
11	DKI Jakarta	1.324	1.326	1.328	1.330	1.332
12	Jawa Barat	6.982.335	6.992.808	7.003.298	7.013.802	7.024.323
13	Jawa Tengah	879.638	880.957	882.278	883.602	884.927
14	DI. Yogyakarta	154.868	155.100	155.333	155.566	155.799
15	Jawa Timur	610.732	611.648	612.565	613.484	614.405
16	Banten	100.158	100.308	100.459	100.609	100.761
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	3.621	3.627	3.632	3.638	3.643
19	Nusa Tenggara Timur	22.480	22.514	22.547	22.581	22.615
20	Kalimantan Barat	308	309	309	310	310
21	Kalimantan Tengah	123	123	124	124	124
22	Kalimantan Selatan	2.676	2.680	2.684	2.688	2.692
23	Kalimantan Timur	936	938	939	941	942
24	Kalimantan Utara	65	65	65	65	65
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	3.957	3.963	3.969	3.975	3.981
27	Sulawesi Selatan	194	195	195	195	195
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	1.387	1.389	1.391	1.393	1.396
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	8	8	8	8	8
34	Papua	-	-	-	-	-
35	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
36	Papua Selatan	-	-	-	-	-
37	Papua Tengah	33	33	33	33	33
38	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
Nasional		9.233.005	9.246.854	9.260.725	9.274.616	9.288.528

PROYEKSI POPULASI BABI TAHUN 2025-2029 (EKOR)

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	2.431	2.446	2.462	2.478	2.494
2	Sumatera Utara	279.012	280.826	282.651	284.488	286.337
3	Sumatera Barat	32.915	33.129	33.344	33.561	33.779
4	Riau	59.900	60.289	60.681	61.076	61.472
5	Jambi	2.276	2.290	2.305	2.320	2.335
6	Sumatera Selatan	12.583	12.665	12.747	12.830	12.914
7	Bengkulu	1.522	1.532	1.542	1.552	1.562
8	Lampung	66.578	67.011	67.446	67.885	68.326
9	Kepulauan Bangka Belitung	9.180	9.240	9.300	9.360	9.421
10	Kepulauan Riau	37.042	37.283	37.525	37.769	38.015
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	1.029	1.035	1.042	1.049	1.056
13	Jawa Tengah	48.841	49.159	49.479	49.800	50.124
14	DI. Yogyakarta	8.564	8.620	8.676	8.732	8.789
15	Jawa Timur	108.045	108.747	109.454	110.165	110.881
16	Banten	1.459	1.469	1.479	1.488	1.498
17	Bali	520.674	524.058	527.464	530.893	534.344
18	Nusa Tenggara Barat	15.464	15.564	15.666	15.767	15.870
19	Nusa Tenggara Timur	1.059.047	1.065.931	1.072.860	1.079.833	1.086.852
20	Kalimantan Barat	66.680	67.113	67.549	67.988	68.430
21	Kalimantan Tengah	33.214	33.430	33.648	33.866	34.087
22	Kalimantan Selatan	3.266	3.287	3.309	3.330	3.352
23	Kalimantan Timur	28.155	28.338	28.522	28.708	28.894
24	Kalimantan Utara	15.972	16.076	16.181	16.286	16.391
25	Sulawesi Utara	57.423	57.796	58.172	58.550	58.930
26	Sulawesi Tengah	93.449	94.057	94.668	95.284	95.903
27	Sulawesi Selatan	725.716	730.433	735.181	739.959	744.769
28	Sulawesi Tenggara	14.466	14.561	14.655	14.750	14.846
29	Gorontalo	1.656	1.666	1.677	1.688	1.699
30	Sulawesi Barat	61.752	62.153	62.557	62.964	63.373
31	Maluku	46.481	46.783	47.087	47.394	47.702
32	Maluku Utara	52.465	52.806	53.149	53.495	53.842
33	Papua Barat	14.411	14.505	14.599	14.694	14.789
34	Papua	51.715	52.051	52.390	52.730	53.073
35	Papua Barat Daya	4.828	4.860	4.891	4.923	4.955
36	Papua Selatan	16.527	16.634	16.742	16.851	16.961
37	Papua Tengah	438.264	441.113	443.980	446.866	449.771
38	Papua Pegunungan	148.776	149.743	150.716	151.696	152.682
Nasional		4.141.778	4.168.699	4.195.796	4.223.068	4.250.518

PROYEKSI POPULASI AYAM RAS PETELUR TAHUN 2025-2029 (EKOR)

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	226.564	235.831	245.975	251.201	259.893
2	Sumatera Utara	41.755.573	43.463.570	45.333.006	46.296.251	47.898.176
3	Sumatera Barat	24.859.799	25.876.679	26.989.676	27.563.158	28.516.888
4	Riau	418.428	435.544	454.277	463.930	479.983
5	Jambi	2.941.453	3.061.772	3.193.463	3.261.319	3.374.166
6	Sumatera Selatan	16.445.564	17.118.264	17.854.547	18.233.924	18.864.848
7	Bengkulu	608.036	632.908	660.130	674.157	697.483
8	Lampung	15.583.795	16.221.245	16.918.946	17.278.443	17.876.305
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.093.772	1.138.512	1.187.482	1.212.713	1.254.675
10	Kepulauan Riau	1.465.651	1.525.603	1.591.221	1.625.032	1.681.261
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	53.114.540	55.287.170	57.665.158	58.890.438	60.928.144
13	Jawa Tengah	58.871.041	61.279.139	63.914.851	65.272.926	67.531.476
14	DI Yogyakarta	8.687.343	9.042.696	9.431.636	9.632.042	9.965.326
15	Jawa Timur	146.655.882	152.654.785	159.220.708	162.603.860	168.230.220
16	Banten	22.918.052	23.855.506	24.881.569	25.410.258	26.289.494
17	Bali	16.336.228	17.004.455	17.735.844	18.112.698	18.739.427
18	Nusa Tenggara Barat	3.593.366	3.740.352	3.901.230	3.984.124	4.121.981
19	Nusa Tenggara Timur	351.193	365.559	381.282	389.383	402.857
20	Kalimantan Barat	6.362.691	6.622.955	6.907.819	7.054.597	7.298.698
21	Kalimantan Tengah	407.924	424.610	442.873	452.283	467.933
22	Kalimantan Selatan	8.020.303	8.348.370	8.707.446	8.892.464	9.200.158
23	Kalimantan Timur	2.637.458	2.745.342	2.863.424	2.924.266	3.025.451
24	Kalimantan Utara	157.315	163.749	170.793	174.422	180.457
25	Sulawesi Utara	2.704.328	2.814.948	2.936.023	2.998.408	3.102.158
26	Sulawesi Tengah	1.704.622	1.774.349	1.850.666	1.889.989	1.955.386
27	Sulawesi Selatan	20.751.520	21.600.353	22.529.418	23.008.128	23.804.247
28	Sulawesi Tenggara	425.526	442.932	461.983	471.800	488.125
29	Gorontalo	497.317	517.659	539.925	551.397	570.476
30	Sulawesi Barat	203.495	211.819	220.930	225.624	233.431
31	Maluku	111.642	116.209	121.207	123.783	128.066
32	Maluku Utara	13.224	13.764	14.356	14.662	15.169
33	Papua Barat	86.282	89.811	93.674	95.664	98.974
34	Papua	289.128	300.955	313.900	320.569	331.662
35	Papua Barat Daya	265.024	275.864	287.730	293.844	304.011
36	Papua Selatan	333.426	347.065	361.993	369.685	382.476
37	Papua Tengah	389.956	405.907	423.366	432.362	447.322
38	Papua Pegunungan	44.558	46.381	48.376	49.404	51.113
Nasional		461.332.019	480.202.632	500.856.903	511.499.208	529.197.916

PROYEKSI POPULASI AYAM RAS PEDAGING TAHUN 2025-2029 (EKOR)

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	38.060.318	38.688.878	39.994.139	41.056.331	41.071.926
2	Sumatera Utara	172.272.435	175.117.487	181.025.491	185.833.291	185.903.881
3	Sumatera Barat	56.756.241	57.693.561	59.639.990	61.223.950	61.247.207
4	Riau	91.143.796	92.649.021	95.774.756	98.318.408	98.355.755
5	Jambi	50.079.186	50.906.235	52.623.678	54.021.294	54.041.815
6	Sumatera Selatan	116.851.435	118.781.217	122.788.583	126.049.688	126.097.569
7	Bengkulu	11.351.248	11.538.712	11.927.998	12.244.790	12.249.442
8	Lampung	92.145.228	93.666.992	96.827.070	99.398.670	99.436.428
9	Kepulauan Bangka Belitung	24.037.737	24.434.716	25.259.079	25.929.928	25.939.777
10	Kepulauan Riau	19.029.734	19.344.007	19.996.623	20.527.708	20.535.505
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	746.396.388	758.723.004	784.320.325	805.150.847	805.456.691
13	Jawa Tengah	661.046.287	671.963.359	694.633.638	713.082.198	713.353.069
14	DI Yogyakarta	57.423.861	58.372.207	60.341.532	61.944.124	61.967.654
15	Jawa Timur	444.034.775	451.367.937	466.595.905	478.988.082	479.170.031
16	Banten	196.977.794	200.230.850	206.986.113	212.483.394	212.564.107
17	Bali	81.462.449	82.807.789	85.601.506	87.874.970	87.908.350
18	Nusa Tenggara Barat	41.732.230	42.421.431	43.852.619	45.017.287	45.034.387
19	Nusa Tenggara Timur	17.360.683	17.647.392	18.242.768	18.727.272	18.734.386
20	Kalimantan Barat	60.429.004	61.426.979	63.499.364	65.185.824	65.210.586
21	Kalimantan Tengah	34.387.555	34.955.460	36.134.766	37.094.458	37.108.549
22	Kalimantan Selatan	98.823.131	100.455.179	103.844.273	106.602.241	106.642.735
23	Kalimantan Timur	63.099.487	64.141.565	66.305.532	68.066.521	68.092.376
24	Kalimantan Utara	5.174.483	5.259.939	5.437.396	5.581.806	5.583.926
25	Sulawesi Utara	12.686.489	12.896.004	13.331.081	13.685.137	13.690.336
26	Sulawesi Tengah	10.016.007	10.181.420	10.524.914	10.804.442	10.808.546
27	Sulawesi Selatan	104.627.071	106.354.970	109.943.107	112.863.052	112.905.924
28	Sulawesi Tenggara	9.014.576	9.163.450	9.472.601	9.724.181	9.727.875
29	Gorontalo	7.010.865	7.126.649	7.367.083	7.562.743	7.565.616
30	Sulawesi Barat	5.547.309	5.638.922	5.829.164	5.983.979	5.986.253
31	Maluku	834.950	848.739	877.374	900.675	901.018
32	Maluku Utara	117.215	119.151	123.171	126.442	126.490
33	Papua Barat	450.402	457.840	473.286	485.856	486.041
34	Papua	4.795.189	4.874.381	5.038.830	5.172.655	5.174.620
35	Papua Barat Daya	1.218.649	1.238.775	1.280.568	1.314.578	1.315.077
36	Papua Selatan	499.784	508.038	525.178	539.126	539.330
37	Papua Tengah	1.694.571	1.722.556	1.780.671	1.827.963	1.828.657
38	Papua Pegunungan	21.322	21.674	22.405	23.000	23.009
Nasional		3.338.609.88 4	3.393.746.48 6	3.508.242.57 7	3.601.416.91 1	3.602.784.94 4

PROYEKSI POPULASI ITIK TAHUN 2025-2029 (EKOR)

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	567.241	595.604	625.384	656.653	689.486
2	Sumatera Utara	1.394.405	1.464.125	1.537.332	1.614.198	1.694.908
3	Sumatera Barat	749.759	787.247	826.609	867.940	911.337
4	Riau	114.028	119.729	125.716	132.002	138.602
5	Jambi	90.027	94.528	99.255	104.217	109.428
6	Sumatera Selatan	1.748.377	1.835.796	1.927.586	2.023.965	2.125.163
7	Bengkulu	80.379	84.399	88.618	93.049	97.702
8	Lampung	921.540	967.617	1.015.998	1.066.798	1.120.137
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.705	30.140	31.647	33.229	34.891
10	Kepulauan Riau	20.177	21.186	22.245	23.357	24.525
11	DKI Jakarta	17.048	17.900	18.795	19.735	20.722
12	Jawa Barat	9.417.091	9.887.945	10.382.343	10.901.460	11.446.533
13	Jawa Tengah	4.982.293	5.231.408	5.492.978	5.767.627	6.056.009
14	DI. Yogyakarta	465.050	488.303	512.718	538.354	565.272
15	Jawa Timur	8.563.577	8.991.756	9.441.344	9.913.411	10.409.082
16	Banten	2.650.048	2.782.550	2.921.678	3.067.762	3.221.150
17	Bali	424.597	445.827	468.118	491.524	516.100
18	Nusa Tenggara Barat	385.469	404.742	424.979	446.228	468.540
19	Nusa Tenggara Timur	12.448	13.070	13.724	14.410	15.130
20	Kalimantan Barat	118.610	124.541	130.768	137.306	144.171
21	Kalimantan Tengah	71.400	74.970	78.718	82.654	86.787
22	Kalimantan Selatan	1.191.007	1.250.557	1.313.085	1.378.739	1.447.676
23	Kalimantan Timur	163.146	171.303	179.868	188.862	198.305
24	Kalimantan Utara	10.517	11.043	11.595	12.174	12.783
25	Sulawesi Utara	100.038	105.040	110.292	115.806	121.596
26	Sulawesi Tengah	286.873	301.216	316.277	332.091	348.695
27	Sulawesi Selatan	3.461.809	3.634.899	3.816.644	4.007.477	4.207.851
28	Sulawesi Tenggara	153.464	161.137	169.194	177.654	186.536
29	Gorontalo	70.944	74.491	78.216	82.127	86.233
30	Sulawesi Barat	81.538	85.615	89.895	94.390	99.110
31	Maluku	26.776	28.115	29.521	30.997	32.546
32	Maluku Utara	94.531	99.258	104.221	109.432	114.904
33	Papua Barat	4.599	4.829	5.070	5.324	5.590
34	Papua	3.396	3.565	3.744	3.931	4.127
35	Papua Barat Daya	4.359	4.578	4.806	5.047	5.299
36	Papua Selatan	20.607	21.638	22.719	23.855	25.048
37	Papua Tengah	3.156	3.314	3.480	3.654	3.837
38	Papua Pegunungan	7.596	7.975	8.374	8.793	9.233
Nasional		38.506.625	40.431.956	42.453.554	44.576.232	46.805.044

PROYEKSI POPULASI AYAM BURAS TAHUN 2025-2029 (EKOR)

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	3.347.197	3.514.556	3.690.284	3.874.798	4.068.538
2	Sumatera Utara	6.524.853	6.851.095	7.193.650	7.553.333	7.930.999
3	Sumatera Barat	3.723.486	3.909.660	4.105.143	4.310.401	4.525.921
4	Riau	4.315.537	4.531.314	4.757.879	4.995.773	5.245.562
5	Jambi	1.489.008	1.563.459	1.641.632	1.723.713	1.809.899
6	Sumatera Selatan	9.661.854	10.144.947	10.652.194	11.184.804	11.744.045
7	Bengkulu	665.538	698.815	733.756	770.444	808.966
8	Lampung	6.651.488	6.984.062	7.333.266	7.699.929	8.084.925
9	Kepulauan Bangka Belitung	904.294	949.508	996.984	1.046.833	1.099.175
10	Kepulauan Riau	496.033	520.835	546.877	574.221	602.932
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	20.901.748	21.946.836	23.044.178	24.196.386	25.406.206
13	Jawa Tengah	21.803.980	22.894.179	24.038.887	25.240.832	26.502.874
14	DI Yogyakarta	3.267.907	3.431.302	3.602.868	3.783.011	3.972.162
15	Jawa Timur	27.975.575	29.374.354	30.843.071	32.385.225	34.004.486
16	Banten	1.796.151	1.885.959	1.980.257	2.079.270	2.183.233
17	Bali	2.110.353	2.215.870	2.326.664	2.442.997	2.565.147
18	Nusa Tenggara Barat	4.652.281	4.884.895	5.129.139	5.385.596	5.654.876
19	Nusa Tenggara Timur	3.940.840	4.137.882	4.344.776	4.562.015	4.790.115
20	Kalimantan Barat	1.641.527	1.723.604	1.809.784	1.900.273	1.995.287
21	Kalimantan Tengah	2.487.411	2.611.782	2.742.371	2.879.490	3.023.464
22	Kalimantan Selatan	3.470.803	3.644.343	3.826.560	4.017.888	4.218.782
23	Kalimantan Timur	1.493.165	1.567.823	1.646.214	1.728.525	1.814.951
24	Kalimantan Utara	398.207	418.117	439.023	460.974	484.022
25	Sulawesi Utara	1.122.199	1.178.309	1.237.224	1.299.085	1.364.040
26	Sulawesi Tengah	1.385.776	1.455.065	1.527.818	1.604.209	1.684.419
27	Sulawesi Selatan	10.558.825	11.086.766	11.641.104	12.223.159	12.834.318
28	Sulawesi Tenggara	1.991.560	2.091.138	2.195.695	2.305.479	2.420.753
29	Gorontalo	605.312	635.577	667.356	700.724	735.760
30	Sulawesi Barat	1.891.001	1.985.551	2.084.829	2.189.071	2.298.524
31	Maluku	426.931	448.278	470.692	494.226	518.938
32	Maluku Utara	232.280	243.894	256.089	268.893	282.338
33	Papua Barat	171.868	180.462	189.485	198.959	208.907
34	Papua	173.911	182.607	191.737	201.324	211.390
35	Papua Barat Daya	1.082.881	1.137.025	1.193.877	1.253.571	1.316.249
36	Papua Selatan	200.702	210.737	221.274	232.338	243.955
37	Papua Tengah	159.097	167.052	175.404	184.174	193.383
38	Papua Pegunungan	71.603	75.183	78.942	82.889	87.033
Nasional		153.793.182	161.482.841	169.556.983	178.034.832	186.936.574

PROYEKSI PRODUKSI DAGING SAPI (*MEAT YIELD*) TAHUN 2025-2029 (TON)

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	11.202	11.402	11.605	11.811	12.021
2	Sumatera Utara	18.570	18.900	19.237	19.579	19.928
3	Sumatera Barat	15.166	15.436	15.711	15.991	16.275
4	Riau	13.697	13.941	14.189	14.441	14.698
5	Jambi	3.635	3.700	3.766	3.833	3.901
6	Sumatera Selatan	12.021	12.235	12.453	12.674	12.900
7	Bengkulu	1.794	1.826	1.859	1.892	1.925
8	Lampung	18.956	19.294	19.637	19.987	20.343
9	Kepulauan Bangka Belitung	2.535	2.580	2.626	2.673	2.720
10	Kepulauan Riau	2.242	2.281	2.322	2.363	2.405
11	DKI Jakarta	15.191	15.461	15.736	16.017	16.302
12	Jawa Barat	86.759	88.303	89.875	91.475	93.103
13	Jawa Tengah	84.758	86.267	87.802	89.365	90.956
14	DI. Yogyakarta	6.820	6.941	7.065	7.191	7.319
15	Jawa Timur	98.632	100.388	102.175	103.994	105.845
16	Banten	19.603	19.952	20.307	20.668	21.036
17	Bali	4.969	5.058	5.148	5.239	5.333
18	Nusa Tenggara Barat	11.559	11.765	11.974	12.187	12.404
19	Nusa Tenggara Timur	6.346	6.459	6.573	6.690	6.810
20	Kalimantan Barat	3.959	4.030	4.101	4.175	4.249
21	Kalimantan Tengah	1.474	1.500	1.527	1.554	1.582
22	Kalimantan Selatan	5.367	5.462	5.560	5.659	5.759
23	Kalimantan Timur	6.582	6.699	6.818	6.940	7.063
24	Kalimantan Utara	644	656	667	679	691
25	Sulawesi Utara	1.873	1.907	1.941	1.975	2.010
26	Sulawesi Tengah	3.917	3.987	4.058	4.130	4.204
27	Sulawesi Selatan	13.967	14.215	14.468	14.726	14.988
28	Sulawesi Tenggara	6.092	6.200	6.311	6.423	6.537
29	Gorontalo	1.935	1.969	2.004	2.040	2.076
30	Sulawesi Barat	1.195	1.216	1.238	1.260	1.283
31	Maluku	1.302	1.325	1.349	1.373	1.397
32	Maluku Utara	1.558	1.585	1.613	1.642	1.671
33	Papua Barat	756	769	783	797	811
34	Papua	695	708	720	733	746
35	Papua Barat Daya	331	337	343	349	355
36	Papua Selatan	447	455	463	471	480
37	Papua Tengah	679	691	703	716	729
38	Papua Pegunungan	148	151	154	156	159
Nasional		487.376	496.051	504.881	513.868	523.014

PROYEKSI PRODUKSI DAGING KERBAU (*MEAT YIELD*) TAHUN 2025-2029
(TON)

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	1.979	2.014	2.050	2.087	2.124
2	Sumatera Utara	1.672	1.702	1.733	1.763	1.795
3	Sumatera Barat	678	690	702	715	728
4	Riau	1.511	1.538	1.565	1.593	1.621
5	Jambi	1.219	1.241	1.263	1.286	1.308
6	Sumatera Selatan	692	704	716	729	742
7	Bengkulu	162	165	168	171	174
8	Lampung	97	99	101	103	104
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	44	45	46	47	48
12	Jawa Barat	1.422	1.447	1.473	1.499	1.526
13	Jawa Tengah	1.254	1.276	1.299	1.322	1.345
14	DI. Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	61	62	63	64	66
16	Banten	1.382	1.407	1.432	1.457	1.483
17	Bali	5	5	5	5	5
18	Nusa Tenggara Barat	428	436	444	452	460
19	Nusa Tenggara Timur	838	853	868	884	899
20	Kalimantan Barat	56	57	58	59	60
21	Kalimantan Tengah	49	49	50	51	52
22	Kalimantan Selatan	255	259	264	269	273
23	Kalimantan Timur	93	95	97	98	100
24	Kalimantan Utara	21	22	22	22	23
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	2	2	2	2	2
27	Sulawesi Selatan	3.646	3.711	3.777	3.844	3.913
28	Sulawesi Tenggara	11	11	11	11	11
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	99	100	102	104	106
31	Maluku	18	19	19	19	20
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-
35	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
36	Papua Selatan	7	7	7	8	8
37	Papua Tengah	-	-	-	-	-
38	Papua Pegunungan	2	2	2	2	2
Nasional		17.703	18.018	18.339	18.666	18.998

PROYEKSI PRODUKSI DAGING KAMBING (*MEAT YIELD*) TAHUN 2025-2029
(TON)

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	1.365	1.387	1.409	1.432	1.455
2	Sumatera Utara	727	739	751	764	776
3	Sumatera Barat	79	80	82	83	84
4	Riau	1.292	1.313	1.335	1.356	1.378
5	Jambi	431	438	445	452	459
6	Sumatera Selatan	1.236	1.256	1.277	1.297	1.318
7	Bengkulu	79	81	82	83	85
8	Lampung	5.033	5.115	5.197	5.282	5.367
9	Kepulauan Bangka Belitung	84	85	86	88	89
10	Kepulauan Riau	353	358	364	370	376
11	DKI Jakarta	1.082	1.099	1.117	1.135	1.153
12	Jawa Barat	4.828	4.906	4.986	5.066	5.149
13	Jawa Tengah	11.785	11.976	12.170	12.367	12.567
14	DI. Yogyakarta	617	627	637	647	658
15	Jawa Timur	18.789	19.093	19.403	19.717	20.037
16	Banten	2.419	2.458	2.498	2.539	2.580
17	Bali	2.153	2.188	2.223	2.260	2.296
18	Nusa Tenggara Barat	470	478	485	493	501
19	Nusa Tenggara Timur	695	707	718	730	741
20	Kalimantan Barat	363	369	375	381	387
21	Kalimantan Tengah	6	6	6	6	6
22	Kalimantan Selatan	749	761	774	786	799
23	Kalimantan Timur	850	864	878	892	907
24	Kalimantan Utara	111	113	114	116	118
25	Sulawesi Utara	21	21	22	22	22
26	Sulawesi Tengah	157	160	162	165	168
27	Sulawesi Selatan	1.331	1.353	1.375	1.397	1.419
28	Sulawesi Tenggara	290	294	299	304	309
29	Gorontalo	166	168	171	174	177
30	Sulawesi Barat	44	45	45	46	47
31	Maluku	22	22	23	23	24
32	Maluku Utara	112	113	115	117	119
33	Papua Barat	12	12	13	13	13
34	Papua	19	20	20	20	21
35	Papua Barat Daya	14	14	14	14	15
36	Papua Selatan	9	9	9	10	10
37	Papua Tengah	2	2	2	2	2
38	Papua Pegunungan	12	13	13	13	13
Nasional		57.807	58.743	59.695	60.662	61.645

PROYEKSI PRODUKSI DAGING DOMBA (*MEAT YIELD*) TAHUN 2025-2029
(TON)

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	396	402	409	415	422
2	Sumatera Utara	458	466	473	481	489
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	44	45	45	46	47
5	Jambi	78	79	80	82	83
6	Sumatera Selatan	49	49	50	51	52
7	Bengkulu	1	1	1	1	1
8	Lampung	133	136	138	140	142
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	75	76	77	78	80
12	Jawa Barat	19.425	19.740	20.060	20.385	20.715
13	Jawa Tengah	6.617	6.725	6.834	6.944	7.057
14	DI. Yogyakarta	840	853	867	881	895
15	Jawa Timur	4.718	4.794	4.872	4.951	5.031
16	Banten	2.152	2.187	2.223	2.259	2.295
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	1	1	1	1	1
19	Nusa Tenggara Timur	98	99	101	103	104
20	Kalimantan Barat	2	2	2	2	2
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	3	3	3	3	3
23	Kalimantan Timur	5	5	5	5	5
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	51	52	53	54	55
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-
35	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
36	Papua Selatan	-	-	-	-	-
37	Papua Tengah	-	-	-	-	-
38	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
Nasional		35.146	35.715	36.294	36.882	37.479

PROYEKSI PRODUKSI DAGING BABI (*MEAT YIELD*) TAHUN 2025-2029 (TON)

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	59	59	59	60	60
2	Sumatera Utara	11.414	11.488	11.563	11.638	11.714
3	Sumatera Barat	120	121	121	122	123
4	Riau	1.060	1.067	1.074	1.081	1.088
5	Jambi	160	161	162	163	164
6	Sumatera Selatan	111	112	113	113	114
7	Bengkulu	13	14	14	14	14
8	Lampung	813	818	823	829	834
9	Kepulauan Bangka Belitung	125	126	126	127	128
10	Kepulauan Riau	1.125	1.132	1.140	1.147	1.155
11	DKI Jakarta	5.573	5.609	5.645	5.682	5.719
12	Jawa Barat	2.614	2.631	2.648	2.665	2.683
13	Jawa Tengah	1.982	1.995	2.008	2.021	2.034
14	DI. Yogyakarta	525	528	532	535	539
15	Jawa Timur	4.076	4.102	4.129	4.156	4.183
16	Banten	2.396	2.411	2.427	2.443	2.459
17	Bali	66.662	67.095	67.532	67.971	68.412
18	Nusa Tenggara Barat	74	74	75	75	76
19	Nusa Tenggara Timur	13.481	13.569	13.657	13.746	13.835
20	Kalimantan Barat	3.875	3.901	3.926	3.951	3.977
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	37	37	38	38	38
23	Kalimantan Timur	977	983	990	996	1.003
24	Kalimantan Utara	278	279	281	283	285
25	Sulawesi Utara	3.686	3.710	3.735	3.759	3.783
26	Sulawesi Tengah	736	741	745	750	755
27	Sulawesi Selatan	4.245	4.273	4.301	4.328	4.356
28	Sulawesi Tenggara	171	172	173	175	176
29	Gorontalo	9	9	9	9	10
30	Sulawesi Barat	646	650	654	659	663
31	Maluku	230	232	233	235	236
32	Maluku Utara	100	100	101	102	102
33	Papua Barat	630	635	639	643	647
34	Papua	1.250	1.258	1.266	1.274	1.282
35	Papua Barat Daya	886	892	898	903	909
36	Papua Selatan	157	158	159	160	161
37	Papua Tengah	128	129	129	130	131
38	Papua Pegunungan	1.299	1.308	1.316	1.325	1.333
Nasional		131.723	132.579	133.441	134.308	135.181

**PROYEKSI PRODUKSI DAGING AYAM RAS PEDAGING (MEAT YIELD) TAHUN
2025-2029 (TON)**

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	46.177	47.735	49.345	51.010	52.730
2	Sumatera Utara	209.009	216.062	223.351	230.885	238.672
3	Sumatera Barat	68.859	71.183	73.584	76.067	78.632
4	Riau	110.580	114.311	118.168	122.154	126.274
5	Jambi	60.758	62.809	64.928	67.118	69.381
6	Sumatera Selatan	141.770	146.554	151.498	156.608	161.890
7	Bengkulu	13.772	14.237	14.717	15.213	15.726
8	Lampung	111.795	115.567	119.466	123.496	127.661
9	Kepulauan Bangka Belitung	29.164	30.148	31.165	32.216	33.303
10	Kepulauan Riau	23.088	23.867	24.672	25.504	26.364
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	905.564	936.121	967.703	1.000.345	1.034.083
13	Jawa Tengah	802.013	829.076	857.047	885.956	915.836
14	DI Yogyakarta	69.669	72.020	74.450	76.961	79.557
15	Jawa Timur	538.724	556.903	575.691	595.110	615.181
16	Banten	238.983	247.047	255.382	263.996	272.900
17	Bali	98.834	102.169	105.616	109.179	112.861
18	Nusa Tenggara Barat	50.632	52.340	54.106	55.931	57.817
19	Nusa Tenggara Timur	21.063	21.773	22.508	23.267	24.052
20	Kalimantan Barat	73.315	75.789	78.346	80.989	83.720
21	Kalimantan Tengah	41.721	43.128	44.583	46.087	47.642
22	Kalimantan Selatan	119.897	123.943	128.124	132.446	136.913
23	Kalimantan Timur	76.555	79.139	81.809	84.568	87.420
24	Kalimantan Utara	6.278	6.490	6.709	6.935	7.169
25	Sulawesi Utara	15.392	15.911	16.448	17.003	17.576
26	Sulawesi Tengah	12.152	12.562	12.986	13.424	13.877
27	Sulawesi Selatan	126.939	131.222	135.649	140.225	144.954
28	Sulawesi Tenggara	10.937	11.306	11.687	12.082	12.489
29	Gorontalo	8.506	8.793	9.090	9.396	9.713
30	Sulawesi Barat	6.730	6.957	7.192	7.435	7.685
31	Maluku	1.013	1.047	1.083	1.119	1.157
32	Maluku Utara	142	147	152	157	162
33	Papua Barat	546	565	584	604	624
34	Papua	5.818	6.014	6.217	6.427	6.643
35	Papua Barat Daya	1.479	1.528	1.580	1.633	1.688
36	Papua Selatan	606	627	648	670	692
37	Papua Tengah	2.056	2.125	2.197	2.271	2.348
38	Papua Pegunungan	26	27	28	29	30
Nasional		4.050.562	4.187.242	4.328.509	4.474.516	4.625.422

PROYEKSI PRODUKSI DAGING AYAM BURAS (*MEAT YIELD*) TAHUN 2025-2029 (TON)

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	3.594	3.637	3.681	3.725	3.770
2	Sumatera Utara	7.666	7.758	7.851	7.946	8.041
3	Sumatera Barat	3.627	3.671	3.715	3.759	3.804
4	Riau	2.600	2.631	2.663	2.695	2.727
5	Jambi	1.405	1.422	1.439	1.457	1.474
6	Sumatera Selatan	5.862	5.933	6.004	6.076	6.149
7	Bengkulu	672	680	688	697	705
8	Lampung	6.749	6.830	6.912	6.995	7.079
9	Kepulauan Bangka Belitung	452	458	463	469	474
10	Kepulauan Riau	635	642	650	658	666
11	DKI Jakarta	2.082	2.107	2.132	2.158	2.183
12	Jawa Barat	29.100	29.449	29.802	30.160	30.522
13	Jawa Tengah	13.719	13.883	14.050	14.218	14.389
14	DI Yogyakarta	5.198	5.261	5.324	5.388	5.452
15	Jawa Timur	40.080	40.561	41.048	41.540	42.039
16	Banten	4.270	4.322	4.373	4.426	4.479
17	Bali	1.866	1.888	1.911	1.934	1.957
18	Nusa Tenggara Barat	2.997	3.032	3.069	3.106	3.143
19	Nusa Tenggara Timur	4.236	4.287	4.338	4.390	4.443
20	Kalimantan Barat	1.465	1.482	1.500	1.518	1.536
21	Kalimantan Tengah	949	960	972	983	995
22	Kalimantan Selatan	1.420	1.437	1.454	1.471	1.489
23	Kalimantan Timur	2.963	2.999	3.035	3.071	3.108
24	Kalimantan Utara	1.054	1.067	1.080	1.093	1.106
25	Sulawesi Utara	1.162	1.175	1.189	1.204	1.218
26	Sulawesi Tengah	2.465	2.495	2.525	2.555	2.586
27	Sulawesi Selatan	1.970	1.994	2.018	2.042	2.067
28	Sulawesi Tenggara	1.880	1.902	1.925	1.948	1.971
29	Gorontalo	929	941	952	963	975
30	Sulawesi Barat	2.280	2.307	2.335	2.362	2.391
31	Maluku	448	453	459	464	470
32	Maluku Utara	1.039	1.052	1.064	1.077	1.090
33	Papua Barat	193	195	198	200	203
34	Papua	374	378	383	387	392
35	Papua Barat Daya	293	297	300	304	308
36	Papua Selatan	320	324	328	332	336
37	Papua Tengah	273	276	279	283	286
38	Papua Pegunungan	45	46	46	47	47
Nasional		158.332	160.232	162.155	164.101	166.070

PROYEKSI PRODUKSI DAGING ITIK (*MEAT YIELD*) TAHUN 2025-2029 (TON)

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	351	351	351	351	351
2	Sumatera Utara	1.146	1.147	1.147	1.147	1.147
3	Sumatera Barat	420	420	420	420	420
4	Riau	187	187	187	187	187
5	Jambi	690	690	690	690	690
6	Sumatera Selatan	1.890	1.891	1.891	1.891	1.891
7	Bengkulu	40	40	40	40	40
8	Lampung	550	550	550	551	551
9	Kepulauan Bangka Belitung	79	79	79	79	79
10	Kepulauan Riau	12	12	12	12	12
11	DKI Jakarta	223	223	223	223	223
12	Jawa Barat	7.009	7.010	7.010	7.011	7.012
13	Jawa Tengah	8.278	8.279	8.280	8.281	8.281
14	DI Yogyakarta	416	416	416	416	417
15	Jawa Timur	6.791	6.791	6.792	6.793	6.794
16	Banten	3.116	3.116	3.116	3.117	3.117
17	Bali	220	220	220	220	220
18	Nusa Tenggara Barat	345	345	345	345	345
19	Nusa Tenggara Timur	7	7	7	7	7
20	Kalimantan Barat	93	93	93	93	93
21	Kalimantan Tengah	64	64	64	64	64
22	Kalimantan Selatan	827	827	827	827	827
23	Kalimantan Timur	64	64	64	64	64
24	Kalimantan Utara	22	22	22	22	22
25	Sulawesi Utara	60	60	60	60	60
26	Sulawesi Tengah	171	171	171	171	171
27	Sulawesi Selatan	445	445	445	445	445
28	Sulawesi Tenggara	92	92	92	92	92
29	Gorontalo	42	42	42	42	42
30	Sulawesi Barat	51	51	51	51	51
31	Maluku	29	29	29	29	29
32	Maluku Utara	69	69	69	69	69
33	Papua Barat	3	3	3	3	3
34	Papua	2	2	2	2	2
35	Papua Barat Daya	2	2	2	2	2
36	Papua Selatan	12	12	12	12	12
37	Papua Tengah	2	2	2	2	2
38	Papua Pegunungan	5	5	5	5	5
Nasional		33.827	33.830	33.834	33.837	33.840

**PROYEKSI PRODUKSI TELUR AYAM RAS PETELUR TAHUN 2025-2029
(TON)**

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	3.357	3.498	3.647	3.802	3.964
2	Sumatera Utara	618.662	644.771	672.079	700.641	730.516
3	Sumatera Barat	368.330	383.874	400.132	417.137	434.924
4	Riau	6.200	6.461	6.735	7.021	7.320
5	Jambi	43.581	45.421	47.344	49.356	51.461
6	Sumatera Selatan	243.662	253.945	264.700	275.950	287.716
7	Bengkulu	9.009	9.389	9.787	10.203	10.638
8	Lampung	230.894	240.638	250.830	261.490	272.639
9	Kepulauan Bangka Belitung	16.206	16.890	17.605	18.353	19.136
10	Kepulauan Riau	21.716	22.632	23.590	24.593	25.642
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	786.960	820.171	854.908	891.240	929.242
13	Jawa Tengah	872.250	909.061	947.562	987.832	1.029.952
14	DI. Yogyakarta	128.714	134.146	139.828	145.770	151.986
15	Jawa Timur	2.172.894	2.264.596	2.360.508	2.460.826	2.565.753
16	Banten	339.560	353.891	368.879	384.556	400.953
17	Bali	242.042	252.257	262.941	274.115	285.803
18	Nusa Tenggara Barat	53.240	55.487	57.837	60.295	62.866
19	Nusa Tenggara Timur	5.203	5.423	5.653	5.893	6.144
20	Kalimantan Barat	94.271	98.250	102.411	106.763	111.316
21	Kalimantan Tengah	6.044	6.299	6.566	6.845	7.137
22	Kalimantan Selatan	118.831	123.846	129.091	134.577	140.316
23	Kalimantan Timur	39.077	40.727	42.451	44.255	46.142
24	Kalimantan Utara	2.331	2.429	2.532	2.640	2.752
25	Sulawesi Utara	40.068	41.759	43.528	45.378	47.312
26	Sulawesi Tengah	25.256	26.322	27.437	28.603	29.822
27	Sulawesi Selatan	307.460	320.436	334.007	348.202	363.049
28	Sulawesi Tenggara	6.305	6.571	6.849	7.140	7.445
29	Gorontalo	7.368	7.679	8.004	8.345	8.701
30	Sulawesi Barat	3.015	3.142	3.275	3.415	3.560
31	Maluku	1.654	1.724	1.797	1.873	1.953
32	Maluku Utara	196	204	213	222	231
33	Papua Barat	1.278	1.332	1.389	1.448	1.510
34	Papua	4.284	4.465	4.654	4.851	5.058
35	Papua Barat Daya	3.927	4.092	4.266	4.447	4.637
36	Papua Selatan	4.940	5.149	5.367	5.595	5.833
37	Papua Tengah	5.778	6.022	6.276	6.543	6.822
38	Papua Pegunungan	660	688	717	748	780
Nasional		6.835.223	7.123.687	7.425.395	7.740.963	8.071.031

PROYEKSI PRODUKSI TELUR AYAM BURAS TAHUN 2025-2029 (TON)

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	8.504	8.929	9.376	9.844	10.337
2	Sumatera Utara	5.529	5.806	6.096	6.401	6.721
3	Sumatera Barat	2.970	3.119	3.275	3.439	3.610
4	Riau	9.356	9.824	10.315	10.831	11.373
5	Jambi	1.913	2.008	2.109	2.214	2.325
6	Sumatera Selatan	9.079	9.533	10.010	10.510	11.036
7	Bengkulu	1.447	1.520	1.596	1.675	1.759
8	Lampung	31.982	33.581	35.260	37.023	38.874
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.566	1.645	1.727	1.813	1.904
10	Kepulauan Riau	2.459	2.582	2.711	2.847	2.989
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	53.151	55.808	58.599	61.528	64.605
13	Jawa Tengah	68.797	72.237	75.848	79.641	83.623
14	DI Yogyakarta	2.422	2.543	2.670	2.804	2.944
15	Jawa Timur	19.643	20.625	21.656	22.739	23.876
16	Banten	7.947	8.344	8.761	9.199	9.659
17	Bali	17.011	17.861	18.754	19.692	20.677
18	Nusa Tenggara Barat	6.285	6.600	6.930	7.276	7.640
19	Nusa Tenggara Timur	4.684	4.918	5.164	5.422	5.694
20	Kalimantan Barat	1.316	1.382	1.451	1.524	1.600
21	Kalimantan Tengah	2.616	2.746	2.884	3.028	3.179
22	Kalimantan Selatan	3.084	3.238	3.400	3.570	3.749
23	Kalimantan Timur	1.116	1.172	1.230	1.292	1.356
24	Kalimantan Utara	788	828	869	913	958
25	Sulawesi Utara	1.073	1.127	1.183	1.242	1.304
26	Sulawesi Tengah	1.077	1.131	1.188	1.247	1.309
27	Sulawesi Selatan	8.171	8.579	9.008	9.459	9.931
28	Sulawesi Tenggara	2.415	2.535	2.662	2.795	2.935
29	Gorontalo	351	369	387	406	427
30	Sulawesi Barat	4.830	5.072	5.325	5.592	5.871
31	Maluku	2.057	2.160	2.268	2.381	2.500
32	Maluku Utara	1.143	1.200	1.260	1.323	1.389
33	Papua Barat	832	873	917	963	1.011
34	Papua	278	292	307	322	338
35	Papua Barat Daya	881	925	971	1.020	1.071
36	Papua Selatan	307	322	339	356	373
37	Papua Tengah	253	266	279	293	308
38	Papua Pegunungan	136	143	150	158	166
Nasional		287.469	301.843	316.935	332.782	349.421

PROYEKSI PRODUKSI TELUR PUYUH TAHUN 2025-2029 (TON)

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	53	53	54	54	55
2	Sumatera Utara	821	827	832	838	844
3	Sumatera Barat	2.282	2.298	2.314	2.331	2.347
4	Riau	96	97	98	99	99
5	Jambi	129	130	131	132	133
6	Sumatera Selatan	90	90	91	92	92
7	Bengkulu	49	49	49	50	50
8	Lampung	445	448	451	454	458
9	Kepulauan Bangka Belitung	66	67	68	68	68
10	Kepulauan Riau	53	54	54	54	55
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	1.325	1.335	1.344	1.353	1.363
13	Jawa Tengah	11.694	11.776	11.859	11.941	12.025
14	DI Yogyakarta	2.613	2.631	2.649	2.668	2.687
15	Jawa Timur	6.915	6.963	7.012	7.061	7.110
16	Banten	86	87	87	88	88
17	Bali	68	68	69	69	70
18	Nusa Tenggara Barat	201	202	204	205	207
19	Nusa Tenggara Timur	8	8	8	8	8
20	Kalimantan Barat	98	99	99	100	101
21	Kalimantan Tengah	6	6	6	6	6
22	Kalimantan Selatan	438	441	444	447	450
23	Kalimantan Timur	2	2	2	2	2
24	Kalimantan Utara	3	3	3	3	3
25	Sulawesi Utara	61	61	61	62	62
26	Sulawesi Tengah	65	66	66	66	67
27	Sulawesi Selatan	85	85	86	87	87
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	30	30	31	31	31
30	Sulawesi Barat	2	2	2	2	2
31	Maluku	2	2	2	2	2
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	2	2	2	2	2
34	Papua	5	5	5	5	5
35	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
36	Papua Selatan	4	4	4	4	4
37	Papua Tengah	14	15	15	15	15
38	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
Nasional		27.811	28.006	28.202	28.399	28.598

PROYEKSI PRODUKSI TELUR ITIK TAHUN 2025-2029 (TON)

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	5.204	5.464	5.737	6.024	6.326
2	Sumatera Utara	6.157	6.464	6.787	7.127	7.483
3	Sumatera Barat	8.404	8.825	9.266	9.729	10.216
4	Riau	1.525	1.602	1.682	1.766	1.854
5	Jambi	623	654	686	721	757
6	Sumatera Selatan	16.692	17.527	18.403	19.323	20.290
7	Bengkulu	384	403	423	444	466
8	Lampung	7.079	7.433	7.804	8.194	8.604
9	Kepulauan Bangka Belitung	341	358	376	394	414
10	Kepulauan Riau	245	257	270	284	298
11	DKI Jakarta	165	174	182	191	201
12	Jawa Barat	45.322	47.588	49.968	52.466	55.089
13	Jawa Tengah	40.639	42.671	44.805	47.045	49.397
14	DI Yogyakarta	2.273	2.386	2.506	2.631	2.762
15	Jawa Timur	46.159	48.467	50.891	53.435	56.107
16	Banten	10.768	11.306	11.871	12.465	13.088
17	Bali	1.024	1.075	1.128	1.185	1.244
18	Nusa Tenggara Barat	3.820	4.011	4.211	4.422	4.643
19	Nusa Tenggara Timur	89	94	98	103	109
20	Kalimantan Barat	629	660	693	728	765
21	Kalimantan Tengah	1.420	1.491	1.566	1.644	1.726
22	Kalimantan Selatan	24.880	26.124	27.430	28.802	30.242
23	Kalimantan Timur	799	839	881	925	971
24	Kalimantan Utara	75	79	83	87	91
25	Sulawesi Utara	522	548	576	605	635
26	Sulawesi Tengah	1.243	1.305	1.371	1.439	1.511
27	Sulawesi Selatan	21.545	22.622	23.753	24.941	26.188
28	Sulawesi Tenggara	2.084	2.188	2.298	2.413	2.533
29	Gorontalo	192	201	212	222	233
30	Sulawesi Barat	625	657	689	724	760
31	Maluku	89	93	98	103	108
32	Maluku Utara	29	30	32	33	35
33	Papua Barat	33	35	37	38	40
34	Papua	32	34	35	37	39
35	Papua Barat Daya	42	44	47	49	51
36	Papua Selatan	194	204	214	225	236
37	Papua Tengah	264	277	291	305	321
38	Papua Pegunungan	5	5	5	6	6
Nasional		251.615	264.195	277.405	291.275	305.839

PROYEKSI PRODUKSI TELUR ITIK MANILA TAHUN 2025-2029 (TON)

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	1.868	1.943	2.021	2.102	2.186
2	Sumatera Utara	1.932	2.009	2.090	2.173	2.260
3	Sumatera Barat	75	78	81	84	87
4	Riau	37	39	40	42	44
5	Jambi	473	492	511	532	553
6	Sumatera Selatan	1.864	1.939	2.017	2.097	2.181
7	Bengkulu	361	375	390	406	422
8	Lampung	1.285	1.336	1.389	1.445	1.503
9	Kepulauan Bangka Belitung	356	371	386	401	417
10	Kepulauan Riau	57	59	62	64	67
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	9.519	9.900	10.295	10.707	11.136
13	Jawa Tengah	4.076	4.239	4.409	4.585	4.768
14	DI Yogyakarta	510	530	552	574	597
15	Jawa Timur	1.938	2.016	2.096	2.180	2.268
16	Banten	1.958	2.036	2.118	2.202	2.290
17	Bali	107	111	116	120	125
18	Nusa Tenggara Barat	336	349	363	378	393
19	Nusa Tenggara Timur	812	845	879	914	950
20	Kalimantan Barat	137	143	148	154	160
21	Kalimantan Tengah	8	9	9	10	10
22	Kalimantan Selatan	109	113	118	122	127
23	Kalimantan Timur	257	267	278	289	300
24	Kalimantan Utara	73	76	79	82	85
25	Sulawesi Utara	392	408	424	441	459
26	Sulawesi Tengah	178	185	193	201	208
27	Sulawesi Selatan	4.347	4.521	4.702	4.890	5.086
28	Sulawesi Tenggara	107	111	115	120	125
29	Gorontalo	87	90	94	97	101
30	Sulawesi Barat	170	177	184	191	199
31	Maluku	29	30	31	33	34
32	Maluku Utara	99	103	107	112	116
33	Papua Barat	31	32	33	35	36
34	Papua	28	29	30	31	33
35	Papua Barat Daya	6	6	7	7	7
36	Papua Selatan	110	115	119	124	129
37	Papua Tengah	394	410	426	443	461
38	Papua Pegunungan	6	6	6	6	7
Nasional		34.132	35.498	36.918	38.394	39.930

PROYEKSI PRODUKSI SUSU TAHUN 2025-2029 (TON)

No	Provinsi	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aceh	11	11	11	11	12
2	Sumatera Utara	6.584	6.794	7.011	7.141	7.172
3	Sumatera Barat	777	802	828	843	847
4	Riau	28	29	30	31	31
5	Jambi	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	43	45	46	47	47
8	Lampung	4.190	4.323	4.461	4.544	4.564
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	1.966	2.028	2.093	2.132	2.141
12	Jawa Barat	260.684	269.012	277.584	282.732	283.960
13	Jawa Tengah	80.103	82.662	85.296	86.878	87.255
14	DI, Yogyakarta	3.921	4.047	4.176	4.253	4.272
15	Jawa Timur	506.498	522.679	539.336	549.337	551.724
16	Banten	65	67	69	70	70
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	43	45	46	47	47
20	Kalimantan Barat	5	5	5	5	6
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	57	58	60	62	62
23	Kalimantan Timur	48	50	52	52	53
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	1.217	1.256	1.296	1.320	1.325
28	Sulawesi Tenggara	45	47	48	49	49
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-
35	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
36	Papua Selatan	-	-	-	-	-
37	Papua Tengah	-	-	-	-	-
38	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-
Nasional		866.285	893.960	922.448	939.554	943.637

Lampiran . Manajemen Risiko Sasaran Program Diijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029

No	Jenis Konteks	Nama Konteks	Indikator*	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perilaku Risiko	Penanggung Jawab
1	Sasaran Program	Terpenuhinya produksi komoditas peternakan	Produksi Daging Produksi Telur Produksi Susu	Produksi peternakan menurun	a. Gangguan pasokan pakan b. Penyakit ternak massal c. Ketergantungan input impor d. Fluktuasi harga	a. Pemantauan harga dan stok pakan/bahan pakan b. Mendorong cadangan bahan pakan pemerintah c. Penguatan program pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular d. Pembinaan intensif peternak melalui UPT dan Dinas e. Pengembangan sistem peringatan dini risiko produksi ternak f. Penguatan kemitraan dan akses pembiayaan peternak	Seluruh Direktorat dan Sekretariat Lingkup Diijen PKH
		Terjaminnya keamanan komoditas peternakan	Indeks Keamanan komoditas peternakan	Indeks keamanan komoditas peternakan rendah	a. Masih terdapat unit usaha yang belum ber-NKV b. Masih terdapat produk hewan segar berkemasan belum teregistrasi c. Masih terdapat produk hewan yang belum memenuhi persyaratan keamanan d. Unit usaha pengeluaran produk hewan belum memenuhi persyaratan sanitasi e. Belum optimalnya pemeriksaan AMPM di RPH f. Belum optimalnya pengawasan unit usaha, peredaran dan lalu lintas produk hewan	a. Penjaminan keamanan dan kesehatan produk hewan b. Penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha peternakan	Direktorat Kesnawet

No	Jenis Kontes	Nama Kontes	Indikator*	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perlakuan Risiko	Pemangung Jawab
		Terkendalnya wilayah dari penyakit hewan	Persentase jumlah wilayah / kawasan yang terkendali dari penyakit hewan	Wilayah dari penyakit hewan tidak terkendali	a. Anggaran vaksin dan operasional vaksinasi tidak memadai b. Penerapan biosekuriti peternakan rendah c. Tidak semua kejadian PHMS dilaporkan ke Iskhmas d. Respon penanganan kasus PHMS lambat e. Masuknya PHM baru atau PHM dengan jenis virus baru f. Kekurangan SDM untuk pelaksanaan vaksinasi dan penanganan kasus di lapang	a. Melakukan identifikasi dan pemetaan prioritas berdasarkan penyakit, wilayah, spesies hewan dan waktu pelaksanaan vaksinasi b. Menyiapkan standar penilaian kompartemen bebas PHMS dan standar minimal biosekuriti peternakan, dan pembinaan penerapan biosekuriti untuk peternak kecil dan menengah c. Melakukan pelatihan pelaporan dan komunikasi risiko secara berkala d. Pemantauan kejadian penyakit (surveilans aktif dan pasif) e. Pembentukan tim respon cepat dan Melakukan pelatihan secara berkala f. Melakukan simulasi kesiagaan darurat PHM secara berkala g. Menyiapkan mekanisme percepatan penambahan tenaga kerja ketika ada kebutuhan mendesak h. Penguasaan lalu lintas hewan dan produk hewan antar wilayah	Direktorat Kewan
		Terkendalnya wilayah dari zoonosis & penyimpanan produk hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis dan penyimpanan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia	Wilayah zoonosis & penyimpanan produk hewan tidak terkendali	a. Penularan zoonosis b. Produk tidak memenuhi syarat keamanan pangan c. Lemahnya pengawasan dan koordinasi lintas sektor	a. Penjaminan keamanan dan kesehatan produk hewan b. Pencegahan dan pengendalian zoonosis	Direktorat Kesmavet

No	Jenis Konteks	Nama Konteks	Indikator*	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pertakuan Risiko	Pemangung Jawab
		Meningkatnya indeks harga yang diterima peternak	Indeks Harga yang diterima peternak	Indeks harga yang diterima peternak rendah/ indeks harga yang diterima turun dibawah target tahunan yang telah ditetapkan	a. Ketimpangan harga tingkat produsen dan konsumen b. Fluktuasi biaya input produksi c. Akses pasar terbatas	a. Pengaturan harga acuan terendah di tingkat peternak dan tertinggi di tingkat konsumen berkoordinasi dengan K/L terkait b. Penyediaan informasi serta pemantauan harga dan pasar c. Peningkatan akses pasar dalam negeri dan ekspor produk peternakan seperti lewat promosi/temu bisnis d. Pengendalian penyakit hewan	Direktorat Hiltirnak
		Terjaminnya mutu komoditas peternakan	Indeks mutu komoditas peternakan	Indeks mutu komoditas peternakan rendah	a. Produk belum memenuhi standar mutu b. Kompetensi SDM belum optimal c. Dokumen Sistem Mutu belum optimal	a. Pendampingan penerapan dan/atau fasilitasi sertifikasi mutu dan izin edar berkolaborasi dengan K/L atau Lembaga Sertifikasi terkait b. Peningkatan kapasitas SDM melalui Bimtek/Pelatihan Penjaminan Mutu c. Pembinaan dan pendampingan penyusunan Dokumen Sistem Mutu d. Pengawasan mutu terhadap produk peternakan yang beredar	Direktorat Hiltirnak
		Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan & kesehatan hewan	Volume ekspor komoditas peternakan	Volume ekspor komoditas peternakan menurun	a. Hambatan tarif/ non-tarif b. Permintaan pasar turun c. Perubahan regulasi negara mitra d. Persaingan global e. Wabah penyakit pada ternak	a. Harmonisasi SPS dan TBT, koordinasi K/L dan peningkatan kerjasama perdagangan. b. Diversifikasi negara tujuan ekspor, promosi dan misi dagang. c. Negosiasi dan harmonisasi kerjasama teknis dengan otoritas negara tujuan. d. Promosi dan misi dagang ke pasar potensial, pendampingan sertifikasi dan standarisasi internasional, Penyediaan informasi pasar ekspor.	Direktorat Hiltirnak

No	Jenis Konteks	Nama Konteks	Indikator*	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Perilaku Risiko	Penanggung Jawab
		Meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang menerapkan hilirisasi	Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan	Rendahnya indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan	a. Teknologi pengolahan rendah b. Modal dan SDM terbatas c. Minim inovasi produk	a. Penyusunan/reviu regulasi dan NSPK b. Fasilitas akses sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan c. Pembinaan dan pendampingan pemanfaatan prasarana sarana dan teknologi pasca panen dan pengolahan d. Bimbingan Teknis pasca panen dan pengolahan e. Fasilitas akses pembiayaan dan mendorong investasi f. Peningkatan kerjasama hilirisasi peternakan dengan K/L terkait	Direktorat Hilirnak
		Terwujudnya tata kelola birokrasi lingkup Ditjen PKH yang baik, transparan, dan akuntabel	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen PKH	a. Ketidakepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan kinerja b. Rendahnya integritas dan etika aparatur dalam pelaksanaan tugas c. Tidak optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola birokrasi d. Kurangnya transparansi dan akses publik terhadap informasi kinerja Ditjen PKH	a. Kurangnya pemahaman SDM terhadap regulasi terbaru dan lemahnya pengawasan internal. b. Kurangnya internalisasi nilai ASN BerAKHLAK dan lemahnya pengawasan berjenjang. c. Kurangnya infrastruktur TI dan keterampilan digital pegawai. d. Keterbatasan publikasi data dan informasi melalui kanal resmi.	a. Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan regulasi keuangan dan kinerja. b. Memperkuat peran APJP dan mekanisme review internal sebelum pelaporan. c. Penguatan budaya integritas melalui kampanye dan kode etik ASN. d. Penerapan Whistleblowing System dan reward-punishment yang konsisten. e. Pengembangan sistem informasi manajemen terintegrasi.- Pelatihan literasi digital dan optimalisasi e-office, e-performance, dan e-planning. f. Optimalisasi publikasi kinerja melalui website, media sosial, dan laporan publik. g. Implementasi keterbukaan informasi publik secara berkala dan mudah diakses.	Sekretariat Ditjen PKH